



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
REPUBLIK INDONESIA



2025

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
RINGKASAN EKSEKUTIF	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ORGANISASI DAN FUNGSI	2
C. PERAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	17
B. PRIORITAS NASIONAL 2025 DAN RENJA 2025	26
1. <i>Prioritas Nasional</i>	26
2. <i>Rencana Kerja (Renja) 2025</i>	37
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
A. PENGUKURAN KINERJA.....	56
1. <i>Pengelolaan Kinerja</i>	56
2. <i>Pengukuran Kinerja Organisasi</i>	57
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2025	65
1. <i>Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2025</i>	65
2. <i>Analisis Capaian Kinerja</i>	68
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan.....	70
IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	89
IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	102
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional	119
IKU 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman.....	156
IKU 4.2 Pengeluaran Wisata Mancanegara (USD/ Kunjungan)	170
IKU 5 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	182



IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.....	198
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.	202
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	208
1. <i>Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran</i>	208
2. <i>Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan</i>	209
3. <i>Capaian Kinerja Anggaran</i>	210
4. <i>Efisiensi Penggunaan Anggaran</i>	212
BAB IV EVALUASI KINERJA	216
A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA	216
B. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT.....	228
<i>Hasil Evaluasi SAKIP.....</i>	228
<i>Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP</i>	230
C. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA	237
BAB V PENUTUP	240
A. KESIMPULAN.....	240
B. HARAPAN DAN TINDAK LANJUT	241
LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ringkasan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025	ix
Tabel 1.1	Mandat Regulasi Menko Perekonomian RI kepada Deputy V	9
Tabel 1.2	Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	11
Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Awal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.2	Indikasi Pendanaan Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	23
Tabel 2.3	Indikasi Pendanaan Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	24
Tabel 2.4	Indikasi Pendanaan Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata	24
Tabel 2.5	Indikasi Pendanaan Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Strategis dan Proyek Strategis	25
Tabel 2.6	Indikasi Pendanaan Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	25
Tabel 2.7	Indikasi Pendanaan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	26
Tabel 2.8	Pemetaan Program Prioritas yang didukung Deputy V	27
Tabel 2.9	Sasaran Kegiatan (SK), Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) Deputy V Tahun 2025	38
Tabel 2.10	Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy V Kemenko Perekonomian Tahun 2025	44
Tabel 2.11	Rencana Aksi Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	49
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025	54
Tabel 3.2	Indeks Capaian IKU	60
Tabel 3.3	Kriteria Capaian Kinerja NSS	63
Tabel 3.4	Pengukuran IKU Deputy V	64
Tabel 3.5	Hasil Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Deputy Tahun 2025	65
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.1	73
Tabel 3.7	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 1.1	73
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 2.1	90
Tabel 3.9	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 2.1	91
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.1	104
Tabel 3.11	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.1	105
Tabel 3.12	Perbandingan Kualitas Infrastruktur dan IPM beberapa negara ASEAN	112
Tabel 3.13	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.2	121



Tabel 3.14	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.2	122
Tabel 3.15	Daftar Proyek Strategis Nasional	132
Tabel 3.16	Nilai Investasi PSN penyelesaian oleh Deputy V	133
Tabel 3.17	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.1	158
Tabel 3.18	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.1	159
Tabel 3.19	Capaian Level Nasional/Internasional (Khusus IKU Stakeholder)	163
Tabel 3.20	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.2	171
Tabel 3.21	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.2	172
Tabel 3.22	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan berdasarkan asal Negara Tahun 2025	175
Tabel 3.23	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 5.1	186
Tabel 3.24	Realisasi Isu Strategis	186
Tabel 3.25	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 5.1	187
Tabel 3.26	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 6.1	199
Tabel 3.27	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 6.1	200
Tabel 3.28	Hasil Pengukuran Kinerja IKU 7.1	203
Tabel 3.29	Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 7.1	204
Tabel 3.30	Rincian Anggaran Berdasarkan Kegiatan	209
Tabel 3.31	Capaian Output Program	211
Tabel 3.32	Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	213
Tabel 4.1	Matriks Evaluasi Unit Kerja	217
Tabel 4.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah ...	222
Tabel 4.3	Pending Issue terkait Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata ...	226
Tabel 4.4	Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	229
Tabel 4.5	Tabel hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	230
Tabel 4.6	Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja	231
Tabel 4.7	Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja	234
Tabel 4.8	Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Pelaporan Kinerja	235
Tabel 4.9	Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja	237



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pagu Deputy Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	xi
Gambar 2	Realisasi Anggaran Deputy Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	xii
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputy V Tahun 2025 (berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024)	4
Gambar 1.2	Kondisi Sumber Daya Aparatur Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	5
Gambar 1.3	Sasaran Utama Visi Indonesia 2045	6
Gambar 1.4	Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045 (RPJMN 2025 – 2029)	6
Gambar 1.5	Cascading Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029	8
Gambar 3.1	Status Capaian NKO	58
Gambar 3.2	Proses Perhitungan NKO	59
Gambar 3.3	Polarisasi Maximize	61
Gambar 3.4	Polarisasi Minimize	61
Gambar 3.5	S&P Global ASEAN Manufacturing PMI Tahun 2025	79
Gambar 3.6	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Tahun 2021 s/d 2025	93
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Negara ASEAN 2021-2025	94
Gambar 3.8	Peluncuran Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Jakarta, 20 Oktober 2025)	96
Gambar 3.9	Capaian Proyek Strategis Nasional	134
Gambar 3.10	Perbandingan Kapasitas Tampung Air Per Kapita Tahun 2025 (m3/kapita)	136
Gambar 3.11	Anggaran Investasi Untuk Infrastruktur	142
Gambar 3.12	Pembiayaan Inovasi Pembangunan Infrastruktur	146
Gambar 3.13	Target RKP dan Realisasi BPS Tahun 2021-2025	162

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LAKIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga disusun selaras dengan dokumen perencanaan strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LAKIP Tahun 2025 memuat uraian mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi, serta analisis atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Sepanjang Tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata telah melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata guna mendukung prioritas pembangunan nasional, peningkatan daya saing ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dan para pemangku kepentingan. Namun demikian, berbagai tantangan dan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi selama tahun berjalan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan efektivitas kebijakan dan kualitas koordinasi.

Melalui penyusunan LAKIP ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih terukur, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terus diperkuat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata selama Tahun 2025.

Jakarta, 20 Februari 2026

Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Dida Gardera, S.T., M.Sc.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata juga berkomitmen mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata atau disebut juga Deputi V.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata tahun 2025 mengacu pada 7 Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. SS yang pertama adalah Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas. SS yang kedua adalah Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing. SS yang ketiga adalah Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. SS yang keempat adalah Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata. SS yang kelima adalah Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas. SS yang keenam adalah Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas. Lalu, SS yang ketujuh adalah Terwujudnya Tata



Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas.

Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025

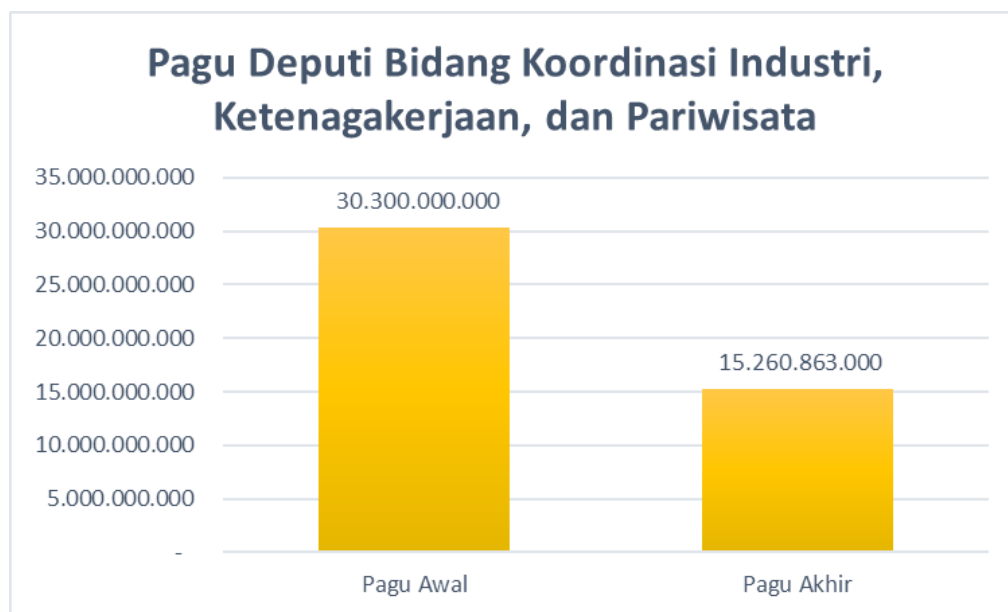
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5%	5,3%*)	96,36	96,36
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing					
2.1	Indikator 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,3%	3,75%*)	113,64	113,64
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi					
3.1	Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah	4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 4 KSEP	120	99,16
3.2	Indikator 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	65%	78,31	
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	7,41%**)	77,75	85,84



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
4.2	Indikator 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Jumlah	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.297,31* *)	93,92	
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	4 dari 4	120	120
VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3,76 dari 4	120	120
VII	Sasaran Program 7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata					
7.1	Indikator 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	85%	85%	100	100
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025						109,7%

Terkait dengan akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2025 turut melakukan *Auto Adjustment* anggaran sesuai edaran dari Kementerian Keuangan. Pagu anggaran tahun 2025 sebelum *Auto Adjustment* adalah sebesar Rp. 30.300.000.000,00, kemudian pagu tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 22.305.481.000,00. Pada bulan Februari, pagu anggaran kembali mengalami *Automatic Adjustment* dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pada triwulan II, pagu anggaran mengalami relaksasi atau pembukaan blokir sehingga pagu anggaran menjadi Rp 14.760.863.000. Lalu pada triwulan III, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata melakukan permohonan Anggaran Belanja Tambahan sehingga pagu anggaran Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menjadi sebesar Rp 15.260.863.000.



Gambar 1. Pagu Deputy Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Adapun berdasarkan data SP2D OM SPAN sampai dengan 31 Desember 2025, dari total pagu belanja, telah terealisasi sebesar Rp 15.163.316.672 atau mencapai 99,36% dari alokasi anggaran.



Gambar 2. Realisasi Anggaran Deputy Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Capaian kinerja indikator kinerja program dan kegiatan yang didukung dengan analisis akuntabilitas keuangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah dapat melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target keluaran yang diperjanjikan, dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia. Tercapainya kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata tahun 2025 bukan berarti pekerjaan berjalan tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan terkait kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang mengakibatkan proses pembahasan kebijakan memakan waktu lebih lama. Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas komunikasi dengan pemangku kepentingan pada forum rapat koordinasi Kementerian/Lembaga.



Dengan penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance* di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.



Peresmian Pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon

Menjadi investasi petrokimia terintegrasi terbesar dan diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi regional serta memperluas penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan.

Diskusi Inovasi Strategis Bersama Kalbe Group

bertujuan memperkenalkan inisiatif dan investasi Kalbe Group dalam pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia guna mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional, khususnya melalui fasilitas riset, pengembangan, dan manufaktur di site KBIC.

BAB I PENDAHULUAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 2025–2029 dirancang sebagai fondasi untuk mendukung pelaksanaan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan mewujudkan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi yang disusun berpedoman pada kerangka ekonomi makro dan rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, dengan tujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pembangunan, dan menyelesaikan prioritas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peran kunci dalam pencapaian 5 (lima) indikator Sasaran Utama Pembangunan, di mana salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di akhir periode RPJMN 2025–2029, arah kebijakan dan strategi kementerian ini dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional (PN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Prioritas Nasional yang menjadi lingkup kerja kementerian ini mencakup PN 2, 3, 4, 5, dan 7.

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dirumuskan selaras dengan garis kebijakan nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk melaksanakan fungsi utamanya dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga di bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta dalam hal pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis. Fokus kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.



Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 merupakan sarana eksplorasi capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi, serta pengendalian sebagai implementasi dari tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata atau disebut juga Deputy V.

B. Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Deputy V adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy V menyelenggarakan fungsi.

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;

2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu dan agenda pembangunan nasional di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata;
5. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Struktur Organisasi Deputy V disusun dan ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2024. Pengaturan struktur organisasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan berlakunya peraturan dimaksud, struktur organisasi Deputy V terdiri dari:

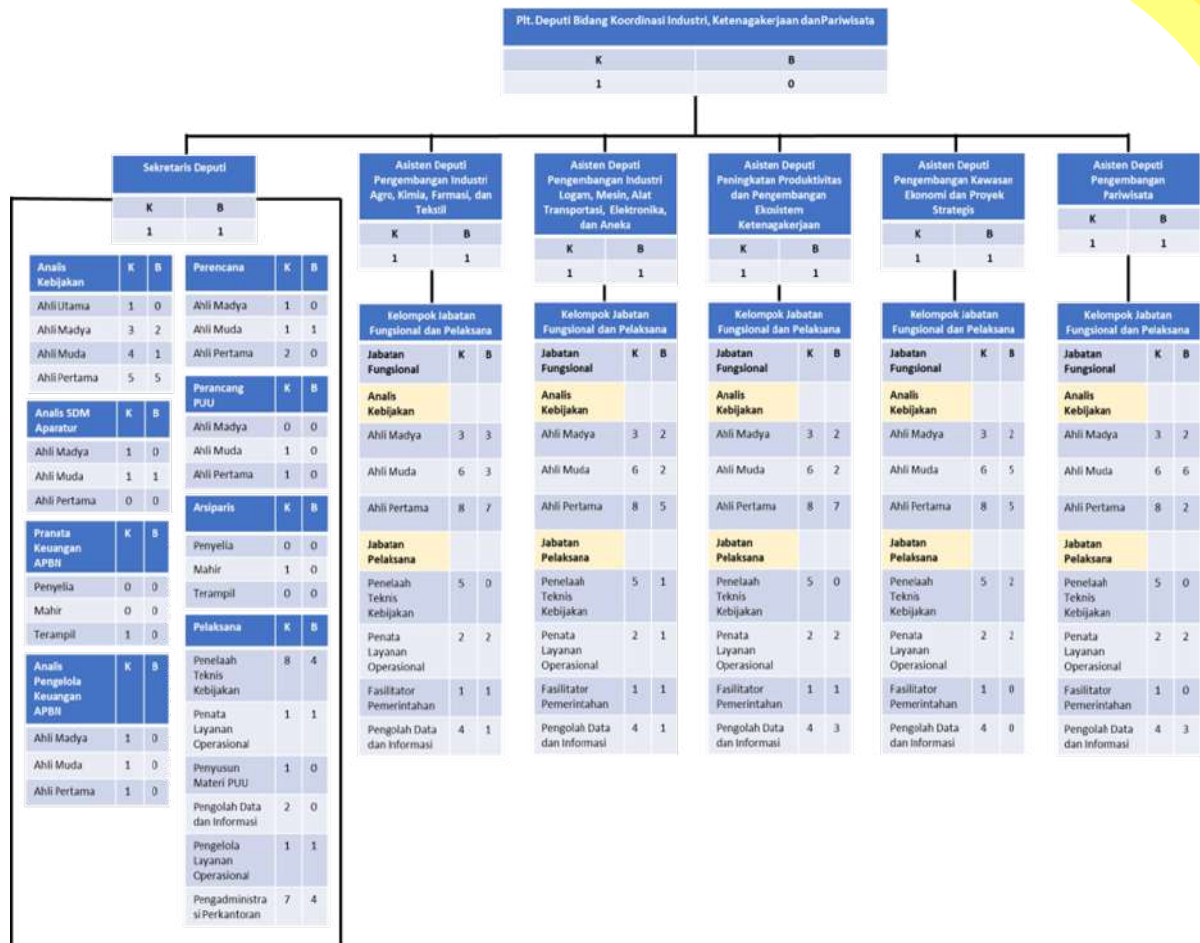
1. Sekretariat Deputy;
2. Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
3. Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka;
4. Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
5. Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis; dan
6. Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata.

Susunan Struktur Organisasi Deputy V sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 disajikan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy V Tahun 2025 (berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Deputy V secara efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai serta terdistribusi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemetaan SDM menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi, jumlah, dan penempatan pegawai dengan beban kerja serta target kinerja yang ditetapkan. Berikut disajikan pemetaan SDM pada Deputy V Tahun 2025 sebagai dasar pengelolaan SDM dan penguatan pencapaian kinerja organisasi.



Gambar 1.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

C. Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Indonesia bercita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara “nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan” sebagaimana tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045. Visi tersebut dicerminkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan jangka panjang.



Gambar 1.3 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 (RPJMN 2025 – 2029)

Untuk mencapai visi dan sasaran jangka panjang tersebut, ditetapkan misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 17 Arah Pembangunan sebagaimana berikut:



Gambar 1.4 Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025 – 2045 (RPJMN 2025 – 2029)

Implementasi Agenda Pembangunan Jangka Panjang dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu: i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi; ii) Tahap Kedua (2030–2034) Akselerasi Transformasi; iii) Tahap Ketiga (2035 – 2039) Ekspansi Global; dan Tahap Keempat (2040– 2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Berdasarkan hasil pemetaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Nasional (PN) 3, PN 4, dan PN 5. Peran tersebut diwujudkan melalui kontribusi kinerja terhadap indikator prioritas nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi kedeputan, yaitu:

1. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal;
2. Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata;
3. Devisa pariwisata;
4. Rasio PDB industri pengolahan; dan
5. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Peran strategis Deputi V dalam mendukung Program Prioritas Nasional adalah dengan memfokuskan pada fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Peran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan perekonomian secara nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi V, selanjutnya menjadi wujud *cascading* kinerja dari sasaran strategis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke tingkat Deputi, yang diwujudkan melalui dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. *Cascading* kinerja dimaksud memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengukuran kinerja secara berjenjang, baik secara internal maupun melalui pelibatan kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Deputy V secara langsung berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan serta target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Adapun *Cascading Kinerja* Menko Perekonomian ke Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Visi Kemenko Perekonomian	Terwujudnya Perekonomian yang Maju Melalui Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045											
Visi Deputy V	Terwujudnya Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045											
Misi Deputy V	M1. Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan							M2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Adaptif dan Akuntabel.				
Tujuan	T1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan							T2. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.				
Sasaran Strategis	SS.1 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas		SS.2 Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing		SS.3 Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi		SS.4. Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata		SS.5 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas		SS.6 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	SS.7. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas
IKU	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja		Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
Unit Kerja Terkait	Asdep ILMATEA	Asdep LAKFT	Asdep P3EK		Asdep PKEPS	Asdep PKEPS	Asdep Pariwisata	Asdep Pariwisata	Semua Unit Es. II	Semua Unit Es. II	Semua Unit Es. II	

Gambar 1.5 Cascading Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Deputy V disusun selaras dengan kebijakan nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang industri, ketenagakerjaan, pariwisata, serta pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis nasional. Disamping itu, berikut adalah Mandat yang diberikan Menteri Koordinator Bidang



Perekonomian pada Deputy V melalui Permenko dan Kepmenko sebagai berikut.

Tabel 1.1 Mandat Regulasi Menko Perekonomian RI kepada Deputy V

Peraturan	Keterangan
Kepmenko No. 251 Tahun 2022	Tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Biaya Mencari Kerja, dan Insentif Pengisian Survei Evaluasi Bagi Penerima Kartu Prakerja
Kepmenko No. 49 Tahun 2023	Tentang Perubahan Atas Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja No. 266 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Kepmenko No. 50 Tahun 2023	Tentang Sekretariat Komite Cipta Kerja
Kepmenko No. 256 Tahun 2024	Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja No. 266 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Kepmenko No. 423 Tahun 2024	Tentang Tim Transisi Pengalihan Program Kartu Prakerja dari Kemenko Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan
Kepmenko No. 97 Tahun 2025	Tentang Panitia Antar Kementerian Dan/Atau Antar Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Permenko 10/2024	Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun
Kepmenko 412 Tahun 2024	Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Di Bidang Proyek Strategis Nasional Dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
Permenko 10/2023	Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batam



Dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan sasaran program, fokus kebijakan Deputy V pada periode 2025–2029 meliputi:

1. **Pengembangan industri agro, kimia, farmasi, dan tekstil yang berkualitas**, melalui penguatan koordinasi kebijakan hulu–hilir, peningkatan nilai tambah, serta harmonisasi regulasi dan dukungan investasi.
2. **Pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, dan aneka yang berkualitas**, melalui peningkatan daya saing industri, penguatan rantai pasok nasional, serta optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri.
3. **Peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan yang berkualitas**, melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dengan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan hubungan industrial.
4. **Pengembangan kawasan ekonomi dan proyek strategis yang berkualitas dan berdaya saing**, melalui percepatan koordinasi penyelesaian hambatan lintas sektor serta peningkatan iklim investasi dan pembangunan wilayah.
5. **Peningkatan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan**, melalui penguatan koordinasi pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta mendukung pencapaian target kinerja Deputy V secara berkelanjutan. Koordinasi teknis yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kegiatan Koordinasi
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

No	Kegiatan Koordinasi	Unit Keasdepan
1	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Industri Agro	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
2	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Industri Agro	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
3	Koordinasi Kebijakan Penguatan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
4	Koordinasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Industri Kimia	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
5	Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
6	Koordinasi Kebijakan TPT Berkelanjutan (Sustainable Textiles)	Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
7	Koordinasi kebijakan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
8	Kebijakan Penguatan Industri Besi-Baja Nasional	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
9	Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri otomotif nasional	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
10	Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri dirgantara	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
11	Koordinasi kebijakan penguatan ekosistem industri mesin dan peralatan	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
12	Koordinasi kebijakan rantai pasok bahan baku, proses produksi, dan akses pasar di sektor ILMATEA	Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
13	Koordinasi program kerjasama pelatihan Industri Kecil dan Menengah	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan



No	Kegiatan Koordinasi	Unit Keasdepan
14	Koordinasi Kebijakan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing Tinggi	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
15	Koordinasi Penguatan Implementasi Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
16	Koordinasi Kebijakan dan Harmonisasi Program Pelatihan dan Pemagangan Berkualitas	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
17	Koordinasi Penguatan Kerja Sama Internasional terkait Pengembangan SDM dan Produktivitas	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
18	Koordinasi Program Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja khususnya Perempuan dan Pekerja Rentan yang Lebih Masif dan Inklusif	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
19	Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK terkait UU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
20	Koordinasi pelaksanaan transisi pekerjaan yang berkeadilan (just transition)	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
21	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengupahan dan Penetapan Upah Minimum	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
22	Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Gig Economy pada Sektor Strategis	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
23	Koordinasi Penyusunan Regulasi Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan Pekerja Berbasis Platform Lainnya	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
24	Koordinasi Penguatan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja	Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
25	Koordinasi, monitoring evaluasi dan debottlenecking pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka percepatan penyelesaian PSN	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
26	Koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan dampak pemanfaatan PSN guna terciptanya peningkatan ekonomi jangka panjang	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
27	Koordinasi dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan PSN dan kawasan strategis lainnya	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

No	Kegiatan Koordinasi	Unit Keasdepan
28	Koordinasi penyusunan regulasi terkait Kawasan Berorientasi Transit (TOD)	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
29	Koordinasi penyusunan regulasi terkait pedoman pelaksanaan skema pembiayaan khususnya Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
30	Koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Kantor Bersama KPBU RI	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
31	Koordinasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi kawasan	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
32	Koordinasi monitoring dan debottlenecking terhadap isu strategis dalam penyelenggaraan KPBPB	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
33	Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk peningkatan konektivitas sebagai penunjang aksesibilitas destinasi pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
34	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan atas pelaksanaan dan pengembangan Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
35	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
36	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk optimalisasi tata kelola destinasi pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
37	Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk transformasi ekosistem penyelenggaraan Event	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
38	Koordinasi dan sinergi kebijakan untuk optimalisasi keamanan sektor pariwisata melalui penerapan asuransi pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
39	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk penguatan sumber daya manusia di sektor pariwisata	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy V Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputy V, peran strategisnya, isu strategis yang dihadapi Deputy V, serta format sistematika laporan yang akan disajikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja terdiri dari: Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan secara sistematis pelaksanaan pengukuran kinerja Deputy V, disertai dengan analisis capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama serta indikator pendukung yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut, termasuk keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan hasil kinerja yang dicapai, sebagai landasan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan Deputy.

BAB IV EVALUASI KINERJA

Bab ini memaparkan analisis capaian kinerja Deputy V dengan menitikberatkan pada perbandingan tren kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras (*inline*) antara tahun 2024 dan 2025, sebagai bentuk implementasi sasaran strategis Deputy sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Analisis tersebut dilakukan untuk menilai konsistensi pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputy. Evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2025

mencakup identifikasi faktor keberhasilan dan kendala strategis dalam pencapaian target IKU, yang selanjutnya dianalisis keterkaitannya dengan kualitas perencanaan kinerja tahunan serta keselarasan antara program dan kegiatan Deputy dengan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Renstra. Selain itu, bab ini menguraikan langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB dan Inspektorat yang dirumuskan dalam rencana aksi peningkatan kinerja Deputy, sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra di bidang koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan ringkas atas pelaksanaan dan capaian kinerja organisasi selama Tahun 2025, yang merangkum hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, tingkat pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan langkah perbaikan kinerja ke depan.

LAMPIRAN Lampiran berisi data dan dokumen pendukung Laporan Kinerja.



Monitoring Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi

bertujuan meninjau secara langsung lokasi pemagangan dan berdiskusi langsung dengan paara peserta magang dan mentor



BAB II PERENCANAAN KINERJA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Peluncuran Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi

bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing . Total kuota peserta magang batch 1 sampai 20.000 orang. (Jakarta, 20 Oktober 2025)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Deputy V Tahun 2025–2029 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025. Renstra disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Deputy dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor. Penyusunan Renstra ini selaras dengan RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029. Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam periode 2019–2024, pembangunan sektor industri, ketenagakerjaan, pariwisata, serta pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 dan dinamika global. Namun demikian, ketiga sektor tersebut tetap menunjukkan peran strategis sebagai pilar utama perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan daya saing nasional. Berbagai kebijakan pemulihan dan reformasi struktural telah mendorong kebangkitan industri pengolahan non-migas, pemulihan pasar kerja, percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis ekonomi, serta pemulihan sektor pariwisata menuju arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Memasuki periode 2025–2029, Deputy V dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan baru, antara lain transformasi industri berbasis nilai tambah, perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan transisi hijau, peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta tuntutan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini disusun untuk memperkuat peran koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, mengoptimalkan potensi sektor strategis, serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan secara terintegrasi guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Mengacu pada visi tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputy V sebagai berikut:

VISI:

“TERWUJUDNYA INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA YANG MAJU MELALUI KOORDINASI KEBIJAKAN YANG EGEKTIF MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi ini menunjukkan bahwa Deputy V, yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan: (i) Pengembangan Industri, Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas; (ii) Pengembangan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas; (iii) Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas; (iv) Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang



Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing; dan (v) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan.

Deputi V, sebagai unit yang tidak dapat dipisahkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian Misi Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah dirumuskan khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor Industri, ketenagakerjaan dan pariwisata, sehingga misi Deputi V adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Adaptif dan Akuntabel.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta kondisi nasional maupun global dan serta kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputi V, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2025-2029, Deputi Bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata merumuskan 2 (dua) tujuan ke deputian yaitu:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian Sektor Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel.

Keterkaitan antara Sasaran Strategis, Visi, Misi, dan Tujuan Deputy V digambarkan dalam rumusan peta strategi seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Awal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Berkualitas							
IKU 1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,50%	5,70%	6,85%	7,81%	8,14%	Persentase
Sasaran Program 2: Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing							
IKU 2	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	3,30%	3,45%	3,66%	3,75%	3,9%	Persentase
Sasaran Program 3: Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi							
IKU 3	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	5 KSEP dari 5 KSEP	KSEP
IKU 4	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional	83%	83%	83%	83%	83%	Persentase
Sasaran Program 4: Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata							
IKU 5	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%	10,01%	10,89%	11,24%	11,57%	Persentase
IKU 6	Pengeluaran Wisata Mancanegara (USD/ Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.400- 1.479	USD 1.500- 1.577	USD 1.520- 1.595	USD 1.600- 1.672	USD

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program 5: Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 7	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
Sasaran Program 6: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 8	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks
Sasaran Program 7: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas							
IKU 9	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%	85%	85%	85%	85%	Persentase

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis Deputy V sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, berfokus pada peningkatan kualitas dan efektivitas koordinasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, sinkronisasi program pembangunan, serta penguatan rekomendasi kebijakan di sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Seluruh IKU tersebut menuntut pelaksanaan kegiatan koordinasi yang intensif, berbasis data dan analisis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan dukungan pendanaan yang terencana dan proporsional.

Ketersediaan anggaran secara langsung menentukan ruang lingkup, intensitas, dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU. Kegiatan strategis seperti rapat koordinasi tingkat pusat dan daerah, penyusunan kajian kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata hanya dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran berpotensi mengurangi frekuensi kegiatan, kedalaman analisis kebijakan, serta jangkauan koordinasi, yang pada akhirnya berdampak pada capaian kinerja deputy.

Selain aspek kecukupan, keselarasan antara perencanaan anggaran dan target IKU juga menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Kerangka pendanaan yang disusun secara selaras dengan sasaran strategis deputy memungkinkan prioritas anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi lebih menekankan pada pencapaian hasil (outcome) dan manfaat kebijakan, sehingga mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja deputy.

Oleh karena itu, penguatan kerangka pendanaan yang terintegrasi dengan perencanaan kinerja menjadi kebutuhan mendasar bagi Deputy V. Kerangka pendanaan yang kuat dan berkelanjutan akan memastikan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan strategis lintas sektor, mendukung pencapaian target IKU secara konsisten, serta memperkuat akuntabilitas kinerja deputy dalam jangka menengah dan panjang. Pada akhirnya, dukungan anggaran yang memadai menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan sasaran strategis deputy dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berikut adalah indikasi pendanaan Deputy V Tahun 2025 – 2029:

Tabel 2.2 Indikasi Pendanaan
Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Terwujudnya Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB (%)	3,58	3,71	4,45	5,08	5,29	2.700	3.500	3.705	3.922	4.152	Asdep Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Argo, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global											
2519.ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							2.000	2.000	2.130	2.269	2.416	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan							1.000	-	-	-	-	
2519.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro							-	500	533	567	604	
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan							1.000	-	-	-	-	
2519.ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan							-	1.000	1.065	1.134,00	1.208,00	
2519.ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Tekstil							-	500	533	567	604	
2519.PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							700	1.500	1.575	1.654	1.736	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor							700	-	-	-	-	
2519.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil							-	1.500	1.575	1.654	1.736	



Tabel 2.3 Indikasi Pendanaan Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan						4.000	3.500	3.728	3.970	4.228	Asdep Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja											
			Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan											
4545.ABK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							500					
4545.ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan							500					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							3.500					
4545.PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan							1.500					
4545.PBK.002		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan							1.000					
4545.PBK.003		Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja							1.000					
4545.PBK		Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM								3.500	3.728	3.970	4.228	
4545.PBK.001		Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja								1.500	1.598	1.701	1.812	
4545.PBK.002		Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan								2.000	2.130	2.268	2.416	

Tabel 2.4 Indikasi Pendanaan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara						2.000	3.500	3.728	3.969	4.218	Asdep Pengembangan Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)											
		Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata											
7701.A.BA		A.BA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							2.000	2.000	2.130	2.268	2.416	
7701.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem							1.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata							500	1.000	1.065	1.134	1.208	
7701.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata							500	-	-	-	-	
7701.P.BA		P.BA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1.500	1.598	1.701	1.812	
7701.PBA.001		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata								1.500	1.598	1.701	1.812	



Tabel 2.5 Indikasi Pendanaan
Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Strategis dan Proyek Strategis

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas Inklusif, dan Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saling Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	100	100	100	100	100	15.000	12.500	13.313	14.177	15.399	Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
5266 ABF		ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							4.057	2.000	2.130	2.268	2.416	
5266 ABF.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi		3	3	3	3	3	2.057	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266 ABF.002		Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di		3	3	3	3	3	2.000	1.000	1.065	1.134	1.208	
5266 CCL-OM		CCL-OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		1	1	1	1	1	120	0	0	0	0	
5266 CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan		1	1	1	1	1	120	0	0	0	0	
5266 PBF		PBF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							10.823	10.500	11.183	11.909	12.583	
5266 PBF.001		Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur		2	2	2	2	2	10.823	10.500	11.183	11.909	12.583	

Tabel 2.6 Indikasi Pendanaan Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas LMATEA Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka						3.600	4.500	4.793	5.104	5.438	Asdep Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka
7702 ABK		ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	1.800	1.085	1.134	1.208	
7702 ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Barang Logam dan		2	-	-	-	-	800	-	-	-	-	
7702 ABK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Transportasi		2	-	-	-	-	800	-	-	-	-	
7702 ABK.003		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika		2	-	-	-	-	800	-	-	-	-	
7702 ABK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat		-	3	3	3	3	-	1.000	1.085	1.134	1.208	
7702 PBK		PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM							1.800	1.500	3.728	3.970	4.228	
7702 PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702 PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi		2	-	-	-	-	900	-	-	-	-	
7702 PBK.001		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor		-	1	1	1	1	-	2.500	2.883	2.836	3.020	
7702 PBK.002		Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja		-	1	1	1	1	-	1.000	1.085	1.134	1.208	

Tabel 2.7 Indikasi Pendanaan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Jutaan Rupiah)					Unit Kerja Eselon II
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
			Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	100	100	100	100	100						
			Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100	100	100	100	100						
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4						
7703.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7703.EBA.001		Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7703.EBA.002		Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri,							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

B. Prioritas Nasional 2025 dan Renja 2025

1. Prioritas Nasional

Dalam rangka memastikan keterkaitan yang selaras (*alignment*) antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja sebagaimana prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian indikator Program Prioritas Nasional tersebut didukung melalui strategi *tagging* rincian output pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan kontribusinya terhadap capaian outcome prioritas nasional.

Adapun rincian output yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran dan indikator Program Prioritas Nasional meliputi:

1. Rekomendasi peningkatan produktivitas tenaga kerja;
2. Rekomendasi pengembangan ekosistem ketenagakerjaan;
3. Rekomendasi kebijakan pengembangan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;

4. Rekomendasi kebijakan pengembangan industri semikonduktor;
5. Rekomendasi kebijakan pengembangan hilirisasi industri logam; dan
6. Rekomendasi kebijakan penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tabel 2.8 Pemetaan Program Prioritas yang didukung Deputi V

Uraian				Pagu Anggaran
PN.5	SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		SP.3	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	
		IKP.3.1	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	7.209.025.000
			SK Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	
			IKK Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	7.209.025.000
		IKP.3.2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	424.556.000
			SK Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	
			IKK Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional	
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)	424.556.000

Uraian				Pagu Anggaran
PN.5	SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
	IKS.1.4	Rasio PDB Industri Pengolahan		1.639.053.000
		SP.10	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	
		IKP.10.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	1.639.053.000
		SK	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	
		IKK	Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil	657.023.000
		SK	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	
		IKK	Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Mesin dan Alat Transportasi	233.350.000
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika dan ANEKA	748.680.000
PN.3	SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
	IKS.1.5	Devisa Pariwisata		
		SP.11	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	

Uraian				Pagu Anggaran
		IKP.11.2	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	1.077.065.000
			SK Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	967.456.000
			IKK Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	
			RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Pariwisata yang Berkualitas	967.456.000
PN. 3	SS.1	Terwujudnya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan		
	IKS.1.6	Rasio PDB Pariwisata		
		SP.12	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	
		IKP.12.1	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	109.609.000
			SK Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	
			IKK Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	
			RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	109.609.000
PN.4	SS.3	Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan		
	IKS.3.1	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal		661.905.000
		SP.17	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	
		IKP.17.1	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	661.905.000
		SK	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	



Uraian					Pagu Anggaran
			IKK	Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi	
			IKK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
			IKK	Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	
				RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	50.940.000
				RO REVISI Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	504.250.000
				RO REVISI Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	106.715.000
		SP.26	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas		
		IKP.26.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata		2.262.044.000
			SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	



Uraian					Pagu Anggaran
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	
				RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi	572.576.000
				RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	1.040.000
			SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA	
				RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam	175.402.000
			IKK	"Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka"	
				RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	314.660.000
				RO Revisi Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	305.810.000

Uraian					Pagu Anggaran
			SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	
				RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	560.053.000
			SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	
			IKK	"Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi"	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	
				RO REVISI Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	365.564.000



Uraian					Pagu Anggaran
			SK	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	
			IKK	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	
			IKK	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata	
				RO Revisi Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas	142.341.000
		SP.32	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas		
		IKP.32.1	indeks kepuasan layanan sinkronisasi,koordinasi,dan pengendalian kebijakan di bidang koordinasi industri ketenagakerjaan dan pariwisata		1.088.909.000
			SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	
			IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi. Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	
				RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	1.088.909.000
			SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,	



Uraian				Pagu Anggaran
			Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	
		IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	
			*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*
		SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	
		IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	
			*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*
		SK	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	
		IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	
			*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*



Uraian					Pagu Anggaran
			SK	Terwujudnya layanan sinkronisasi koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan pariwisata	
			IKK	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	
				*RO Revisi Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*
		SP.40	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas		
		IKP.40.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata		722.904.000
			SK	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	
			IKK	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	
			SK	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	
			IKK	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	



Uraian				Pagu Anggaran
			SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	
			IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	
			SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	
			IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	
			SK Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata	
			IKK Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata	
			SK Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	
			IKK Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
			IKK Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
			IKK Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	

Uraian					Pagu Anggaran
			IKK	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
			IKK	Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	
			IKK	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	
			IKK	Indeks kepuasan layanan sekretaris deputy bidang koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata	
				RO REVISI Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	0
				RO REVISI Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	722.904.000
				*RO REVISI Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	*

*: RO telah disebutkan sebelumnya dan rincian anggaran tidak disebutkan

2. Rencana Kerja (Renja) 2025

Sasaran Program pada Rencana Kerja Deputy V Tahun Anggaran 2025 adalah “Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan Dan Pariwisata yang Berkualitas”. Dimana Sasaran Program Deputy V tersebut dibagi menjadi 6 Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Sasaran Kegiatan (SK), Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) Deputi V Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025 (Rp Ribu)
SK 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas		
KRO: ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	3 rekomendasi kebijakan	2.000.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil	1 rekomendasi kebijakan	1.000.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi	2 rekomendasi kebijakan	1.000.000
KRO: PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	1 rekomendasi kebijakan	700.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil	1 rekomendasi kebijakan	700.000
SK 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka yang Berkualitas		
KRO: ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	6 rekomendasi kebijakan	1.800.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Barang Logam dan Mesin	2 rekomendasi kebijakan	600.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara	2 rekomendasi kebijakan	600.000

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025 (Rp Ribu)
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika dan Aneka	2 rekomendasi kebijakan	600.000
KRO: PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	2 rekomendasi kebijakan	1.800.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor	1 rekomendasi kebijakan	900.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Logam	1 rekomendasi kebijakan	900.000
SK 3: Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas		
KRO: ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
KRO: PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri, dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	3.500.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
RO: Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025 (Rp Ribu)
RO: Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
SK 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas		
KRO: ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6 Rekomendasi Kebijakan	4.057.355
RO: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN)	3 Rekomendasi Kebijakan	2.057.355
RO: Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021	3 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
KRO: CCL-OM-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 unit	120.000
RO: Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	1 unit	120.000
KRO: PBF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2 Rekomendasi Kebijakan	10.822.645
RO: Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2 Rekomendasi Kebijakan	10.822.645
SK 5: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan		

Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output /Rincian Output	Volume/Target dan Satuan	Alokasi 2025 (Rp Ribu)
KRO: ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
RO: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Pariwisata yang Berkualitas	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
RO: Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
RO: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
SK6 : Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik		
KRO: EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	3.000.000
RO: Layanan Program dan Tata Kelola di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	1 layanan	1.000.000
RO: Layanan Dukungan Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	1 layanan	2.000.000

Rencana Kerja tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renja 2025 antara lain:

1. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja : i) Koordinasi Program penguatan ekosistem industri berbasis kemitraan

melalui *Link & Match* sektor industri dan pertanian, ii) Koordinasi hilirisasi komoditas prioritas dalam RPJMN 2025-2029 berbasis agro (kelapa sawit, kelapa, ikan TCT, Udang, Ikan Tilapia, Rumput Laut, Sagu, dan Singkong), iii) Percepatan pengembangan dan penguatan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai implementasi atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 melalui penyusunan RPermenko.

2. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka yang Berkualitas, berikut adalah rencana kerja yang telah dilaksanakan antara lain: i) Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, ii) Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.
3. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas maka dilakukan rencana kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, Pelaksanaan *Tech:X* Indonesia-Singapura (*Digital Talent*), Koordinasi kebijakan pengupahan, Koordinasi revisi regulasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Stimulus Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan, mencakup Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Hari Raya bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi, dan Program Pelatihan *Welder* dan *Hospitality*.
4. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan untuk mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, telah disusun rencana kerja yang mencakup antara lain: i) Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan optimalisasi dampak dari

- pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ii) Pengembangan Kawasan Industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan ekonomi, iii) Implementasi alternatif pembiayaan, termasuk di dalamnya Penangkapan Nilai Kawasan (LVC) dan Hak Pengelolaan Terbatas.
5. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan, berikut merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan : i) Percepatan penyelesaian regulasi terkait Kebijakan Dana Pariwisata Berkualitas (*IQTF*), ii) Koordinasi peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi pariwisata, iii) Koordinasi terkait kebijakan penguatan daya saing destinasi pariwisata berkelanjutan, iv) Koordinasi pengembangan terkait digitalisasi layanan perizinan event.
 6. Dalam rangka mendukung sasaran kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Deputy V yang Baik maka dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung layanan administrasi dan kegiatan yang terkait dengan Deputy V.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan, serta merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/

kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Penetapan Kinerja Deputy V Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy V Kemenko Perekonomian Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	1.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,5%
2	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	2.1	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,30%
3	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP
		3.2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%
4	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	4.1	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%
		4.2	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/ Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3
5	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4
6	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4
7	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%

Dalam rangka mendukung tercapainya target pada masing-masing indikator kinerja, telah disusun Rencana Aksi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pemetaan isu strategis, serta pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas; (ii) Pengumpulan data dan informasi industri pengolahan khususnya non-migas; (iii) Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas; (iv) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan industri pengolahan, khususnya non-migas; dan (v) Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas.
2. Dalam rangka mendukung Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja; (ii) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja; (iii) Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja; dan (iv) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja.
3. Dalam rangka mendukung jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat

- dimanfaatkan; (ii) Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas; dan (iii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas.
4. Dalam rangka mendukung Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) , rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN; (ii) Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPk terkait kepastian penyelesaian PSN; (iii) Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK); (iv) Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan terkait skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK); (v) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN; (vi) Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden ; dan (vii) Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat.
 5. Dalam rangka mendukung Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan; (i) Koordinasi kebijakan stimulus pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman; (ii) Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman; (iii) Pengumpulan data dan informasi terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman; (iv) Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman; (v) Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman; (vi) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan sektor akomodasi

- makanan dan minuman; dan (vii) Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman.
6. Dalam rangka mendukung Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan), rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Koordinasi kebijakan peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara; (ii) Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara; (iii) Pengumpulan data dan informasi terkait pengeluaran wisatawan mancanegara; (iv) Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara; (v) Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara; (vi) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara; dan (vii) Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara.
 7. Dalam rangka mendukung Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Pelaksanaan Survei Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata; (ii) Identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan; (iii) Identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja; (iv) Identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing; (v) Identifikasi

- permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan Penyelesaian PSN; (vi) Identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman; dan (vii) Identifikasi permasalahan, penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara.
8. Dalam rangka mendukung Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan (i) Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal atas Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan; (ii) Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I; (iii) Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I; (iv) Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II; dan (v) Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II.
 9. Dalam rangka mendukung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, rencana aksi dilaksanakan antara lain dengan: (i) Peningkatan Keberhasilan Zona Integritas (ZI); (ii) Peningkatan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata; (iii) Peningkatan Implementasi Digitalisasi Arsip; (iv) Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; (v) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; dan (vi) Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI.

Tabel 2.11 Rencana Aksi Tahun 2025
 Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,5%	Optimalisasi koordinasi dalam rangka peningkatan nilai tambah bruto dan daya saing industri pengolahan non-migas yang berkualitas.	• Pemetaan isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas • Pengumpulan data dan informasi industri pengolahan khususnya non-migas	• Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas • Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas	• Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas • Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas	• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan industri pengolahan, khususnya non-migas • Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas
2.	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,30%	Optimalisasi koordinasi dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	• Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	• Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	• Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	• Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja
3.	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP	Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KEK, KI, KSPN, KPBPB)	• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan • Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan • Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan • Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	• Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan • Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas
		3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%	• Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan selesai tahun 2025	• Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN	• Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN	• Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan skema alternatif pembiayaan



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;	- Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PUPK terkait kapasitas penyelesaian PSN - Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan terkait skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN - Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden - Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	- Rapat koordinasi dan monitoring dengan PUPK terkait kapasitas penyelesaian pembangunan PSN - Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penetapan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Harmonisasi Regulasi Turunan terkait skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN - Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	- Rapat koordinasi dan monitoring dengan PUPK terkait kapasitas penyelesaian pembangunan PSN - Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester 1 tahun 2025 kepada Presiden - Implementasi skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) pada Infrastruktur yang tercantum dalam list pilot project - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan skema alternatif pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Sosialisasi regulasi turunan pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	- Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Sosialisasi regulasi turunan pembiayaan Infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) - Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN - Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat
					- Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai - Pengusulan PSN baru			
4.	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%	Koordinasi kebijakan stimulus pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman - Pengumpulan data dan informasi terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	- Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman - Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman - Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman
		4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3	Koordinasi kebijakan peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara	- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara - Pengumpulan data dan informasi terkait pengeluaran	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara - Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					wisatawan mancanegara	• Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara		permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara
5.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Berkualitas	5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	• Pelaksanaan Survei Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	• Identifikasi permasalahan kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan • Identifikasi permasalahan kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja • Identifikasi permasalahan kebijakan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing • Identifikasi permasalahan kebijakan Penyelesaian PSN • Identifikasi permasalahan kebijakan	• Penyusunan Alternatif Rekomendasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan • Penyusunan Alternatif Rekomendasi Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja • Penyusunan Alternatif Rekomendasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing • Penyusunan Alternatif Rekomendasi Penyelesaian PSN • Penyusunan Alternatif Rekomendasi	• Penyusunan rekomendasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan • Penyusunan rekomendasi kebijakan Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja • Penyusunan rekomendasi kebijakan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing • Penyusunan rekomendasi kebijakan Penyelesaian PSN • Penyusunan rekomendasi kebijakan Pertumbuhan Sektor	• Monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri • Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja • Monitoring dan evaluasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing • Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyelesaian PSN • Monitoring dan evaluasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman • Monitoring dan evaluasi kebijakan
					Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Akomodasi Makanan dan Minuman	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara
6.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	• Peningkatan Kepuasan Pihak Eksternal atas Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Kebijakan	• Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	• Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester I	• Tindak lanjut hasil survei Semester I dan persiapan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	• Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II
7.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%	• Peningkatan Keberhasilan Zona Integritas (ZI) • Peningkatan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata • Peningkatan Implementasi Digitalisasi Arsip	• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	• Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

Jakarta, Januari 2025
Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata,


M. Rudy Salahuddin
NIP. 196807111996031001

Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata Melalui Konektivitas dan Aksesibilitas Menuju Destinasi Pariwisata

Dalam rangka mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi dalam RPJMN 2025-2029, diperlukan penguatan konektivitas antarbandara dan antardestinasi, termasuk rute internasional. (Belitung, 21 Agustus 2025)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Pembentukan Dana Pariwisata Berkualitas/Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)

Pemerintah melalui Kemenko. Bidang Perekonomian RI mendorong percepatan penetapan regulasi IQTF sebagai landasan pengelolaan pariwisata berkualitas. Dengan tata kelola pembiayaan yang kuat dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, IQTF diharapkan menjadi penggerak pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan dan bernilai jangka panjang. (Jakarta, 09 September 2025)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengelolaan Kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025 dirangkum dalam tabel berikut ini. Analisis terhadap tabel kinerja tahun 2025 tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian organisasi serta dinamika pelaksanaan dan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran.

Perlu disampaikan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan unit organisasi baru sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputy ini, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu juga merupakan indikator yang baru ditetapkan dan diimplementasikan pada periode perencanaan ini.**

Dengan demikian, capaian IKU tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun sebelumnya, mengingat belum terdapat baseline kinerja dalam struktur organisasi dan kerangka perencanaan yang sama. Tahun 2025 lebih diarahkan sebagai tahun konsolidasi, penajaman indikator, penguatan mekanisme pengukuran kinerja, serta pembentukan baseline yang akan menjadi dasar evaluasi dan perbandingan pada periode selanjutnya.

Analisis capaian kinerja tahun pertama ini oleh karena itu difokuskan pada tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra, kualitas proses koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan, serta identifikasi faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran objektif mengenai performa awal organisasi sekaligus menjadi landasan perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi	
		berdasarkan RPJMN 2025-2029	berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja	Nilai	Persentase (%)	
					berdasarkan target RPJMN 2025-2029	berdasarkan target Perjanjian Kinerja
SS.1 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengelolaan yang Berkualitas						
IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,5	5,5	5,3	96,36	96,36
SS.2 Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing						
IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persentase	3,3	3,3	3,75		113,63
SS.3 Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi						
IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Jumlah		4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 4 KSEP		120
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase		83	65		78,31
SS.4 Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata						
IKU 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53	9,53	7,41	77,75	77,75
IKU 4.2 Pengeluaran	USD	1.300 - 1.381,3	1.300 - 1.381,3	1.297,31*)	99,79	99,79

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Realisasi	
		berdasarkan RPJMN 2025-2029	berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja	Nilai	Persentase (%)	
					berdasarkan target RPJMN 2025-2029	berdasarkan target Perjanjian Kinerja
Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)						
SS.5 Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	-	3 dari 4	4 dari 4		120
SS.6 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	-	3 dari 4	3,76 dari 4		120
SS.7 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	-	85	85		100

*) realisasi hingga triwulan IV 2025

A. Pengukuran Kinerja

1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan suatu proses yang sangat penting dan mencakup beberapa langkah strategis. Langkah pertama dalam proses ini adalah Penetapan Kinerja, yang dilakukan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan yang jelas bagi setiap unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses ini melibatkan pengumpulan data kinerja yang sistematis, dimana data tersebut sangat penting untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai capaian kinerja masing-masing unit.

Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah Pengukuran Data Kinerja, yang bertujuan untuk menilai seberapa baik kinerja tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Proses ini diikuti dengan Pelaporan Kinerja, di mana hasil pengukuran kinerja disampaikan secara transparan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Monitoring dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, pengelolaan kinerja ini tidak hanya bersifat evaluatif tetapi juga proaktif dalam meningkatkan efektivitas kerja.

Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi). Aplikasi ini menyediakan platform yang transparan dan akuntabel,

yang sangat penting dalam era digital saat ini. Masyarakat dapat mengakses informasi kinerja Kementerian melalui laman situs <https://kinerja.ekon.go.id/>, yang memudahkan mereka untuk melihat dan memahami kinerja pemerintah dalam berbagai aspek. Mekanisme pengelolaan kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022, yang mengatur pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Permenko 19 Tahun 2022 ditetapkan untuk merumuskan pengelolaan kinerja organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta menciptakan kinerja organisasi yang optimal. Dalam konteks ini, pengelolaan kinerja organisasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua unit kerja dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

2. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Perjanjian Kinerja. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi dan bukan pemilik peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh nilai capaian NKO, sebagai berikut:

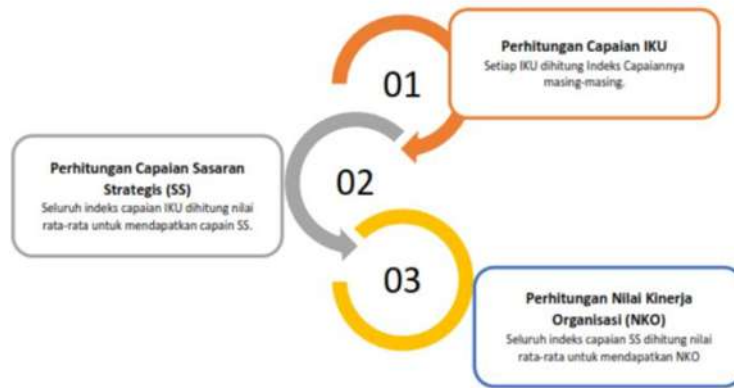


Gambar 3.1 Status Capaian NKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif, adapun Nilai Perspektif merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan konsolidasi dari seluruh Capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja pada seluruh tingkatan unit kerja. Dengan kata lain, perhitungan NKO mengacu pada nilai capaian Perspektif, yang dihitung berdasarkan Capaian NSS. Capaian NSS dihitung berdasarkan Capaian IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Capaian IKU;
- 2) Nilai Sasaran Strategis (NSS);
- 3) Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini.



Gambar 3.2 Proses Perhitungan NKO

Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja, sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Selanjutnya, capaian IKU dilakukan indeksasi capaian IKU, yaitu dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata Capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), maka IKU tersebut tidak dimasukkan

dalam perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS) dari sebuah unit organisasi.

Formula menghitung NKO:

$$\text{NKO} = \sum (\text{Np} \times \text{Bobot Perspektif})$$
$$\text{NKO} = \sum \text{Indeks Capaian IKU}$$

Bobot setiap perspektif dalam model BSC di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditentukan secara proporsional sesuai dengan operasionalisasi perhitungan yang terdapat dalam sistem ekon-GO. Sistem pembobotan rata-rata ini diterapkan untuk model tiga (3) perspektif maupun empat (4) perspektif.

3. Formulasi Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indeks Capaian IKU

	$\text{IKU} \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	$80\% \leq \text{IKU} < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	$\text{IKU} < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 3.3 Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan

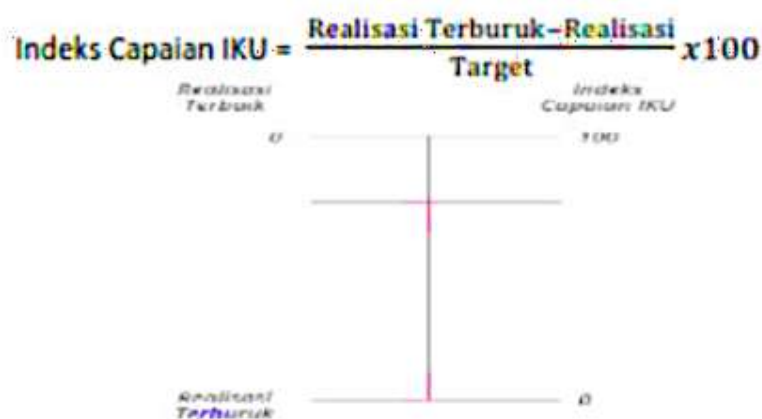


Gambar 3.4 Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut:



3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Contoh:

Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi stabilize adalah:

Jika realisasi < lower target maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika realisasi > *upper target* maka digunakan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}}$$

Jika $\text{Lower Target} \leq \text{Realisasi} \leq \text{Upper Target}$ maka capaiannya 100%.

4. Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Capaian kinerja Sasaran Strategis (NSS) ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Capaian Kinerja NSS

	Hijau	NSS ≥ 100%	Memenuhi Ekspektasi
	Kuning	80% ≤ NSS < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Merah	NSS < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2025, dari 4 (empat) Sasaran Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seluruh atau 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat maximize. Pengukuran atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

Tabel 3.4 Pengukuran IKU Deputy V

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Polarisasi
Perspektif: Stakeholder					
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekosistem Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata guna mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan	1.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,5%	Maximize
		1.2	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,3%	Maximize
		1.3	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP	Maximize
		1.4	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%	Maximize
		1.5	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%	Maximize
		1.6	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3	Maximize
2	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	2.1	Indeks Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	Maximize
3	Terwujudnya Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	3 dari 4	Maximize

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Polarisasi
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	4.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%	Maximize

B. Analisis Capaian Kinerja 2025

1. Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2025

Penilaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di tahun 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diatur didalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Sasaran Strategis dan pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Hasil Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Deputy Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	1.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,5%	5,3%	96,36	96,36

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
2	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,30%	3,75%	113,63	113,63
3	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 4 KSEP	120	99,16
		3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%	65%	78,31	
4	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%	7,41%	77,75	85,83
		4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/ Kunjungan)	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.297,31 *	93,92	
5	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	3 dari 4	4	120	120

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian IKU (%)	Capaian NSS (%)
6	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4	3,76	120	120
7	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%	85%	100	100

***) Capaian hingga Triwulan IV 2025**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$[\{(\frac{96,36 + 113,64 + 99,16 + 88,77}{4}) \times 25\%\} + (120 \times 25\%) + (120 \times 25\%) + (100 \times 25\%)] = 109,9.$$

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mencatatkan performa melampaui target dengan raihan NKO sebesar **109,9%**. Pencapaian ini mengukuhkan predikat '**Memenuhi Ekspektasi**', yang mencerminkan dedikasi unit kerja dalam mengoptimalkan seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sekaligus sebagai dasar perhitungan pencapaian di tahun-tahun berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025	109,9%
---	---------------

2. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Menteri Koordinator Bidang Perekono, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan peran koordinatif, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pada sektor industri, ketenagakerjaan, serta pariwisata. IKU yang diampu Deputi V pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Indikator ini mengukur kontribusi sektor industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. Peningkatan nilai tambah bruto mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi, penguatan struktur industri, serta peningkatan daya saing manufaktur nasional.

IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Indikator ini menggambarkan produktivitas tenaga kerja sebagai salah satu determinan utama daya saing nasional. Pertumbuhan PDB per tenaga kerja menunjukkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dalam mendorong peningkatan kualitas SDM,

penciptaan lapangan kerja produktif, serta transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing

Indikator ini mengukur penguatan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dan kompetitif. Peningkatan jumlah kawasan yang berdaya saing mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah.

IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan pengendalian dan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Persentase penyelesaian PSN menjadi ukuran konkret efektivitas fungsi koordinasi dan *debottlenecking* permasalahan implementasi.

IKU 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Indikator ini mencerminkan dinamika dan kinerja sektor pariwisata serta ekonomi kreatif yang berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan pemulihan dan penguatan ekosistem pariwisata nasional.

IKU 4.2 Pengeluaran Wisata Mancanegara (USD/Kunjungan)

Indikator ini mengukur kualitas dan nilai ekonomi kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan pengeluaran per kunjungan menunjukkan keberhasilan strategi peningkatan *value of tourism*, termasuk pengembangan destinasi berkualitas dan penguatan industri pendukung.

IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan

Indikator ini merupakan ukuran komprehensif atas efektivitas peran Deputi dalam memastikan harmonisasi kebijakan antar

kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan

Indikator ini mengukur persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan koordinasi yang diberikan Deputy. Tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Indikator ini menilai komitmen dan konsistensi Deputy dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan sistem manajemen kinerja.

Adapun Analisis Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy V Tahun 2025 tersebut, yaitu:

IKU 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini diukur salah satunya melalui peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan. Untuk mendukung peningkatan nilai tambah bruto industri pengolahan, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, dengan Kementerian Perindustrian sebagai *stakeholder* atau mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara industri pengolahan migas berada di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Industri Pengolahan non migas mencakup 16 sektor dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu:

- 1) Industri Makanan dan Minuman;
- 2) Industri Pengolahan Tembakau;
- 3) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi;
- 4) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
- 5) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
- 6) Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
- 7) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
- 8) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
- 9) Industri Barang Galian bukan Logam;
- 10) Industri Logam Dasar;
- 11) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik;
- 12) Industri Mesin dan Perlengkapan;
- 13) Industri Alat Angkutan;
- 14) Industri Furniture;
- 15) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, target Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan adalah sebagai berikut: (i) Tahun 2025: 5,50% dan (ii) Tahun 2029: 8,14%. Sasaran tersebut dirumuskan sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi ekonomi nasional, dengan menempatkan sektor manufaktur sebagai motor penggerak utama pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk menetapkan target Peningkatan Nilai Tambah Bruto

Industri Pengolahan pada periode antara tahun 2025 dan 2029, yaitu tahun 2026, 2027, dan 2028, dilakukan *forecasting* menggunakan deret waktu (*time series*) data lima tahun terakhir (2021 s.d. 2024). Berdasarkan *forecasting* tersebut, diproyeksikan target kontribusi industri pengolahan terhadap PDB selama tahun 2026 s.d 2028 sebagai berikut: (i) Tahun 2026: 5,70%; (ii) Tahun 2027: 6,85%; dan (iii) Tahun 2028: 7,81%.

Kontribusi industri pengolahan dibagi menjadi dua, yaitu industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (AKFT) dan industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka (LMATEA). Kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan dengan pencapaian sub bidang di tahun 2025, antara lain (i) Industri makanan dan minuman (7,13%) ; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Sedangkan kontribusi industri LMATEA meliputi 6 sub bidang industri pengolahan, antara lain (i) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; (ii) Industri Logam Dasar; (iii) Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik; (iv) Industri Mesin dan Perlengkapan; (v) Industri Alat Angkutan; dan (vi) Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,3% (y-on-y), yang mencerminkan kinerja sektor manufaktur yang tetap tangguh. Walaupun realisasi tersebut sedikit berada di bawah target RPJMN 2025–

2029 dan RKP Tahun 2025 yang sebesar 5,5%, namun tingkat efektivitas pencapaiannya sudah mencapai 96,36%. Capaian tersebut menegaskan bahwa sektor manufaktur masih tumbuh dan berupaya mempertahankan stabilitas produksi di tengah tantangan rantai pasok global dan volatilitas harga bahan baku. Adapun ringkasan realisasi capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Persentase	5,50%	5,3%	96,36%

Perhitungan capaian indikator tersebut didapat dari formula sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(\text{NTB Industri Pengolahan } t - \text{NTB Industri Pengolahan } t-1)}{\text{NTB Industri Pengolahan } t-1} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan NTB Industri Pengolahan (\%)} = \sum \frac{(2757586 \times 10^9 - 2618854 \times 10^9)}{2618854 \times 10^9} \times 100\% = 5,3\%$$

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi untuk IKU 1.1 tersebut sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana Aksi IKU 1.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan industri pengolahan,	Terlaksana	a. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Agro meliputi: Hilirisasi komoditas prioritas dalam RPJMN 2025-2029 berbasis agro (kelapa sawit, kelapa, ikan TCT, Udang, Ikan Tilapia, Rumput Laut, Sagu, dan Singkong);

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	hususnya non-migas		• Program penguatan ekosistem industri berbasis kemitraan melalui <i>Link & Match</i> sektor industri dan pertanian; • Kebijakan industri hasil tembakau; • Progress implementasi Peta Jalan Swasembada Gula; • Tarif bea masuk komoditas Almond sebagai bahan baku industri; • Kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan; • Koordinasi Pembahasan Usulan Lartas Impor Komoditas Ubi Kayu dan Tepung Tapioka • Koordinasi Pembahasan Usulan Lartas Ekspor Kelapa b. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Industri Kimia dan Farmasi • Monitoring Implementasi Inpres 6/2016; • Percepatan Rantai Nilai Plastik Berkelanjutan; • Supply Demand Industri Bahan Baku Obat; • Peta jalan hilirisasi silika dalam rangka Menunjang Pengembangan Ekosistem Industri Manufaktur Panel Surya dan Semikonduktor; • Monitoring dan evaluasi industri Kimia Dalam Negeri; c. Pelaksanaan koordinasi terkait Industri Tekstil meliputi: • Sinkronisasi data impor atas produk TPT dan Alas Kaki; • Pemberlakuan BMAD Impor Dumping Benang Filamen; • Sosialisasi tata cara penerbitan Pertek Impor Tekstil dan Produk Tekstil d. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim



No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional e. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan f. Penyusunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 374 j.o. Nomor 380 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. g. Menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru h. Telah dilaksanakan monitoring implementasi kebijakan industri semikonduktor nasional: - Selama tahun 2025 dilaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Peta Jalan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Koordinasi dilaksanakan dengan menyelenggarakan rangkaian rapat serta FGD penyusunan RPerpres, permohonan pelaksanaan <i>joint declaration</i>, dan kerjasama dengan Belanda dan Singapura. - Pelaksanaan FGD <i>Building Collaboration And Partnership of Semiconductor and AI Development in Indonesia</i>.

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			ii. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Percepatan Program KBLBB: - Adopsi KBLBB dan ekosistemnya telah tumbuh signifikan sejak Perpres 55/2019 diberlakukan, yang ditunjukkan oleh perkembangan penjualan, produksi, populasi, investasi industri manufaktur, dan infrastruktur pengisian daya; - Terkait skema insentif fiskal KBLBB, Kementerian Perindustrian telah menyusun usulan 2026 (keberlanjutan insentif 2025) namun masih menunggu arahan Menteri Perindustrian, sementara Kemenkeu dalam posisi mengkaji kemungkinan <i>refocusing</i>. Demikian juga Kemendagri merencanakan penyesuaian besaran insentif pajak daerah untuk KBLBB; - Terdapat kesepahaman untuk mendorong integrasi hilirisasi baterai nikel dalam negeri dengan industri KBLBB. j. Pembangunan Lini Propelan Merah Putih Kapasitas 100 kg. PT Pindad membangun industri (<i>up-scaling</i>) <i>intermediate facility</i> sebagai sarana transisi dan finalisasi formulasi hasil penelitian di Turen, Malang. Pembangunan industri ini berperan besar pada peningkatan utilisasi industri nasional, pembukaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri logam. Pembangunan pabrik dibantu pembiayaan dari BPDP.
2	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian	terlaksana	a. FGD Strategi Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi b. Koordinasi Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	isu strategis dan permasalahan industri pengolahan, khususnya non-migas		di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara c. Kunjungan kerja ke Humbang Hasundutan dalam rangka mendukung penguatan ekosistem pertanian berbasis kemitraan melalui program link and match antara sektor industri dan pertanian d. Ikut serta dalam koordinasi sebagai Anggota Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar Non kementerian pada Penyusunan RPP terkait swasembada garam dan perikanan dalam negeri e. FGD Strategi Hilirisasi dalam Mendukung Arah Pengembangan Ekosistem Semikonduktor Nasional f. FGD monitoring dan evaluasi Capaian Percepatan Program KBLBB g. FGD Strategi Hilirisasi Baterai Kendaraan Listrik Berbasis Nikel h. Rapat Koordinasi Kontribusi Industri Logam Bagi Pertumbuhan Ekonomi i. FGD Kemandirian Produksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Nasional berbasis Bahan Baku Lokal

C) Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2024, indikator Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan terealisasi sebesar 4,43%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2025 sebesar 5,3% telah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RPJMN 2025-2029, indikator ini ditargetkan sebesar 8,14% di tahun 2029. Hal ini menandakan, capaian

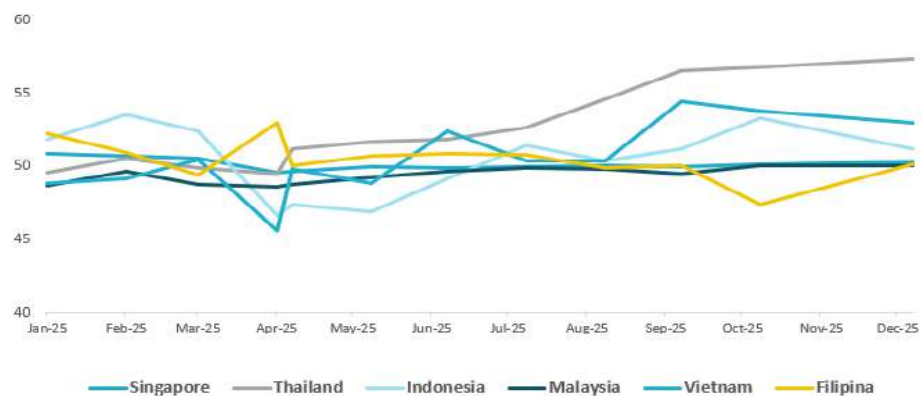
tahun 2025 telah mencapai 66,34% dari target RPJMN. Atas dasar capaian tahun 2025 yang menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, diproyeksikan target RPJMN di tahun 2029 dapat tercapai.

Meskipun demikian, capaian sebesar 5,3% pada tahun 2025 masih belum mencapai target sebesar 5,5%. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti tekanan eksternal, ketidakpastian regulasi, dan hambatan operasional. Secara global, industri tertekan oleh fluktuasi kurs dollar yang meningkatkan biaya impor bahan baku (terutama pada sektor farmasi dan pangan), kebijakan proteksionisme negara tujuan ekspor seperti tarif resiprokal dan standar lingkungan (EUDR/ESG), serta ketidakpastian ekonomi global yang mengakibatkan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI). Di sisi internal, beberapa faktor utama yang menghambat yaitu kendala pasokan energi, keterbatasan bahan baku akibat regulasi impor (seperti isu scrap baja dan karantina kayu), serta penurunan daya beli masyarakat yang memicu kontraksi pada subsektor alat angkutan dan tembakau. Kondisi ini diperparah oleh belum tercapainya target kapasitas hilirisasi mineral pada smelter tembaga dan timah, serta hambatan logistik musiman.

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional (Khusus IKU Stakeholder)

Melalui pendekatan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur, sepanjang tahun 2025 Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dibandingkan negara *peers* di ASEAN. Kontraksi tajam terjadi pada April 2025 hingga level terendah 46,7 jauh di bawah Thailand dan Malaysia yang relatif lebih stabil pada periode tersebut. Memasuki kuartal terakhir, Indonesia berada di posisi ketiga dan berhasil bangkit menutup tahun di zona ekspansi dengan PMI 51,2 pada Desember 2025,

meski masih tertinggal dari Thailand (57,4) dan Vietnam (53) yang memimpin pertumbuhan manufaktur kawasan dengan tren kenaikan lebih tinggi. Sedangkan, jika dibandingkan Filipina (50,2) dan Malaysia (50,1) yang cenderung stagnan, posisi Indonesia lebih unggul. Secara keseluruhan, performa manufaktur nasional masih perlu upaya lebih untuk menyaingi pertumbuhan agresif yang ditunjukkan Vietnam dan Thailand sepanjang tahun 2025.



Sumber: S&P Global PMI (2026)

Gambar 3.5 S&P Global ASEAN Manufacturing PMI Tahun 2025

E) Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas, beberapa program/ kebijakan/ isu yang melibatkan Deputi dan/atau K/L lain serta *stakeholders* terkait lainnya di antaranya yaitu:

- Penyusunan RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga seperti: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lain-lain dengan beberapa perkembangan diantaranya:

- Rapat Tindak Lanjut Implementasi Inpres 6 Tahun 2016 pada tanggal 15 Mei 2025.
 - Diskusi Farmasi dan Alat Kesehatan dengan Pelaku Usaha tanggal 16 Juli 2025
 - Rapat Update Informasi terkait Pengembangan Produk Farmasi, Biologi, Bioteknologi dan Pemanfaatan Kimiawi pada tanggal 21 Juli 2025
 - Rapat Penyiapan Bahan Evaluasi Penguatan Industri Farmasi serta Inisiasi Pembentukan Tim Monitoring Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pada tanggal 24 Juli 2025.
 - Rapat Koordinasi Peningkatan Daya Saing Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri pada tanggal 31 Juli 2025.
 - Rapat Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 27 Oktober 2025
 - Focus Group Discussion Supply Demand Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 24 November 2025.
- b. Penyusunan Kajian Ekosistem Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) bersama Prospera dengan melibatkan Tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dan sejumlah Kementerian/Lembaga seperti: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Riset dan Inovasi (BRIN), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), kemudian Asosiasi seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia

(API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) serta kalangan akademisi. Adapun progres kegiatan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Keputusan Deputy (RKepDep) Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata perihal Tim Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional.
- Pelaksanaan *Kick Off Collaboration* dan pendalaman kerangka pikir (TOR) terkait kajian ekosistem TPT tanggal 13 Maret 2025.
- Pendalaman *outline* kajian ekosistem TPT (Part I: Setting The Scene; Part IIA: Strategic Opportunities; Part IIB: Constraints; dan Part IIC: Policy Pathways) tanggal 16 April 2025.
- Diskusi Pengayaan draft naratif Part I dan diskusi temuan naratif Part II.A tanggal 16 Juni 2025.
- Diskusi draft naratif Part II.B dan brainstorming pelaksanaan kegiatan FGD dengan K/L dan Asosiasi tanggal 3 Juli 2025.
- Pelaksanaan FGD dengan Asosiasi, Pelaku Industri, dan Akademisi (Day 1) serta K/L (Day 2) di kantor Kemenko Perekonomian tanggal 17-18 Juli 2025.
- Diskusi pendalaman dengan WRI (World Resources Institute) Indonesia untuk isu Energi dan Bisnis Berkelanjutan tanggal 6 Agustus 2025.
- Laporan dan diskusi pendalaman temuan awal kajian kepada Level Eselon I Kemenko Perekonomian (Part II.C) tanggal 8 September 2025.

- Pelaksanaan FGD Policy Pathway dengan Asosiasi, Pelaku Industri, dan Akademisi (Day 1) serta K/L (Day 2) tanggal 8-9 Oktober 2025.
 - Diskusi Terfokus: Pembahasan Tata Niaga Impor Industri TPT tanggal 30 Oktober 2025.
 - Diskusi Terfokus: Kesiapan Industri TPT dalam Memanfaatkan Peluang I-EU CEPA tanggal 11 November 2025.
 - Laporan Final Kajian (Pra Diseminasi) kepada Eselon 1 Kemenko Perekonomian tanggal 21 November 2025.
 - Pelaksanaan Forum Kajian Strategis (FKS) Bedah Final Kajian “Arah Pengembangan Ekosistem TPT Nasional” tanggal 9 Desember 2025.
- c. Penyusunan RPerpres Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri. Adapun progres kegiatan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:
- Telah disusun dan ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 374 j.o. No. 380 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru yang bertugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru
 - Menyelenggarakan Kick-off Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada 21 Juli 2025 dalam rangka untuk mengumpulkan semua anggota Satgas

- Telah dilaksanakan rangkaian rapat penyusunan zero draft RPerpres bersama dengan anggota Satgas. Masukan dari berbagai K/L yang menjadi anggota Satgas juga diinput ke dalam draft Rperpres
 - Finalisasi zero draft RPerpres yakni Batang Tubuh dan Lampiran (Rencana Aksi)
 - Penyusunan Naskah urgensi sebagai dasar pengajuan izin prakarsa
 - Penyusunan Draft buku putih (dalam tahap finalisasi tim ahli semikonduktor dan teknologi baru)
 - Menyelenggarakan Rakornis tingkat eselon 1 pembahasan draft RPerpres pada Senin, 1 Desember 2025 di Grand Mercure Harmoni.
 - Menyelenggarakan Diskusi Pengembangan Industri Semikonduktor di Indonesia pada hari Sabtu, 6 Desember 2025 di ITB Techno Park Bandung.
 - Menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada hari Senin, 8 Desember 2025 di Hotel Luxton Bandung.
- d. Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun progres kegiatan yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:



- Telah melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Percepatan Program KBLBB, dimana pada 2025 adopsi KBLBB dan ekosistemnya telah tumbuh signifikan sejak Perpres 55/2019 diberlakukan, yang ditunjukkan oleh perkembangan penjualan, produksi, populasi, investasi industri manufaktur, dan infrastruktur pengisian daya.
- Telah melaksanakan koordinasi terkait skema insentif fiskal KBLBB, untuk tahun 2026 Kementerian Perindustrian telah menyusun usulan (keberlanjutan insentif 2025) namun masih menunggu arahan Menteri Perindustrian, sementara Kemenkeu dalam posisi mengkaji kemungkinan *refocusing*. Demikian juga Kemendagri merencanakan penyesuaian besaran insentif pajak daerah untuk KBLBB
- Diskusi bersama Hyundai dan kunjungan lapangan ke PT HLI Green Power sebagai salah satu produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia. PT HLI fokus memproduksi sel baterai NCM. Hyundai mengusulkan adanya perbedaan pemberian insentif berdasarkan teknologi baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik.
- Telah melakukan koordinasi terkait implementasi Permeninvestasi 6/2023 jo Permeninvestasi 1/2024. Sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan tersebut, salah satunya telah dilakukan peresmian fasilitas produksi PT VinFast Automobile Indonesia pada tanggal 15 Desember 2025 di Subang Jawa Barat.

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan Indikator 1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan selama tahun 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan. Kendala tersebut sebagai berikut:

- Industri non-migas menghadapi tekanan ganda dari sisi domestik maupun global. Penurunan daya beli masyarakat mendorong pelemahan permintaan, tercermin pada penurunan rata-rata Purchasing Managers' Index (PMI) dari tahun 2024 sebesar 51,1 ke 50,3 di tahun 2025.
- Rincian faktor Penghambat Peningkatan Nilai NTB Industri Pengolahan Non Migas diantaranya:
 - 1) Penurunan kapasitas industri tercermin pada tingkat utilisasi pengolahan non-migas pada periode Januari-Juli 2025 turun sebesar 8,17% (yoy).
 - 2) Adanya kontraksi sektoral pada beberapa sub sektor industri antara lain: industri kayu (-3,29%), karet dan plastik (-4,07%), tembakau (-1,37%) serta sektor alat angkutan (-2,64%) secara *year-on-year*.
 - 3) Hambatan Ekspor dan Proteksi Global diantaranya isu standar ESG, Regulasi Luar Negeri (EUDR, GMP, tarif resiprokal AS, dll), lainnya;
 - 4) Tantangan Struktural dan Kepastian Hukum (Implementasi Perka Badan Karantina No. 5/2025 terkait Hewan Ikan Dan Tumbuhan; PP 28 Tahun 2024 terkait pengaturan kemasan dan batas nikotin).
 - 5) Masih tingginya ekspor bahan baku industri dalam bentuk *raw material* sehingga utilisasi industri dalam

- negeri rendah (terutama kelapa, kakao, tepung tapioka)
- 6) Masih tingginya impor bahan baku pada rantai pasok industri Tekstil dan Produk Tekstil, khususnya di lini *midstream* (kain) sebesar 409,4 ribu ton sedangkan total ekspor sebesar 68,3 ribu ton.
 - 7) Isu ketidakpastian pasokan gas bumi sebagai bahan baku maupun energi yang berdampak pada inefisiensi produksi terutama pada Industri penerima HGBT seperti pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleochemical, dan sarung tangan karet.

G) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan peralatan sebaik mungkin. Sumber daya yang dimaksud seringkali terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dari segi anggaran. Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

Beberapa kegiatan koordinasi rapat masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom). Apabila rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di luar kantor, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat yang diasumsikan sebesar Rp1.750.000 (Rp175.000 x 10 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 10 orang untuk 1x rapat). Oleh karena itu,

pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota dan anggaran bisa digunakan untuk kegiatan penunjang lainnya.

Efisiensi penggunaan sumber daya sangat penting untuk meningkatkan kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi di Kedeputan Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata secara khusus di Keasdepan yang membidangi industri, dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, guna mengalokasikan sumber daya dengan lebih optimal dan mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di Kedeputan Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

H) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantaranya:

Optimalisasi koordinasi K/L untuk mendorong sektor dengan *growth negatif*, diantaranya pada aspek:

- 1) Substitusi & inovasi: Mendorong bahan baku lokal dan alternatif ramah lingkungan (bioplastik) untuk industri karet/plastik.
- 2) Penyesuaian regulasi : Deregulasi Perba Karantina 5/2025.
- 3) Harmonisasi IHT: Penyesuaian regulasi hasil tembakau yang berimbang (ekonomi-kesehatan) dan pemberantasan rokok ilegal.

- 4) Akselerasi produksi CKD/IKD otomotif melalui insentif fiskal berbasis TKDN

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- 1) Pemetaan isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas;
- 2) Pengumpulan data dan informasi industri pengolahan khususnya non-migas;

Triwulan II

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas;
- 2) Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan Industri pengolahan khususnya non-migas.

Triwulan III

- 1) Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan Industri pengolahan khususnya non-migas;
- 2) Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas.

Triwulan IV

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan industri pengolahan khususnya non-migas;
- 2) Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan industri pengolahan khususnya non-migas.



IKU 2.1 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional. Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih dibawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co- operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya

41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Sampai dengan Tahun 2025, IKU 1.2 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja yang terealisasi adalah sebesar 3,75%. Hingga akhir 2025, kinerja telah mencapai angka 113,63% dengan seluruh rencana aksi telah terlaksana dengan baik. Uraian di atas dijelaskan dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 2.1

Target	Realisasi	Kinerja
3,3%	3,75%*	113,63%

*) Data BPS diolah

Realisasi laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja sebesar 3,75% diperoleh dari hasil perhitungan dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut didapat dari formula capaian laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja yaitu:

$$LPPDBptk = \left(\frac{PDBptk_{2025} - PDBptk_{2024}}{PDBptk_{2024}} \right) \times 100\%$$

$$PDBptk = \frac{PDB}{PB}$$

$$LPPDBptk = \left(\frac{92.674.524 - 89.326.058}{89.326.058} \right) \times 100\%$$

$$LPPDBptk = 3,748\%$$

Keterangan:

- LPPDBptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)
- PDBptkt : PDB per tenaga kerja pada periode t (ribu rupiah)
- PDBptkt-1 : PDB per tenaga kerja pada periode t-1 (ribu rupiah)
- PDB : Produk domestik bruto harga konstan (ribu rupiah)
- PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, rangkuman pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 2.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, telah dilakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut: • Penetapan dan implementasi Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 diantaranya program pemagangan lulusan perguruan tinggi • Implementasi 5 (lima) program penyerapan tenaga kerja sebagai bagian dari Paket Ekonomi 2025 (8+4+5) • Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan • Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Pelindungan Pekerja Berbasis Platform Digital • Koordinasi penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan

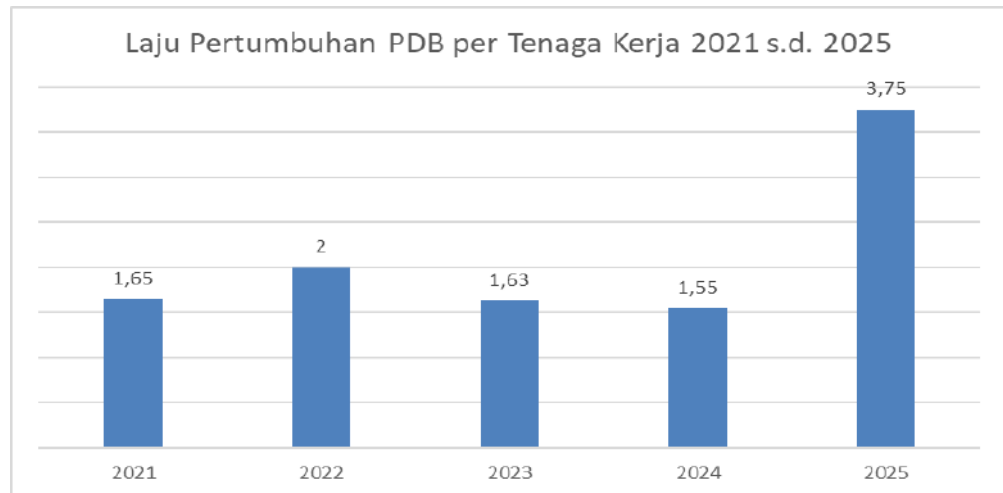
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) • Koordinasi Program Strategis Upskilling Welder dan Hospitality
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Terlaksana	Untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai berikut: • Monitoring capaian pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang disampaikan kepada Menko Perekonomian • Kunjungan monitoring Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi di PT Telkom, BNI, dan PT EMTEK Group • Evaluasi hasil capaian kinerja triwulan IV

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator 2.1 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mendukung Prioritas Nasional 4 (PN 4) dalam RPJMN 2025-2029 yang menargetkan penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Pada tahun 2025, indikator laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,75%, melampaui target RPJMN 2025 yang ditetapkan sebesar 3,30% dan capaian laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja tahun 2021 hingga 2024 yang hanya mencapai paling tinggi 2%

pada tahun 2022. Angka tersebut menandakan keberhasilan pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan ekosistem ketenagakerjaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan PDB per tenaga kerja.

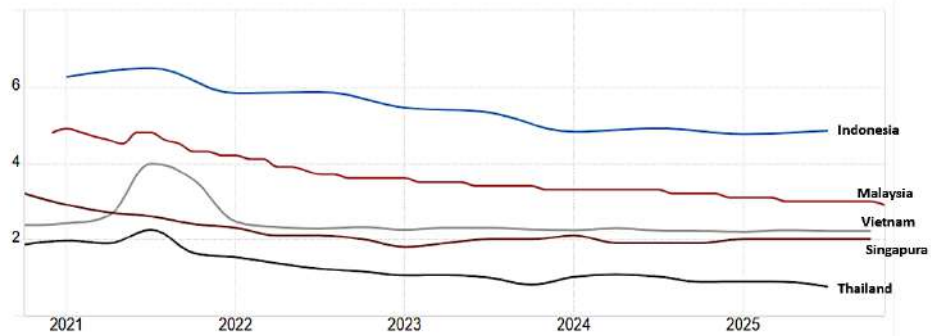


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Tahun 2021 s/d 2025

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Internasional

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dapat tercermin dari dinamika tingkat pengangguran terbuka, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran. Jika dibandingkan dengan negara lain penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan tingkat pengangguran terbuka di negara-negara lain di Kawasan ASEAN. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2025 masih diatas negara Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand.



Sumber: Trading Economics (2026)

Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Negara ASEAN 2021-2025

Ke depan, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Kemenko Perekonomian akan berupaya untuk meningkatkan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui (i) Koordinasi Kebijakan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing Tinggi; (ii) Koordinasi Penguatan Implementasi Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; (iii) Koordinasi Kebijakan dan Harmonisasi Program Pelatihan dan Pemagangan Berkualitas; (iv) Penguatan lembaga produktivitas nasional; (v) Penguatan tim koordinasi nasional vokasi; (vi) Penguatan sistem informasi pasar kerja; (vii) Koordinasi Penguatan Kerja Sama Internasional terkait Pengembangan SDM dan Produktivitas; (viii) Koordinasi Program PEnciptaan lapangan kerja, khususnya lapangan kerja formal, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Pekerja Rentan; (ix) Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK terkait UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan; (x) Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengupahan dan Penetapan Upah Minimum; dan (xi) Koordinasi Penguatan Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja.

E) Program Crosscutting dengan Kedeputan Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya (Khusus IKU Stakeholder)

Dalam rangka mencapai target pada Indikator 1.2 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, sejumlah program dilaksanakan dengan koordinasi bersama pemangku kepentingan lainnya, baik Deputi lain di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Pemangku kepentingan lainnya yang terlibat seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pariwisata, BPJS Ketenagakerjaan, dan mitra pembangunan (ILO, ADB, GIZ, dan lain0lain). Adapun beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

- Koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan
- Koordinasi penyusunan PP No. 6/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta evaluasi upah minimum 2025
- Koordinasi penyusunan dan pengesahan PP 36/2025 tentang Perubahan atas PP 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
- Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

- Program stimulus ekonomi, yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Koordinasi penyusunan PP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)
- Koordinasi pemberian diskon iuran JKK dan JKM untuk Ojek online, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik.
- Koordinasi Program Strategis Upskilling Welder dan Hospitality
- Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi serta Monitoring capaian pelaksanaan Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi
- Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terkait Pelindungan Pekerja Berbasis Platform Digital



Gambar 3.8 Peluncuran Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Jakarta, 20 Oktober 2025)

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Target pada Indikator 1.2 laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja dapat tercapai dengan sejumlah faktor pendukung keberhasilan seperti:

- **Pertumbuhan ekonomi** sebesar 5,11% (c-to-c) pada 2025 (BPS, 2026) menjadi faktor utama keberhasilan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menandakan kapasitas produksi yang meningkat sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% dapat menyerap sekitar 110.000 tenaga kerja (Center of Economic and Law Studies, 2025). Upaya yang dilakukan Deputy Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata meliputi koordinasi program paket stimulus I-IV di bidang ketenagakerjaan antara lain Bantuan Subsidi Upah, Diskon JKK bagi industri padat karya, perluasan manfaat JKP, program pemagangan lulusan perguruan tinggi, Bantuan Hari Raya bagi pengemudi online, dan diskon JKK dan JKM Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Selain itu, Upaya lain yang tengah dilakukan adalah penyiapan tenaga kerja welder dan hospitality sebanyak 500.000 orang yang diutamakan untuk penempatan luar negeri.
- **Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan** melalui regulasi ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang mendukung terciptanya perlindungan tenaga kerja dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata melaksanakan koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan, PP Nomor

50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU), dan PP 36/2025 tentang Perubahan atas PP 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.

- **Peningkatan daya beli pekerja/buruh.** Rata-rata upah buruh dari Agustus 2024 ke Agustus 2025 tumbuh 1,94 persen dari 3,27 juta rupiah menjadi 3,33 juta rupiah. Pertumbuhan upah akan mendorong konsumsi masyarakat dan permintaan barang serta jasa. Peningkatan permintaan ini mendorong perusahaan menaikkan produksi dan investasi, yang pada akhirnya tercermin dalam kenaikan PDB. Salah satu upaya yang mendorong peningkatan daya beli pekerja/buruh adalah regulasi upah minimum dimana Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berperan dalam koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan dan penyusunan kebijakan pemberian Bantuan Hari Raya bagi pengemudi online.
- **Menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.** Keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran bergerak ke arah tujuan pembangunan yang sama sehingga mempercepat pencapaian target. Upaya yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata seperti melaksanakan Rapat Kerja Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan

Periode 2025-2029 di Jawa Barat, Koordinasi peningkatan angkatan kerja perempuan di Bali serta Koordinasi Penyelarasan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dengan K/L terkait.

Selain keberhasilan tersebut, pelaksanaan program/kegiatan terkait Indikator 1.2 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja juga menghadapi kendala. Kendala tersebut sebagai berikut:

- **Stagnasi produktivitas nasional** yang disebabkan oleh dominasi angkatan kerja di sektor informal dengan nilai tambah rendah serta adanya kesenjangan kompetensi (skills mismatch).
- **Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).** Selama periode Januari s.d. Desember 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja yang mengalami PHK (Satu Data Kemnaker, 2025). Kondisi ini menjadi pertanda terjadinya perlambatan pada sektor-sektor produktif. Kejadian ini didominasi oleh sektor manufaktur di wilayah sentra industri seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah, yang mengakibatkan terjadinya pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dengan nilai tambah rendah.
- **Peningkatan proporsi lapangan kerja formal cukup stagnan** dimana pada 2025 proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal pada 2025 sebesar 42,2% atau naik 0,15% dibanding 2024. Kenaikan ini terbilang kecil dibandingkan kenaikan tahun 2024 yang mencapai 1,16%.

G) Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan peralatan sebaik mungkin. Sumber daya yang dimaksud seringkali terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dari segi anggaran. Beberapa efisiensi yang telah dilakukan, antara lain:

- Beberapa kegiatan koordinasi rapat masih tetap dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Apabila rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di luar kantor, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat yang diasumsikan sebesar Rp1.700.000 (Rp170.000 x 10 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 10 orang untuk 1x rapat). Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring/luring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota dan anggaran bisa digunakan untuk kegiatan penunjang lainnya. Beberapa contoh rapat yang dilaksanakan secara daring adalah Roundtable Meeting Capaian dan Tindak Lanjut Perpres 130/2024.
- Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor. Sebagai contoh Rapat Teknis Program penyediaan Platform dan Training Gig Economy dan

Rapat Tindak Lanjut Hasil Audiensi Sesmenko Perekonomian dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dilaksanakan di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian. Efisiensi yang didapatkan dari penggunaan fasilitas ruang rapat kantor dan/atau Zoom Meeting untuk rapat-rapat ini diperkirakan sebesar Rp 20.010.000 (667.000 x 30 orang) per rapat jika rapat dilaksanakan di hotel.

H) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. Optimalisasi koordinasi lintas K/L dalam penetapan kebijakan khususnya di bidang ketenagakerjaan
2. Implementasi 4 paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli, dan penyerapan tenaga kerja.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Triwulan II

- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Triwulan III

- Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Triwulan IV

- Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja

IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing

Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi merupakan sasaran strategis yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan-kawasan unggulan yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Dalam konteks ini, penguatan daya saing dilaksanakan melalui integrasi sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kawasan industri yang terintegrasi dengan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan masyarakat lokal, sementara sektor pariwisata yang berkembang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Indikator ini mengukur besarnya jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas (KSEP) yang telah dinyatakan lengkap dalam perencanaan dan siap untuk diimplementasikan. KSEP yang dimaksud merupakan kawasan yang telah difasilitasi percepatan pembangunannya melalui koordinasi lintas sektor oleh Kementerian Koordinator, serta telah memperoleh dukungan regulatif dan kebijakan dari instansi terkait. Hal ini penting agar setiap KSEP dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

KSE yang menjadi target mencakup Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan/atau Kawasan Pengembangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (KPBPB) yang diprioritaskan atau dipilih berdasarkan daftar KSE yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, fokus pada KSE tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4 Kawasan KSEP. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025, ditetapkan sebesar 4 KSEP. Pengukuran realisasi kinerja IKU Jumlah KSEP yang Berdaya Saing dilakukan berdasarkan jumlah realisasi Kawasan Strategis Ekonomi yang terdiri dari 4 (empat) Kawasan Strategis Prioritas. Kriteria KSE yang berdaya saing memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Realisasi Investasi yang Berkelanjutan: Kawasan telah menunjukkan adanya investasi yang berkelanjutan, di mana pengembangan kawasan dilakukan secara konsisten melalui realisasi investasi yang kontinu dalam proses pembangunannya.

- 2) Ketersediaan Aksesibilitas Eksternal: Kawasan memiliki akses yang memadai dari luar, termasuk ketersediaan jalan akses menuju kawasan serta keterhubungan dengan pelabuhan atau bandara sebagai bagian dari sistem logistik yang mendukung.
- 3) Keberadaan Badan Pengelola atau Investor: Terdapat badan pengelola kawasan atau pihak investor yang aktif berperan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.
- 4) Status Operasional dan Kesiapan Pembangunan: Kawasan telah siap beroperasi dan mendukung kegiatan pembangunan, yang ditunjukkan dengan kesiapan dalam menerima tenant serta telah terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di dalam kawasan.

Adapun pencapaian pada Tahun 2025, jumlah KSEP yang Berdaya Saing yang telah terealisasi mencapai 5 KSEP, yang setara dengan 120% dari target 4 KSEP, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi*)	% Kinerja
Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	KSEP	4 dari 4 KSEP	5 dari 4 KSEP	120%

Penyelesaian target KSEP yang berdaya saing yang dicapai dalam target tahun 2025 ini merupakan akumulasi dari berbagai KSEP yang telah memenuhi kriteria dan beroperasi secara efektif. Penyelesaian progres pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas yang dicapai dalam target tahun 2025 adalah progres pengembangan kawasan strategis

ekonomi prioritas terkait penyelesaian pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Ekonomi Khusus JIPE Gresik, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dan Kawasan Industri Konawe yang sudah dalam tahap penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang efektif. Selain itu, capaian lainnya berhasil didorong untuk peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Batang dengan nilai investasi sebesar Rp 23 Triliun, total penyerapan tenaga kerja sebesar 16.808 orang dan total tenant industri sebanyak 39 tenant.

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 4 KSEP dengan K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Laporan Perkembangan KEK di Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) pada tanggal 17 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dukungan Kementerian/Lembaga di KEK pada 21 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Permohonan PKKPR di Kawasan KI IHIP pada tanggal 14 Maret 2025
2	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Keanggotaan Dewan Nasional KEK pada tanggal 8 Januari 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	pembangunan di 4 KSEP		- Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Kawasan Industri ASPIRE Stargate oleh PT Stargate Mineral Asia di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Januari 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tanggal 13 Februari 2025 - Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Lanjutan Persiapan Kunjungan Bapak Presiden RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tanggal 18 Maret 2025
3	Rapat koordinasi teknis terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 2 KSEP serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Kunjungan atas Tindak Lanjut MOU PT KITB dengan CSCEC pada 17 April 2025 - Telah dilaksanakan Pertemuan terkait Rancangan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur dan Pembiayaan Iklim yang Baru pada 28 April 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Perluasan KEK Gresik pada 7 Mei 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Konsep Memorandum of Understanding on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and



No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Supply Chains antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 8 Mei 2025 • Telah dilaksanakan KIAT Technical Committee Meeting untuk Infrastructure Funding and Financing Activity Stream pada 20 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Acara Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2025 pada 3 Juni 2025
4	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 2 KSEP.	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Permasalahan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Industri pada 25 April 2025 • Telah dilaksanakan Kegiatan FGD Pedoman KEK Hijau pada 8 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada 9 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR pada 14 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pembuktian Alas Hak dalam rangka Kawasan Hutan pada 15 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Ekspose Persiapan Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada 2 Juni 2025 • Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RAPERMEN PNB

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Pelepasan Kawasan Hutan pada 5 Juni 2025 Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 17 Juni 2025
5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan di 2 KSEP	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pada 22 April, 8 Mei dan 3 Juni 2025 - Telah dilaksanakan Evaluasi Kawasan Industri RPJMN 2025-2029 dan PSN dalam RKP 2026 pada 23 Juni 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KEK Pariwisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025 pada 25 Juni 2025
6	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di KSEP serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan	Terlaksana	- Telah Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025
7	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan PSN pada 21 Juli 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	progress percepatan pembangunan di KSEP		- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan PSN Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada 12 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 12 September 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 September 2025
8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Monitoring PSN Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	pengembangan KSEP		- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring PSN Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PSN Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi PSN Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring PSN Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025
9	Rapat koordinasi terkait penyelesaian penyediaan infrastruktur di 4 KSEP	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kawasan Industri Terpadu Batang pada tanggal 8 Oktober 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui KITB pada tanggal 6 November 2025 - Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui KITB pada tanggal 13-14 November 2025 - Telah dilaksanakan <i>FGD Series 2</i> dalam Rangka Persiapan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Percepatan Investasi melalui KITB pada tanggal 3 Desember 2025
10	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait penyelesaian percepatan pembangunan di 4 KSEP	Terlaksana	Telah dilaksanakan Audiensi terkait KITB pada tanggal 24 Oktober 2025

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

IKU Jumlah KSEP yang berdaya saing ini merupakan suatu IKU baru di unit kerja, sehingga masih belum terdapat perbandingan yang jelas dengan pelaksanaan IKU sebelumnya yang mungkin telah ada. Meskipun demikian, untuk pelaksanaan renaksi pada IKU tersebut, kami berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya yang dilakukan oleh semua pihak terkait dalam mencapai tujuan bersama. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hal KSE yang ditargetkan, jika belum memenuhi empat kriteria yang ditentukan, maka kawasan tersebut belum dapat dinyatakan telah mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus sangat diperlukan agar semua kawasan dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Infrastruktur memiliki peran fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut *World Bank* (2022), pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Infrastruktur yang baik juga memperlancar arus barang, jasa, dan manusia, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing nasional.

Tabel 3.12 Perbandingan Kualitas Infrastruktur dan IPM beberapa negara ASEAN

Negara	Kualitas Infrastruktur (1-100)	Akses Listrik (%)	LPI Score (maks = 5)	Indeks Pembangunan Manusia
Singapura	95	100	4,10	0,946
Malaysia	80	100	3,55	0,819
Thailand	75	100	3,42	0,798
Vietnam	65	100	3,27	0,766
Indonesia	55	97	3,15	0,728
Filipina	52	96	2,90	0,720

Sumber: World Bank (2022), Global Competitiveness Report (WEF, 2018); UNDP (2025)

Catatan:

LPI= Logistics Performance Index adalah indeks gabungan dari indikator: kinerja bea cukai, kualitas infrastruktur, kemudahan pengaturan pengiriman, kualitas dan kompetensi layanan logistik, pelacakan dan penelusuran kiriman, dan ketepatan waktu pengiriman.

IPM adalah indeks gabungan dari angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan.

Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kualitas dan pemerataan infrastruktur jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut World Bank (2022), kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ketertinggalan ini tercermin dari skor *Logistics Performance Index (LPI)* dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih rendah, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Vietnam menjadi contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan. Menurut Malesky dan Taussig (2017), sejak awal 1990-an Vietnam memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan energi sebagai prasyarat utama untuk menarik investasi asing dan transfer teknologi. Peningkatan akses jalan, listrik, dan internet hingga wilayah pedesaan

terbukti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis.

Menurut *World Bank* (2025), tingkat kemiskinan Vietnam turun dari 57,5 persen pada tahun 1992 menjadi sekitar 1,6 persen pada tahun 2022. Keberhasilan ini juga tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita Vietnam yang pada tahun 2024 telah menyamai Indonesia, meskipun pada tahun 1990 pendapatan per kapita Indonesia tercatat sekitar 2,5 kali lebih tinggi.

Vietnam juga mengembangkan KEK sebagai instrumen untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan wilayah. Menurut Tran (2020), KEK seperti Chu Lai dan Dung Quat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor, menarik investasi asing, dan mempercepat pembangunan industri daerah. KEK tersebut didukung oleh insentif fiskal, kemudahan perizinan, kualitas infrastruktur yang baik, serta fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan.

Selain itu, Vietnam menerapkan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur melalui Undang-Undang *Public Investment*. Menurut *Government of Vietnam* (2019), kebijakan ini mengklasifikasikan proyek berdasarkan tingkat kepentingannya dan memberikan dukungan fiskal serta penyederhanaan prosedur. Kebijakan turunan dalam bentuk regulasi teknis, seperti Decree No. 85/2025/ND-CP, memberikan kemudahan proses persetujuan, digitalisasi administrasi, dan pelimpahan kewenangan ke daerah, sehingga proyek strategis nasional dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif.

E) Program Crosscutting dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya

Dalam rangka mencapai target pada Indikator 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing, sejumlah program dilaksanakan dengan kolaborasi pemangku kepentingan lainnya, baik Deputi lain di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Pemangku kepentingan lainnya yang terlibat seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara, *World Bank*, *Asian Development Bank*, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *UK Pact*, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. Adapun beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

- 1) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Laporan Perkembangan KEK di Kawasan BBK pada tanggal 17 Januari 2025
- 2) Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi dalam rangka Penerbitan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional Kawasan Industri ASPIRE Stargate oleh PT Stargate Mineral Asia di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Januari 2025



- 3) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Alternatif Skema Pembiayaan Monumen Reog dan Museum Peradaban oleh Kemenkeu pada 22 Januari 2025
- 4) Telah dilaksanakan Audiensi BP Bintang dan Pemkab Bintang terkait Penyusunan Rencana Rinci BBK pada tanggal 26 Februari 2025
- 5) Telah dilaksanakan Audiensi terkait Kawasan Industri IKIP pada tanggal 3 Maret 2025
- 6) Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan LVC dan DPL dengan World Bank pada tanggal 14 Maret 2025
- 7) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Permohonan PKKPR di Kawasan KI IHIP pada tanggal 14 Maret 2025
- 8) Telah dilaksanakan Audiensi dengan BP Tanjung Minang pada 20 Maret 2025
- 9) Telah dilaksanakan Workshop Dashboard JUTPI-3 dengan DITM Kemenhub pada tanggal 12 Juni 2025
- 10) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan Kawasan Industri di Batam pada 10 Juli 2025
- 11) Telah dilaksanakan Rapat pembahasan PSN Kawasan Industri (KI) Fakfak pada tanggal 31 Juli 2025
- 12) Telah dilaksanakan Pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) Pulau Obi di Maluku Utara pada tanggal 1 Agustus 2025
- 13) Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
- 14) Telah dilaksanakan Audiensi dengan KI Kuala Tanjung pada tanggal 8 Oktober 2025

- 15) Telah dilaksanakan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) dan PT Pindad pada tanggal 4 Desember 2025.

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan target kinerja disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan kawasan strategis ekonomi prioritas sangatlah krusial. Rapat ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dapat dibahas secara komprehensif. Kedua, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelesaian isu-isu dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan juga merupakan elemen kunci. Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, diharapkan permasalahan dapat diidentifikasi dengan cepat, sehingga solusi yang tepat dapat diterapkan segera.

Namun, terdapat sejumlah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala-kendala ini terletak pada percepatan pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha, yang disebabkan oleh perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Kehutanan. Perubahan ini sangat berpengaruh, terutama dalam hal pelepasan kawasan hutan yang sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang kompleks. Hal ini tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga dapat menunda berbagai proyek yang disebabkan oleh efisiensi anggaran yang berdampak pada dukungan dana bagi pengembangan kawasan ekonomi.

G) Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Dalam pengelolaan anggaran juga melakukan upaya efisiensi anggaran sehingga dapat dilakukan lebih banyak koordinasi diantaranya adalah belanja sewa peralatan kantor dan belanja keperluan perkantoran yaitu untuk aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan kawasan strategis ekonomi. Kedua jenis belanja ini dirasa sangat menunjang kinerja. Dengan keterbatasan anggaran namun beban tugas yang tidak berkurang, serta waktu penyelesaian yang telah ditentukan, dengan adanya kedua belanja tersebut membuat beberapa kegiatan koordinasi dapat dilakukan bersamaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu (tidak perlu melakukan pindah lokasi, hemat waktu dan biaya transportasi atau perjalanan dinas). Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor dan lainnya sehingga menghemat anggaran sebesar Rp5.496.133.

Pelatihan internasional pun dapat dijangkau dengan *teleconference* sehingga sangat efisien dalam hal waktu dan biaya. Efisiensi ini juga memberikan keuntungan bagi seluruh pegawai dalam hal kesempatan mendapatkan pelatihan, baik nasional maupun internasional. Selain itu, Deputi V juga melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan yang mana pembebanan anggaran dilakukan dengan *sharing*, sehingga terciptanya efisiensi anggaran.

H) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

- Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing pada tahun 2025 adalah terselesaikannya 3 rekomendasi kebijakan, terdiri atas 1 Rekomendasi kebijakan terkait Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPB, KSPN). Pencapaian keberhasilan tersebut salah satunya dengan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan KSEP diwujudkan dengan penyusunan regulasi rekomendasi kebijakan yang mendukung peraturan terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan penyusunan peraturan terkait KIT Batang.

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 6 KSEP dengan K/L terkait serta mengeksplorasi skema pembiayaan atau insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan
- Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 6 KSEP

Triwulan II

- Rapat koordinasi teknis terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 3 KSEP serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan
- Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 3 KSEP
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan di 3 KSEP

Triwulan III

- Rapat koordinasi teknis terkait percepatan penyediaan infrastruktur di 3 KSEP lainnya serta mengeksplorasi skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan
- Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di 3 KSEP lainnya
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan di 3 KSEP lainnya

Triwulan IV

- Rapat koordinasi terkait penyelesaian penyediaan infrastruktur di 6 KSEP
- Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait penyelesaian percepatan pembangunan di 6 KSEP

IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

Indikator Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang Siap Beroperasi mencerminkan capaian implementasi pembangunan infrastruktur nasional yang strategis sesuai target tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN. Setiap proyek PSN harus tercantum dalam daftar proyek prioritas nasional dan pelaksanaannya dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama kementerian/lembaga teknis

terkait. Proyek-proyek ini berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Kriteria Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dinyatakan Telah Selesai adalah sebagai Berikut:

- 1) Sektor Kawasan (contohnya Kawasan Industri):
Proyek dinyatakan selesai apabila telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang berlaku secara efektif.
- 2) Sektor Transportasi, Energi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sanitasi:
Proyek dianggap selesai ketika telah memasuki tahap operasional atau mulai beroperasi secara fungsional.
- 3) Sektor Bendungan:
Proyek dikategorikan selesai saat dimulainya proses pengisian awal bendungan (impounding), setelah seluruh konstruksi bendungan dinyatakan tuntas.

Pencapaian terbangunnya PSN melibatkan koordinasi antara Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, serta masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan kelancaran implementasi dan pencapaian output proyek sesuai jadwal. Berdasarkan Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta pembaruan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024, daftar PSN terbaru mencakup 228 proyek dan 16 program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 83% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Formula pengukuran target penyelesaian Proyek Strategis Nasional

(PSN) di Tahun 2025 dihitung dengan membandingkan jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dengan jumlah total proyek yang ditargetkan selesai pada tahun tersebut. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan persentase capaian triwulanan atau tahunan

Cara pengukuran target penyelesaian PSN di tahun 2025:

- 1) Identifikasi PSN yang masuk ke dalam Major Project RPJMN;
- 2) Menentukan target jumlah PSN di tahun 2025 sebanyak 12 proyek

Formula perhitungannya =

$$\text{Persentase Penyelesaian PSN} = \frac{\sum \text{proyek selesai}}{\sum \text{target proyek selesai}} + 100\%$$

Adapun pencapaian pada Tahun 2025, persentase penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terealisasi sebesar 65% atau mencapai 78.31% dari target tahun 2025 sebesar 83% dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Persentase	83%	65%	78,31%

Persentase penyelesaian PSN didapatkan dari penyelesaian pembangunan 6 dari 12 proyek pada Tahun 2025. Pembangunan 6 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 63,705 Triliun. Pencapaian kinerja pada Tahun 2025 belum sesuai dengan target dikarenakan beberapa PSN masih dalam tahap konstruksi dan beroperasi sebagian.

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 3.2

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Percepatan Penambahan Pengadaan Tanah Proyek PSN Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada tanggal 13 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Usulan Realokasi Lintas Sektor Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Usulan Alokasi Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Tahun 2026 pada tanggal 30 Januari 2025.
2.	Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJKP terkait kepastian penyelesaian PSN	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan PSN Sektor Kawasan pada tanggal 9 Januari 2025 dan 16 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, dan Tanggul Laut) Tahun 2025 pada tanggal 15 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi dan Teknologi pada tanggal 16 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor



No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Transportasi pada tanggal 21 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Sektor Jalan Tol pada 22 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Air Minum, Air Baku dan Sanitasi Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup PSN sektor Bina Marga di Kawasan Perbatasan dan IKN pada tanggal 7 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Ketapang pada tanggal 12 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (KI IGIP) pada tanggal 13 Februari 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada tanggal 17 Maret 2025.
3.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan World Bank terkait Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025
4.	Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Dukungan World Bank terkait

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	terkait skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)		Implementasi P3NK pada tanggal 13 Januari 2025
5.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Terlaksana	Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil revisi Peraturan Menteri Koordinator terkait daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
6.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden	Terlaksana	Laporan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Semester II Tahun 2024 kepada Presiden.
7.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan siaran Pers melalui website ekon.go.id terkait evaluasi periodik capaian PSN, termasuk Tropical Coastland di Banten oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 22 Januari 2025.
8.	Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN Kawasan Industri Indonesia Huall Indonesia Park (KI IHIP) pada tanggal 20 Maret 2025
9.	Pengusulan PSN baru	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 24 Februari 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Pengusulan Program Sektor Perumahan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tanggal 4 Maret 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
10.	Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Realokasi Anggaran Pengadaan Tanah Melalui LMAN sektor Jalan Tol pada tanggal 11 April 2025
11.	Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPk terkait kepastian penyelesaian PSN	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN KI Indonesia Hualih Industry Park terkait pembahasan Debottlenecking Pembangunan KI IHIP pada tanggal 24 April 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PSN Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada tanggal 30 April 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan Pengesahan Hasil Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Aceh pada tanggal 4 Juni 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Indikasi Tumpang Tindih Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Juni 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyepakatan Deliniasi Kawasan PSN pada tanggal 13 Juni 2025. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Pelepasan Kawasan Hutan pada PSN Industri Pengolahan Bauksit PT DSM pada tanggal 26 Juni 2025.
12.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Diskusi HPT dengan PT PII pada tanggal 5 Mei 2025 • Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Pipeline HPT pada tanggal 16 Mei 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)		
13.	Rapat Koordinasi untuk penyusunan regulasi turunan terkait skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden pada tanggal 5 Mei 2025 - Telah dilaksanakan Kick off Meeting Permenko P3NK pada tanggal 2 Juni 2025
14.	Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN	Terlaksana	Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah saat ini masih berada dalam tahap persiapan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hasil revisi Peraturan Menteri Koordinator terkait daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
15.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Telah dilaksanakan siaran Pers melalui website ekon.go.id terkait evaluasi periodik capaian PSN, termasuk KIT Batang sebagai Bagian Proyek Two Countries Twin Parks (TCTP) pada tanggal 27 Mei 2025.
16.	Rapat koordinasi terkait percepatan penyediaan infrastruktur di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas serta mengeksplorasi skema	Terlaksana	- Telah Rapat Pembahasan Publikasi dan Pengelolaan Dasbor Hasil JUTPI3 2025 di Wilayah Jabodetabek pada 23 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
	pembiayaan yang dapat dimanfaatkan		- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Isu Working Group Batam Bintan Karimun pada 31 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025
17.	Rapat koordinasi dengan K/L dan Pemda terkait progress percepatan pembangunan di Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Status dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 21 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Subang Smartpolitan pada 23 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu pada 12 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri (KI) Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 12 September 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Lahan Kawasan Industri PSN pada Perpres Nomor 87 Tahun 2021 di Kabupaten Indramayu pada tanggal 3 September 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			- Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau_29 September 2025
18.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Pembangunan Smelter pada Kamis, 24 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi - Proyek Pembangunan Jaringan Gas Kota pada 29 Juli 2025 - Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Informasi Proyek Strategis Nasional Sektor Bendungan dan Irigasi pada 1 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit pada 7 Agustus 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program PSN Pengembangan Jalan Perbatasan pada 10 September 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
19.	Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui P3NK pada tanggal 2 Okt 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rencana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 17 Des 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK pada tanggal 19 Des 2025.
20.	Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) pada tanggal 23 Okt 2025 - Telah dilaksanakan Seminar Rencana Implementasi Kelembagaan P3NK pada tanggal 25 Nov 2025.
21.	Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat (PDSK) Untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa pada tanggal 9 Des 2025.

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa pada tanggal 12 Des 2025.
22.	Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat	Terlaksana	Sosialisasi melalui media digital https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/143000021/ini-daftar-lengkap-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029.

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024, capaian kinerja untuk IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai 100% (41 dari 41 proyek), berdasarkan hasil pelaksanaan unit kerja sebelumnya, yaitu Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tahun tersebut, penyelesaian PSN (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ditargetkan sebesar 100%, atau seluruh 41 proyek yang direncanakan selesai pada tahun 2024 dapat direalisasikan sesuai target.

Adapun inisiatif strategis yang ditempuh untuk mencapai target tersebut meliputi:

- 1) Percepatan penyelesaian PSN yang ditargetkan selesai pada tahun 2024; dan
- 2) Kebijakan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur serta pengembangan wilayah.

Pada periode tersebut, kinerja pembangunan PSN yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang melalui KPPIP berhasil mendorong sejumlah PSN untuk bertransisi dari tahap penyiapan menuju tahap transaksi maupun konstruksi. Hal ini selaras dengan rencana aksi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, khususnya terkait IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

Seiring dengan penataan organisasi dan pembentukan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, pengampuan IKU terkait PSN tersebut beralih ke unit organisasi yang baru. Dengan demikian, meskipun secara substansi indikator memiliki kesinambungan kebijakan, secara kelembagaan terjadi pergeseran pengampu IKU dari unit sebelumnya kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang baru dibentuk.

Untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2025, capaian terealisasi sebesar 78,31% (6 dari 12 proyek), belum memenuhi target sebesar 83%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa PSN yang masih berada pada tahap konstruksi dan beroperasi secara parsial sehingga belum dapat dikategorikan selesai secara penuh.

Selain itu, terdapat perbedaan formula penghitungan antara tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, pengukuran didasarkan pada persentase total penyelesaian pembangunan PSN dari keseluruhan proyek yang ditargetkan selesai. Sementara pada tahun 2025, tingkat capaian dihitung berdasarkan proses bisnis dari 12 PSN yang menjadi ruang lingkup pengukuran, sehingga pendekatan evaluasinya lebih berbasis tahapan dan status perkembangan proyek. Perbedaan metodologi ini turut mempengaruhi hasil

pengukuran capaian dan perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis komparatif antarperiode.

Berikut adalah 12 PSN yang dijadikan target dan realisasi capaiannya di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Daftar Proyek Strategis Nasional

No	Proyek Strategis Nasional	Sektor
1	SPAM Benteng Kobema	Air Bersih dan Sanitasi
2	SPAM Wasusokas	Air Bersih dan Sanitasi
3	Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi
4	Jalan Tol Sigli – Banda Aceh	Jalan dan Jembatan
5	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan
6	KI Kuala Tanjung	Kawasan
7	KI Bantaeng	Kawasan
8	KI Tanah Kuning	Kawasan
9	KI Alumina Toba	Kawasan
10	KI Wiraraja Green Renewable Energy	Kawasan
11	KI Toapaya, Pulau Poto, Kampung Masiran	Kawasan
12	KI Pulau Penebang	Kawasan

Jika dilihat dari persentase tingkat capaian penyelesaian PSN melalui progres pembangunan telah terealisasi sebesar 85.83% dengan capaian kinerja sebesar 120% yang didapatkan dari persentase jumlah PSN yang telah selesai dibandingkan dengan jumlah PSN yang ditargetkan selesai pada Tahun 2025. Persentase penyelesaian PSN pada Tahun 2025 didapatkan dari penyelesaian pembangunan 6 dari 12 proyek pada Tahun 2025. Pembangunan 6 dari 12 proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 63,705 Triliun. Adapun 6 PSN yang telah didorong

penyelesaiannya oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata hingga Triwulan IV tahun 2025 antara lain:

Tabel 3.16 Nilai Investasi PSN penyelesaian oleh Deputy V

No	Nama Proyek	Sektor	Nilai Investasi
1	Kawasan Industri Penebang	Kawasan	Rp 49,21 Triliun
2	Kawasan Industri Tanah Kuning	Kawasan	Rp 4,015 Triliun
3	Pelabuhan Benoa	Pelabuhan	Rp 6,06 Triliun
4	Bendungan Meninting	Bendungan dan Irigasi	Rp 1,8 Triliun
5	SPAM Wasusokas	Air Bersih dan Sanitasi	Rp 1,23 Triliun
6	Kawasan Industri Alumina Toba	Kawasan	Rp 1,39 Triliun

Pencapaian kinerja Tahun 2025 berjalan dengan baik sehingga adapun capaian terkait capaian pembangunan Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
- 2) Koordinasi terkait alokasi anggaran dan penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN bersama LMAN.
- 3) Koordinasi evaluasi PSN eksisting dan usulan PSN Baru.
- 4) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN.
- 5) Sosialisasi capaian PSN melalui Media Nasional kepada masyarakat.

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

a) Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam 9 tahun terakhir dengan pembangunan merata di seluruh pulau di Indonesia, sesuai dengan tema Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai Indonesia Centris. Total ada 242 proyek yang telah diselesaikan, yang mencakup berbagai sektor dan wilayah.



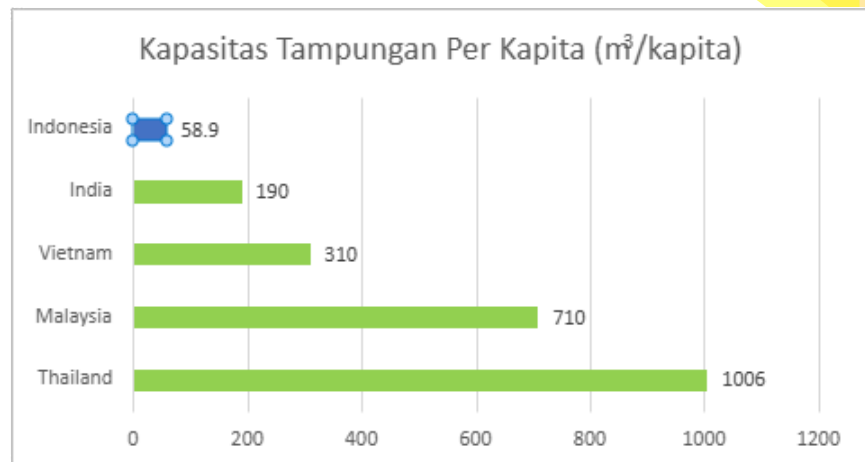
Gambar 3.9 Capaian Proyek Strategis Nasional

- Infrastruktur Penunjang Konektivitas:
 - Terdapat 14 pelabuhan laut baru yang memperlancar arus perdagangan dan transportasi di seluruh Indonesia.
 - Dibangun 20 bandar udara baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
 - Pembangunan 12 proyek kereta api yang memperkuat jaringan transportasi darat.

- Pembangunan 3.111-kilometer jalan tol baru yang memudahkan perjalanan antar daerah, mempercepat akses ekonomi, dan meningkatkan konektivitas antarkota.
- Infrastruktur Ketahanan Energi:
 - Terbangunnya 24 gigawatt pembangkit listrik baru di seluruh Indonesia yang meningkatkan kapasitas energi nasional.
 - Meningkatkan potensi produksi gas bumi sebesar 23,3 juta ton per tahun atau 3,8 miliar kaki kubik per hari, yang penting untuk ketahanan energi nasional.

- Infrastruktur Kedaulatan Pangan dan Mitigasi Bencana:

Berdasarkan hasil studi World Bank "Indonesia Vision 2045, Toward Water Security" tahun 2021 dan Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR tahun 2021, diketahui bahwa kapasitas penyimpanan air Indonesia baru mencapai 58,5 m³/kapita, berada jauh di bawah negara-negara dengan variabilitas musim yang serupa, seperti negara tetangga Malaysia (710 m³/kapita) dan Thailand (1.006 m³/kapita). Pasokan air yang kurang dan tidak memadai kepada masyarakat dapat mengurangi PDB sebesar 2,5% pada tahun 2045. Pada akhir tahun 2025 peningkatan kapasitas tampungan air per kapita meningkat menjadi sebesar 58,99 m³ /kapita.



Gambar 3.10 Perbandingan Kapasitas Tampungan Air Per Kapita Tahun 2025 (m³/kapita)

Hingga tahun 2025, terdapat 51 bendungan yang telah dibangun untuk mengamankan suplai air bagi pertanian dan kebutuhan air domestik.

- Infrastruktur Hilirisasi Industri dan Pengembangan Investasi:
 - Terbentuknya 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 22 kawasan industri strategis yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
 - Pembangunan 8 smelter untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral, mendukung hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri.

PSN merupakan katalisator dalam perekonomian melalui dampaknya secara tidak langsung melalui peningkatan akses sarana dan prasarana dalam infrastruktur. Pembangunan PSN dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian dari investasi PSN pada level nasional dan provinsi untuk masing-masing sektor. Per Desember 2023, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

(FEB UI) melakukan analisis terhadap dampak ekonomi dan ketenagakerjaan dari 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan menghasilkan total output ekonomi sebesar Rp3.344 triliun dengan realisasi investasi sebesar Rp2.101 Triliun. Selain itu, PSN juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, menyediakan peluang kerja bagi 2,71 juta orang, termasuk pekerjaan langsung dalam proyek-proyek tersebut serta pekerjaan tidak langsung di berbagai sektor.

PSN dapat memberikan dampak bagi penerimaan pajak pusat dengan signifikan. Berdasarkan kajian LPEM UI 2023, investasi PSN menghasilkan penerimaan pajak bagi pusat dan daerah. Realisasi investasi PSN menghasilkan potensi penerimaan pajak sebesar 114 Triliun dengan rata-rata tahunan 5,4 Triliun rupiah. Jika memperhitungkan kapasitas PSN Kawasan, potensi penerimaan pajak menjadi 86 Triliun rupiah dalam rata-rata tahunan 4 Triliun rupiah.

Untuk potensi penerimaan pajak daerah, dampak fiskal terbesar adalah di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan banyaknya PSN yang berlokasi di Jawa Timur, sekitar kurang lebih 26 proyek. Selain itu, PSN melalui melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan dan Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga berdampak pada fiskal di daerah tersebut.

Adanya pembangunan PSN memberikan dampak yang signifikan untuk setiap daerah dalam meningkatkan rasio kemandirian masing-masing daerah dengan adanya peningkatan perekonomian yang ditunjukkan dengan adanya multiplier effect bagi masyarakat. Hal ini memberikan arti bahwa Pembangunan PSN memberikan wujud diversifikasi ekonomi yang diciptakan dari berbagai sektor disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas sumber daya dalam masing-masing daerah untuk perwujudan pembangunan nasional di Indonesia. Proyek Strategis Nasional ini mencerminkan upaya besar pemerintah untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, memperkuat ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan mendorong investasi untuk masa depan yang lebih baik.

b) Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)

Skema Hak Pengelolaan Terbatas Indonesia saat ini sudah melakukan penyusunan list pilot project untuk infrastruktur yang berpotensi menggunakan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). Pilot Project Approach yang melibatkan berbagai sektor infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangkit listrik tenaga air dan bandara internasional. Masing-masing proyek dirancang untuk menguji skema pengelolaan atau pembiayaan berupa HPT tersebut inovatif dan bertujuan meningkatkan efisiensi, pengelolaan aset, serta mendorong investasi. Berikut adalah rincian infrastruktur yang disoroti sebagai berikut:

- 1) Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur Pada September 2022, PT Sumitomo Indonesia mengajukan usulan implementasi skema HPT untuk aset

Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatiluhur yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Skema ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan aset pembangkit listrik untuk mendukung pasokan energi. Langkah ini menunjukkan potensi kolaborasi antara entitas pemerintah dan swasta dalam pengelolaan aset strategis.

- 2) Bandara Internasional Lombok Praya Pada April 2024, KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) sedang mempertimbangkan penerapan skema HPT di Bandara Lombok Praya. PT Angkasa Pura II, sebagai pemilik aset, menunjukkan minat terhadap skema tersebut. Namun, diperlukan informasi lebih lanjut terkait metode pembayaran di muka serta pedoman teknis skema HPT sebelum implementasi dilakukan. Hal ini mencerminkan perlunya kajian mendalam dan penyusunan pedoman yang jelas sebelum melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan bandara.
- 3) Bandara Internasional Kertajati Pada Maret 2023, KPPIP dan KIAT (Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur) mengunjungi Bandara Kertajati bersama PT BUB sebagai operator bandara. Mereka tertarik untuk mengadopsi skema HPT guna mengoptimalkan operasi bandara. Namun, terdapat kendala terkait pedoman teknis, terutama mengenai status kepemilikan aset oleh pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD). Isu ini menunjukkan kompleksitas administrasi dan hukum yang perlu diselesaikan sebelum skema pengelolaan aset ini diterapkan.

- 4) Bandara Labuan Bajo Pada Desember 2023, KPPIP dan KIAT juga mengkaji Bandara Labuan Bajo. Saat ini, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) tidak memiliki otoritas untuk menjalin kemitraan pengelolaan bandara, karena kepemilikan aset masih berada di bawah pemerintah daerah. UPBU hanya menerima tugas dari Kementerian Perhubungan. Situasi ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi dan wewenang untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel.

Secara keseluruhan, keempat proyek ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai mekanisme inovatif dalam pengelolaan infrastruktur strategis. Setiap proyek menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari kebutuhan pedoman teknis hingga penyelesaian isu kepemilikan aset. Namun, pendekatan percontohan ini memiliki potensi untuk membuka jalan bagi pengelolaan infrastruktur yang lebih efisien, transparan, dan berbasis kemitraan.

Dibandingkan capaian kinerja dengan negara lain, perjanjian kemitraan nasional untuk Daur Ulang Aset merupakan elemen kunci dari Paket Pertumbuhan Infrastruktur Pemerintah Australia. Program 5 tahun sejak 2014-2019 untuk mendukung negara bagian dan wilayah dalam monetisasi aset melalui penjualan atau sewa dan peruntukkan dana hasil untuk infrastruktur baru. Pemerintah Federal menyediakan insentif moneter sampai dengan 15% dari perkiraan dana hasil monetisasi aset kepada negara bagian dan wilayah sebagai bonus. Bonus memberikan kompensasi atas pembayaran setara pajak kepada negara bagian dan wilayah. Pemerintah



Federal memberikan kontribusi sebesar \$4.2 milyar pada anggaran tahun 2015. Pemerintah Federal memberikan persetujuan terhadap aset yang akan dimonetisasi dan aset baru yang dibangun dari dana hasil yang dibayarkan di depan. Pemerintah Federal menjabarkan lini masa yang jelas untuk penyampaian proposal, transaksi, pembangunan infrastruktur baru.

Program Asset Recycling (daur ulang aset) yang diterapkan oleh negara bagian New South Wales (NSW) dan Victoria di Australia, di mana aset pemerintah dijual atau disewakan untuk mendapatkan dana guna membiayai pembangunan infrastruktur baru. Pada bagian NSW, pendapatan dari daur ulang aset terdapat total pendapatan sebesar \$24 miliar, ditambah bonus \$2,2 miliar dari Pemerintah Federal. Aset yang didaur ulang meliputi TransGrid sebesar \$6.579 juta, Ausgrid sebesar \$5.561 juta, Port Botany & Port Kembla sebesar \$4.253 juta, Endeavour Energy, Land & Property Information, dan lainnya. Dampak anggaran yang terjadi adalah anggaran investasi untuk infrastruktur meningkat dari 9% menjadi 17,65% setelah inisiatif ini.

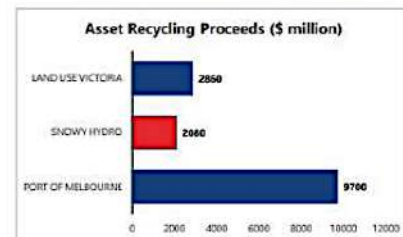
NSW dan Victoria sebagai Pelopor Daur Ulang Aset

NSW menerima \$24 milyar sebagai dana hasil daur ulang aset + \$2.2 milyar bonus dari Pemerintah Federal



Anggaran investasi NSW untuk infrastruktur meningkat dari 9% menjadi 17.65% setelah inisiatif daur ulang aset

Victoria menerima \$14.6 milyar sebagai dana hasil daur ulang aset + \$877.5 juta bonus dari Pemerintah Federal



Anggaran investasi Victoria untuk infrastruktur meningkat dari 8.5% menjadi 11.77% setelah inisiatif daur ulang aset

Dana hasil digunakan untuk Pembangunan infrastruktur baru di sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan

Gambar 3.11 Anggaran Investasi Untuk Infrastruktur

Tujuan penggunaan dana adalah untuk pembangunan infrastruktur baru di berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, bagian Victoria juga mendapatkan total pendapatan sebesar \$14,6 miliar, ditambah bonus \$877,5 juta dari Pemerintah Federal. Aset yang didaur ulang meliputi Pelabuhan Melbourne sebesar \$9.700 juta, Snowy Hydro sebesar \$2.080 juta. Untuk penggunaan lahan di Victoria sebesar \$2.860 juta. Dampak anggaran yang terjadi akibat anggaran investasi untuk infrastruktur meningkat dari 8,5% menjadi 11,77%. Tujuan penggunaan dana adalah sama seperti NSW, dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru di sektor transportasi, kesehatan, dan 204 pendidikan. Program ini menunjukkan bagaimana NSW dan Victoria memanfaatkan hasil dari penjualan atau penyewaan aset untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik.

c) Skema Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)

Sama halnya dengan pencapaian kinerja skema HPT, sudah dilakukan penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema P3NK, sebuah mekanisme untuk mendapatkan kontribusi dari penerima manfaat proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan investasi pemerintah, khususnya dalam bidang infrastruktur. Berikut adalah infrastruktur yang dikaji dengan menggunakan skema P3NK sebagai berikut:

- 1) Trans Sumatera Toll Road (JTTS) Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dirancang untuk menghubungkan Lampung hingga Aceh dengan total biaya proyek sebesar Rp 555 triliun. Hingga 2024, kebutuhan tambahan modal pemerintah untuk tahap pertama mencapai Rp 67 triliun. Dalam implementasi LVC, fokus utamanya adalah pada dua ruas tol strategis adalah Ruas Lematang - Pelabuhan Panjang dengan biaya investasi Rp 2,57 triliun dan Ruas Rengat - Pekanbaru dengan biaya investasi Rp 18,53 triliun. Melalui P3NK, kontribusi nilai lahan di sepanjang jalur tol diharapkan dapat mendukung pendanaan proyek secara berkelanjutan.
- 2) Jembatan Batam-Bintan Proyek ini merupakan bagian dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema solicited, menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Pulau Bintan. Biaya investasi untuk porsi KPBU diproyeksikan sebesar Rp 14,35 triliun

dalam skenario eksisting, sementara biaya konstruksi diperkirakan mencapai Rp 9,78 triliun. Pembebasan lahan untuk proyek ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di wilayah strategis Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

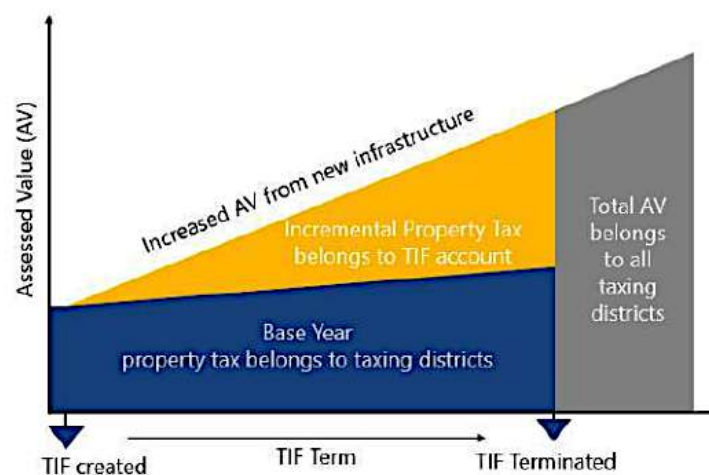
- 3) Semarang Harbor Toll Road Proyek ini adalah jalan tol yang menghubungkan Semarang dengan Batang sepanjang 20,16 km, dengan total investasi sebesar Rp 17,5 triliun. Rincian biaya terdiri dari Rp 1,41 triliun untuk pembebasan lahan, Rp 7,97 triliun untuk biaya konstruksi, dan Rp 5,24 triliun untuk pembangunan tanggul. Jalan tol ini dirancang untuk mendukung aksesibilitas kawasan pelabuhan dan industri sekaligus berperan dalam mitigasi banjir di Semarang melalui infrastruktur tanggul.

Implementasi P3NK juga sudah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yaitu berupa pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan dimana bentuk kompensasi yang dilakukan adalah Infrastruktur yang mendukung transportasi umum massal dan integrasi (penataan Kawasan stasiun), Infrastruktur pendukung Kawasan TOD (jalan & jalur pejalan kaki), Infrastruktur penanganan kemacetan (fly over), dan Infrastruktur perumahan (rumah susun). DKI Jakarta juga telah melakukan skema P3NK dalam bentuk kewajiban pembiayaan dan Pembangunan RSM/S melalui konversi

dimana bentuk kompensasi yang digunakan adalah Infrastruktur yang mendukung transportasi umum massal dan integrasi (penataan Kawasan 205 stasiun), Infrastruktur pendukung Kawasan TOD (jalan & jalur pejalan kaki), Infrastruktur penanganan kemacetan (fly over), Infrastruktur perumahan (rumah susun). Selain itu, dilakukan juga dalam bentuk implementasi infrastruktur yang terbangun pada Kawasan Berorientasi Transit (KBT/TOD) dan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Melalui implementasi P3NK, diharapkan proyek-proyek ini dapat menarik kontribusi finansial dari peningkatan nilai lahan yang terjadi di sekitar area proyek. Mekanisme ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelangsungan pembiayaan proyek infrastruktur secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja dengan negara lain, pembangunan Sydney Harbour Bridge adalah contoh bagaimana proyek infrastruktur besar dapat dibiayai sebagian melalui inovasi pendanaan seperti pajak peningkatan nilai tanah (Betterment Tax). Meskipun ada tantangan politis dan teknis, pendekatan ini menunjukkan bagaimana nilai tambah yang dihasilkan oleh proyek publik dapat dialokasikan untuk mendukung pembiayaan proyek itu sendiri. Walaupun terjadi kelebihan biaya (cost overruns) dan penghentian lebih awal, hasil dari mekanisme Land Value Capture (LVC) (penangkapan nilai tanah) tetap berhasil menyumbang 16% dari total biaya proyek. Sydney Harbour Bridge tetap menjadi ikon keberhasilan infrastruktur Australia, meskipun pembiayaannya mengalami tantangan yang signifikan.

Crossrail adalah salah satu contoh sukses bagaimana proyek infrastruktur besar dapat dibiayai melalui pendekatan inovatif seperti Land Value Capture (LVC). Proyek Crossrail di Inggris, sebuah proyek transportasi besar yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendorong perkembangan ekonomi melalui jalur kereta komuter berkecepatan tinggi. Pajak tambahan yang dibebankan pada pemilik properti non-domestik mencerminkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh proyek publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan proyek itu sendiri. Proyek ini dirancang tidak hanya untuk mengurangi kemacetan di London, tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang rute tersebut. Dengan 28% dari biaya proyek ditutupi oleh LVC, Crossrail menunjukkan bagaimana kebijakan pajak yang tepat dapat mendukung proyek besar tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.



Gambar 3.12 Pembiayaan Inovasi Pembangunan Infrastruktur

Proyek Americas Interchange, sebuah persimpangan jalan utama di El Paso, Texas, dengan populasi lebih dari 680 ribu jiwa. Tujuan utama pembangunan Americas



Interchange adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan memfasilitasi kelancaran arus transportasi, yang sangat penting bagi wilayah dengan aktivitas ekonomi yang dinamis seperti El Paso. Proyek ini dibiayai sebagian menggunakan mekanisme Tax Increment Financing (TIF), yaitu metode pembiayaan infrastruktur dengan memanfaatkan peningkatan pendapatan pajak properti di wilayah sekitar proyek. Dalam skema ini, Pemerintah El Paso mengalokasikan pendapatan pajak properti yang melebihi baseline atau ambang batas tertentu ke akun TIF selama periode proyek berlangsung. Setelah TIF berakhir, semua pendapatan pajak properti kembali masuk ke anggaran umum pemerintah El Paso. Pendekatan ini memberikan jaminan bahwa jika pendapatan dari TIF lebih rendah dari proyeksi, pemerintah El Paso akan menanggung selisihnya, sehingga proyek tetap dapat berjalan tanpa kekurangan dana. Dari total biaya proyek sebesar USD 141 juta, sekitar 21% atau USD 30 juta berasal dari dana TIF, mencerminkan kontribusi yang signifikan dari mekanisme ini dalam mendukung pendanaan proyek.

Melalui adanya perolehan nilai kawasan tersebut, cara ini tidak hanya menciptakan infrastruktur yang lebih efisien tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan nilai properti di wilayah sekitar, yang pada akhirnya akan memperkuat basis ekonomi lokal. Skema seperti ini memungkinkan proyek besar untuk dilaksanakan tanpa harus membebani anggaran pemerintah sepenuhnya.

E) Program *Crosscutting* dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya

Dalam rangka mencapai target pada Indikator 4 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional, sejumlah program dilaksanakan dengan kolaborasi pemangku kepentingan lainnya, baik Deputi lain di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Pemangku kepentingan lainnya yang terlibat seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara, World Bank, Asian Development Bank, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Japan International Cooperation Agency (JICA), UK Pact, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha. Adapun beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

- 1) Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Air Minum, Air Baku dan Sanitasi Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025
- 2) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup PSN sektor Bina Marga di Kawasan Perbatasan dan IKN pada tanggal 7 Februari 2025
- 3) Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rekomendasi Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Pengkajian dan Pengesahan Hasil



Inver dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas di Provinsi Aceh pada tanggal 4 Juni 2025

- 4) Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Indikasi Tumpang Tindih Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri di Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Juni 2025
- 5) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Progres PSN di IKN yang Didanai oleh LMAN pada tanggal 29 Juli 2025
- 6) Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2025
- 7) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri pada 13 Agustus 2025
- 8) Telah dilaksanakan Rapat pembahasan pelaksanaan PSN Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2025
- 9) Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2025
- 10) Telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut Kelengkapan Dokumen Usulan Program Strategis Nasional Pengembangan PLTS Skala Besar di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 29 September 2025
- 11) Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada tanggal 8 Desember 2025.

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Selama Tahun 2025, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target PSN sesuai dengan realisasi disebabkan oleh beberapa kendala yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dinamika koordinasi dengan badan usaha, proses perizinan yang masih berjalan, serta penyesuaian terkait pemenuhan aspek tata ruang dan pelepasan kawasan hutan. Selain itu, terdapat juga kendala yang diakibatkan oleh:

- 1) Adanya kendala pada percepatan untuk pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Kehutanan khususnya terkait pelepasan kawasan hutan.
- 2) Belum terselesaikannya beberapa regulasi yang membutuhkan penyesuaian dengan tugas fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih.
- 3) Efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya dukungan dana bagi kegiatan pengembangan kawasan ekonomi.

Di samping itu, terdapat beberapa penyesuaian dalam realisasi capaian PSN Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi di lapangan, sehingga beberapa hal yang disepakati adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah dibahas dan disepakati bersama Kementerian Perindustrian bahwa Kawasan Industri (KI) Kendari masih menghadapi permasalahan internal pada badan usaha, sehingga penyelesaian proyek pada tahun 2025 belum memungkinkan. Namun demikian, dalam rangka tetap

mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat PSN Kawasan Industri yang dapat didorong penyelesaiannya pada tahun 2025, yaitu Kawasan Industri Alumina Toba.

- 2) Untuk ruas Tol Sigli–Banda Aceh, secara fisik konstruksi main road telah selesai dan telah difungsikan secara terbatas sebagai jalan tol fungsional pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Selain itu, masih terdapat pekerjaan pelandaian lereng yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyelesaian pembebasan lahan. Namun, untuk dapat dikategorikan sebagai PSN yang selesai, masih terdapat tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pemenuhan sertifikasi kelayakan operasional dan pengoperasian secara penuh. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.
- 3) Untuk SPAM Benteng Kobema, pekerjaan konstruksi telah selesai dan saat ini sedang dilakukan tahapan pengujian dan commissioning. Proses pengujian masih berlangsung karena kapasitas layanan yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan kebutuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, progres capaian proyek dijustifikasi sebesar 90%.

Pencapaian target ini didorong oleh pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, monitoring dan evaluasi secara berkala serta pelaksanaan tinjauan lapangan sehingga target pada tahun 2025 dapat terpenuhi.

Terkait dengan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur melalui Skema HPT dan P3NK telah dicapai beberapa hal yaitu:

- 1) Telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 3 Tahun 2026 terkait Pedoman Pelaksanaan terkait P3NK
- 2) Telah dilaksanakan adanya sosialisasi skema Hak Pengelolaan Terbatas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga dan skema P3NK kepada Pemerintah Daerah
- 3) Telah dilaksanakan penjajakan pilot project untuk skema pembiayaan alternatif terkait skema HPT dan P3NK.

Hal ini disebabkan oleh adanya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Lembaga Donor, Akademisi, dan stakeholder lainnya. Selain itu, penguatan dari hubungan yang baik dengan para stakeholder dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian kebijakan.

G) Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Dalam pengelolaan anggaran juga melakukan upaya efisiensi anggaran sehingga dapat dilakukan lebih banyak koordinasi diantaranya adalah belanja sewa peralatan kantor dan belanja keperluan perkantoran yaitu untuk aplikasi teleconference dalam melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan PSN. Kedua jenis belanja ini dirasa sangat menunjang kinerja. Dengan keterbatasan anggaran namun beban tugas yang tidak berkurang, serta waktu penyelesaian yang telah ditentukan, dengan adanya kedua belanja tersebut membuat beberapa kegiatan koordinasi

dapat dilakukan bersamaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu (tidak perlu melakukan pindah lokasi, hemat waktu dan biaya transportasi atau perjalanan dinas). Selain itu, pengelolaan persuratan secara digital yang diupayakan sebagai bentuk kemudahan akses bekerja juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis kantor dan lainnya sehingga menghemat anggaran sebesar Rp22.215.061,-.

H) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya 153enyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

- Realisasi output yang menunjang pencapaian IKU 3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2025 adalah telah diselesaikannya 5 rekomendasi kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), terdiri atas 2 rekomendasi kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 3 rekomendasi kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021.
- Pencapaian keberhasilan tersebut salah satunya dengan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan penyusunan regulasi kelembagaan KPPIP dan tata Kelola PSN serta penetapan perubahan daftar PSN. Asdep PKEPS

telah menetapkan regulasi Permenko Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Asdep PKEPS juga telah menetapkan dua regulasi yaitu Permenko Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Permenko Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

- Pencapaian keberhasilan lainnya terkait dengan pengembangan kawasan strategis ekonomi dan proyek strategis nasional juga diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan alternatif pengembangan Kawasan ekonomi diwujudkan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan penyusunan peraturan terkait pedoman juknis P3NK dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Kawasan strategis ekonomi terkait pengembangan Kawasan Rebana.

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- Rapat Koordinasi dan monitoring terkait alokasi anggaran pengadaan tanah untuk PSN.
- Rapat Koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian PSN.
- Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)

- Sosialisasi regulasi turunan alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)
- Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Tahun 2025 kepada Presiden
- Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat
- Evaluasi dampak ekonomi dan manfaat PSN yang telah selesai

Triwulan II

- Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN.
- Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
- Rapat Koordinasi dan sinkronisasi terkait penetapan list pilot project dengan menggunakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)
- Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pembangunan PSN
- Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat

Triwulan III

- Rapat koordinasi dan monitoring dengan stakeholder terkait penyerapan anggaran pengadaan tanah untuk PSN.
- Rapat koordinasi dan monitoring dengan PJPK terkait kepastian penyelesaian pembangunan PSN.
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan PSN Semester 1 tahun 2026 kepada Presiden.

- Implementasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK) pada infrastruktur yang tercantum dalam list pilot project
- Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat

Triwulan IV

- Rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan skema alternatif pembiayaan infrastruktur (HPT dan/atau P3NK)
- Penyusunan laporan evaluasi dan dampak ekonomi dari pembangunan PSN.
- Sosialisasi capaian PSN melalui media nasional kepada masyarakat.

IKU 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif yang salah satunya adalah sektor pariwisata harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Dalam pengembangan sektor pariwisata, aspek utama yang menunjukkan perkembangan kinerjanya adalah penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan sektor jasa yang diperkirakan akan terus tumbuh dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kinerja sektor akomodasi makanan dan minuman dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik.

Dalam penghitungannya sektor akomodasi makanan dan minuman mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi langsung. Sektor ini menjadi indikator kinerja utama dari sektor pariwisata dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan *share* atau kontribusi terbesar terhadap PDB (sebesar 2,64% pada tahun 2024) dibandingkan sektor lain yang terkait dengan pariwisata, seperti jasa perjalanan, hiburan yang masuk dalam sektor jasa lainnya (sebesar 2,05%).

Pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman merupakan persentase (%) peningkatan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun tertentu (t1) yang dibandingkan dengan nilai tambah sektor akomodasi pada tahun sebelumnya (t-1). Persentase peningkatan nilai tambah sektor akomodasi makanan dan minuman diperoleh dengan mencari selisih antara PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t1 dengan PDB akomodasi makanan minuman pada tahun t-1. Adapun formulasi penghitungan pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDBakmmt1} = [(PDBakmmt1 - PDBakmmt - 1) / PDBakmmt - 1] \times 100\%$$

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 9,53% yang ditetapkan dalam dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga tahun 2025, Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman yang telah terealisasi sebesar 7,41% atau tercapai 77,75% dari target tahun 2025 sebesar 9,53% dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Persentase	9,53%	7,41%	77,75%

Capaian kinerja 2025 sebesar 77,75% dari target tahun 2025. Kinerja indikator sektor akomodasi makanan dan minuman sangat didukung oleh kunjungan wisatawan, terutama wisatawan nusantara. Secara akumulatif, total kunjungan wisatawan nusantara hingga Desember 2025 telah mencapai 1,059 miliar kunjungan hingga Desember 2025, meningkat 4,84% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun terdapat kenaikan pada jumlah perjalanan wisatawan nusantara selama tahun 2025, namun laju pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman tidak mengalami kenaikan yang sejalan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah:

1. Efisiensi anggaran pemerintah pada belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang biasanya menggunakan hotel bintang 3–5 dipangkas cukup besar, sehingga banyak hotel kehilangan sumber okupansi utama dari segmen instansi dan BUMN.
2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan daya beli yang melemah mendorong perusahaan dan rumah tangga lebih berhati-hati membelanjakan uang, sehingga anggaran untuk meeting, gathering, dan makan di luar rumah ikut dipotong, sementara penjualan minuman dan produk F&B premium tidak tumbuh optimal.

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.18 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	• Pada 22 Januari 2025, telah dilaksanakan Pertemuan dengan Telkom untuk berdiskusi terkait digitalisasi perizinan event untuk memetakan kendala yang dihadapi saat ini • Pada 22 Januari telah dilaksanakan pembahasan strategi promosi produk warisan nusantara dengan Desainer Lokal (Didiet Maulana) • Pada 11 Februari, telah dilaksanakan diskusi dengan Bappenas terkait Isu Strategis Kepariwisata dalam RPJMN 2025-2029 • Pada 21 Februari, telah dilaksanakan diskusi mengenai isu pariwisata di Indonesia dengan World Bank
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	• Selama bulan Februari, telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pembenahan isu yang telah dipetakan sebelumnya. Pada 24 Februari 2025, telah dilaksanakan pembahasan terkait keberlanjutan digitalisasi perizinan penyelenggaraan event yang telah dikembangkan oleh PT. Telkom Indonesia bersama POLRI, KemenInves/BKPM, KemenPar, dan Bank Mandiri.

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			- Pada 13 Maret 2025, telah dilaksanakan diskusi kolaborasi APIEM pada SDM bidang penyelenggaraan event - Pada 19 Maret 2025, dilakukan diskusi tindak lanjut dengan World Bank terkait pengembangan pariwisata Indonesia
3.	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	Telah dilaksanakan pertemuan dan audiensi dengan WIR Group yang dilaksanakan selama periode Mei-Juni.
4.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	Telah dihimpun alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Digitalisasi Layanan Perizinan Event.
5.	Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis dan Permasalahan terkait Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman		Kunjungan Lapangan ke Candi Prambanan dan Ratu Boko disertai Pembahasan RPermenko Tata Kelola Candi Borobudur pada 8-9 Juli 2025 Menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Progress dan Kendala yang dihadapi KEK Pariwisata Tahun 2025 pada 23 Juli, 13 Agustus, 21 Agustus, 27 Agustus, dan 24 September 2025 RDP Pembahasan DIM RUU Kepariwisata pada 25-27 Agustus 2025

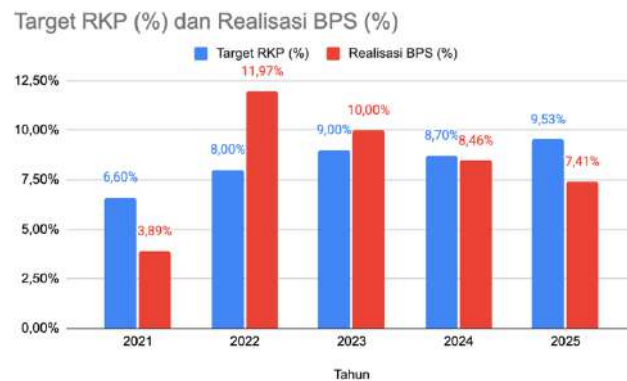
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Rapat Stimulus Diskon Transportasi pada 26 September dan 29 September 2025
6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	• Diskusi dalam rangka Penyempurnaan Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur pada 22 Oktober 2025 • Pendampingan Audiensi: Pengembangan Kawasan Pariwisata The Golo Mori pada 18 November 2025 • Pertemuan dengan Kemenag: Pembahasan Pembaharuan MoU Pemanfaatan Candi pada 27 November 2025
7.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman	Terlaksana	• Rakor Stimulus Diskon Transportasi Periode Libur Nataru pada 31 Oktober 2025 • Rakor Update Progres Program Strategis Pokja P2SP dan Stimulus Nataru pada 20 November 2025 • Rakor Potensi dan Alternatif Skema Pembiayaan untuk Daya Saing Destinasi Pariwisata Belitung pada 3 Desember 2025

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berbasis target RPJMN/RKP 2025 untuk pertumbuhan Lapangan Usaha “Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum” sebesar 9,53%, realisasi tahun 2025 tercatat 7,41%, sehingga terdapat gap 2,12 p.p. (realisasi $\approx$ 77,8% dari target).

Tren 5 tahun terakhir (c-to-c, %), polanya menurun bertahap setelah lonjakan pemulihan pascapandemi (2022–2023). Ini membuat target 2025 yang tinggi menjadi makin “menantang” karena basis pertumbuhan sudah tidak serendah masa rebound; efek pemulihan mobilitas/okupansi dan “revenge

spending" mulai normal, sehingga pertumbuhan cenderung kembali ditentukan oleh daya beli riil, biaya perjalanan & logistik (aviation/hotel/food input), dan kekuatan demand domestik.



Gambar 3.13 Target RKP dan Realisasi BPS Tahun 2021-2025

Untuk driver sektor ini, ditunjang oleh beberapa hal, salah satunya Wisatawan (wisnus & wisman). Peningkatan jumlah wisatawan umumnya mendorong pertumbuhan sektor melalui kenaikan tingkat hunian kamar, frekuensi konsumsi makanan dan minuman, serta aktivitas pendukung pariwisata lainnya. Namun demikian, kontribusi wisatawan terhadap pertumbuhan sektor tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan, melainkan juga oleh kualitas wisatawan, yang tercermin dari rata-rata lama tinggal (*length of stay*) dan tingkat pengeluaran per kunjungan (*average spending*). Dalam kondisi di mana kunjungan meningkat tetapi lama tinggal relatif singkat dan pola belanja lebih hemat, dampak terhadap pertumbuhan nilai tambah sektor menjadi terbatas.

Selain itu, kinerja sektor akomodasi dan makan minum juga sensitif terhadap struktur dan segmentasi wisatawan. Wisatawan dengan tujuan rekreasi massal cenderung memberikan kontribusi nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan wisatawan berbasis MICE, event internasional,

atau wisata minat khusus yang memiliki tingkat pengeluaran lebih tinggi dan permintaan layanan yang lebih intensif. Faktor pendukung seperti konektivitas transportasi menuju destinasi, ketersediaan event berskala nasional dan internasional, serta stabilitas global turut memengaruhi keputusan perjalanan wisatawan. Oleh karena itu, pencapaian target pertumbuhan sektor ini sangat bergantung pada kemampuan kebijakan pariwisata untuk tidak hanya meningkatkan volume wisatawan, tetapi juga mendorong pergeseran menuju wisatawan berkualitas dengan pola belanja yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional (Khusus IKU Stakeholder)

Tabel 3.19 Capaian Level Nasional/Internasional (Khusus IKU Stakeholder)

Negara	Indikator	Capaian 2025	Analisis Singkat
Indonesia	Growth of Accommodation & Food Service Activities	~7–8%	Pertumbuhan positif namun di bawah target; kunjungan wisata meningkat, tetapi kualitas belanja (lama tinggal & average spending) belum optimal dan biaya usaha menekan margin.
Thailand	Accommodation & Food Service Activities Growth	~8–9%	Kinerja relatif lebih kuat karena dominasi wisman high-spending, pemulihan MICE, dan ekosistem destinasi matang; menjadi benchmark utama ASEAN.
Vietnam	Accommodation & Food Service Activities Growth	~9–11%	Pertumbuhan tinggi dipicu rebound kuat wisman dan ekspansi destinasi; volatilitas masih tinggi, sensitif terhadap perubahan arus wisata.
Jepang	Growth of Accommodation & Food Services	~4–5%	Pertumbuhan moderat dan stabil; pasar mature, fokus pada nilai tambah & kualitas layanan, bukan volume kunjungan.

Secara internasional, indikator pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum Indonesia telah sepadan secara definisi dengan praktik global (ISIC Rev.4 – Section I), sehingga perbandingan lintas negara dapat dilakukan secara *apple-to-apple*. Dibandingkan negara maju seperti Jepang, kinerja Indonesia pada 2025 menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi, namun dengan volatilitas dan ketergantungan yang lebih besar pada dinamika kunjungan wisata. Jepang, sebagai pasar pariwisata yang matang, mencerminkan pertumbuhan sektor yang lebih stabil dan ditopang oleh kualitas belanja serta efisiensi layanan, sehingga laju pertumbuhan relatif moderat tetapi berkelanjutan.

Dibandingkan negara berkembang yang berada pada fase pemulihan cepat seperti Vietnam, pertumbuhan sektor Indonesia relatif lebih rendah karena rebound Vietnam masih ditopang oleh lonjakan wisman dan ekspansi destinasi baru. Namun, pola tersebut juga disertai volatilitas yang tinggi dan sensitivitas terhadap perubahan arus wisata global. Sementara itu, Thailand sebagai pemimpin pariwisata ASEAN menunjukkan kinerja yang lebih kuat dan konsisten, terutama karena struktur wisatawan yang didominasi segmen berbelanja tinggi, pemulihan MICE, serta integrasi destinasi–event–konektivitas yang lebih matang.

Dengan demikian, posisi Indonesia berada di antara negara maju yang stabil dan negara berkembang yang masih mengalami *rebound*. Implikasi kebijakan utamanya adalah bahwa peningkatan kinerja sektor akomodasi dan makan minum tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah wisatawan, melainkan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas wisatawan, perpanjangan lama tinggal, serta penguatan segmen bernilai tambah tinggi (MICE, event

internasional, dan wisata minat khusus), sebagaimana tercermin pada praktik terbaik Thailand.

E) Program Crosscutting dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya (Khusus IKU Stakeholder)

Pencapaian indikator pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan hasil kerja lintas sektor yang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan ekonomi makro, tetapi juga oleh sinergi program antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN. Dalam konteks ini, peran Kedeputian yang mengampu indikator tersebut bersifat *cross-cutting*, karena kinerja sektor akomodasi dan makan minum sangat dipengaruhi oleh kebijakan pariwisata, pangan, gizi, serta dukungan infrastruktur dan layanan publik. Koordinasi lintas K/L menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan aktivitas wisata dan konsumsi dapat terkonversi menjadi pertumbuhan nilai tambah sektor secara berkelanjutan.

Dari sisi permintaan, program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, seperti penguatan destinasi prioritas, penyelenggaraan event nasional dan internasional, serta pengembangan wisata berkualitas (*quality tourism*), berperan langsung dalam meningkatkan tingkat hunian akomodasi dan konsumsi makanan-minuman wisatawan. Program promosi terpadu, pengembangan MICE, dan peningkatan konektivitas destinasi turut memperpanjang lama tinggal dan mendorong belanja wisata, yang berdampak positif terhadap kinerja sektor ini. Dukungan tersebut semakin efektif ketika selaras dengan program BUMN pariwisata, seperti pengelolaan kawasan destinasi, hotel, dan fasilitas penunjang oleh holding pariwisata nasional.

Dari sisi pasokan dan stabilitas biaya, kebijakan pangan dan gizi memiliki peran strategis. Program ketahanan dan stabilisasi pangan yang dilaksanakan oleh Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Badan Gizi Nasional berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku pangan bagi subsektor makan minum. Stabilitas harga pangan, penguatan rantai pasok, serta program peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat membantu menekan tekanan biaya usaha restoran dan jasa boga, sekaligus memperluas basis permintaan domestik. Sinergi ini penting agar pertumbuhan sektor tidak teredam oleh volatilitas harga input utama.

Selain itu, dukungan BUMN di bidang transportasi, logistik, dan perhotelan, termasuk pengelolaan bandara, pelabuhan, transportasi darat, serta jaringan hotel dan rest area juga turut memperkuat ekosistem sektor akomodasi dan makan minum. Peningkatan konektivitas dan kelancaran distribusi pangan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses wisatawan ke destinasi. Dengan demikian, capaian indikator pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan efektivitas orkestrasi kebijakan lintas K/L dan BUMN, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh satu program sektoral, tetapi oleh keterpaduan kebijakan pariwisata, pangan, gizi, dan infrastruktur dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis konsumsi dan wisata.

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terutama didorong oleh pemulihan mobilitas dan aktivitas pariwisata pascapandemi, baik dari wisatawan nusantara maupun mancanegara. Peningkatan jumlah kunjungan wisata,

pelaksanaan berbagai event nasional dan internasional, serta penguatan destinasi prioritas berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat hunian akomodasi dan permintaan jasa makanan-minuman. Sinergi program lintas Kementerian/Lembaga, khususnya pengembangan pariwisata dan dukungan konektivitas, turut mempercepat pemulihan sektor ini, sehingga pertumbuhan tetap terjaga positif meskipun berada dalam fase normalisasi ekonomi.

Namun demikian, kegagalan mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan disebabkan oleh belum optimalnya kualitas permintaan wisata. Meskipun jumlah kunjungan meningkat, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran per wisatawan relatif lebih rendah dibandingkan asumsi perencanaan. Pola belanja wisatawan yang lebih berhati-hati, dominasi segmen wisata berbiaya rendah, serta pemulihan pasar MICE dan wisata korporasi yang berlangsung secara bertahap menyebabkan peningkatan aktivitas belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan berbasis volume belum cukup kuat untuk mengejar target yang dirancang pada fase optimisme pemulihan.

Selain faktor permintaan, tekanan dari sisi penawaran turut menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator. Kenaikan harga bahan baku pangan, biaya energi, dan penyesuaian upah tenaga kerja menekan margin pelaku usaha, khususnya pada subsektor makan minum, sehingga ruang untuk ekspansi usaha menjadi terbatas. Volatilitas harga pangan dan logistik yang masih terjadi juga memengaruhi stabilitas operasional sektor. Dengan demikian, kegagalan mencapai target tidak semata-mata mencerminkan lemahnya kinerja sektor, melainkan menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara asumsi target dengan kondisi fundamental permintaan wisata dan biaya usaha yang dihadapi pelaku sektor akomodasi dan makan minum.

G) Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu, serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

H) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

- Koordinasi peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata. Berdasarkan Kepmenhub Nomor 37/2025, telah ditetapkan 36 bandara sebagai bandara Internasional, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2025.

- Perbaikan tata kelola destinasi pariwisata melalui tim tata kelola Kompleks Candi Borobudur. Melalui aktivasi kegiatan tim koordinasi diharapkan penyelenggaraan event di destinasi pariwisata terutama kompleks candi borobudur dapat meningkat dan meningkatkan demand kunjungan.

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman
- Pengumpulan data dan informasi terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman

Triwulan II

- Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman
- Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman

Triwulan III

- Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman

Triwulan IV

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan dan minuman

- Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pertumbuhan sektor akomodasi makanan

IKU 4.2 Pengeluaran Wisata Mancanegara (USD/ Kunjungan)

Angka capaian rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival* (ASPA) wisatawan mancanegara dari data yang diperoleh dari BPS. Pengeluaran atau pengeluaran wisatawan mancanegara adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisatawan mancanegara antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terdapat dalam statistik pengeluaran wisatawan mancanegara, yang dipublikasikan oleh BPS.

Data rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisatawan mancanegara) menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas.

Adapun formula perhitungan rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara} = \frac{\text{Total Pengeluaran Wisman hasil survey}}{\text{Jumlah Wisman yang disurvei}}$$

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen RPJMN 2025-2029. Adapun target ini merupakan target tahunan sehingga tidak terdapat target triwulanan.

Hingga Bulan Desember 2025, Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) yang telah terealisasi sebesar USD 1.267 atau mencapai 97,46% dari target Tahun 2025 sebesar USD 1.300 – 1.381,3 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Mata Uang (USD)	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.267	99,79%

Capaian rata - rata pengeluaran wisatawan mancanegara hingga Desember 2025 mencapai USD1.267 didukung oleh peningkatan daya saing dan kualitas destinasi wisata di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta kunjungan sepanjang tahun 2025, atau tumbuh sebesar 10,80% dari tahun 2024. Peningkatan jumlah tersebut mencerminkan adanya penguatan permintaan perjalanan wisata dan meningkatnya mobilitas wisatawan yang turut berkontribusi pada perputaran ekonomi di destinasi pariwisata.

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.21 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 4.2

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat untuk mendapatkan profil dan gambaran kondisi lapangan serta memetakan masalah yang dihadapi, antara lain: (i) Diskusi dengan Pengelola Kawasan Toba Kaldera pada 3 Januari 2025, serta (ii) beberapa diskusi dengan BUPP KEK Tanjung Kelayang dan KEK Morotai pada Februari 2025.
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait Peningkatan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat untuk mengumpulkan data dan informasi yang menunjang penyelesaian masalah yang dipetakan sebelumnya, antara lain: (i) Diskusi Pengembangan Konektivitas dan Rute Destinasi dengan Kemenhub pada 6 Februari 2025 dan (ii) diskusi terkait kajian harga tiket pesawat dengan Prospera pada Februari 2025.
3.	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama K/L terkait dan beberapa perusahaan maskapai penerbangan (<i>airlines</i>) terkait peningkatan konektivitas melalui pembukaan rute dari dan menuju Bangka Belitung (Tanjung Kelayang).
4.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dihimpun alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang ada terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
5.	Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis dan Permasalahan terkait Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan (i) Diskusi Potensi Pengembangan Pariwisata bersama ADB pada 1 Juli, 11-15 Agustus, 19-22 Agustus, 26-30 Agustus, 5 September, 11 September, dan 26 September 2025 dan (ii) Penghitungan Indikator Quality Tourism pada 16 Juli, 25 Juli, 30-31 Juli, 4 Agustus, 12-15 Agustus, 8-9 September, dan 23-27 September
6.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan (i) Diskusi Identifikasi Potensi Dukungan ADB dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia pada 9 Oktober 2025, (ii) Diskusi dengan Asdep Pariwisata Olahraga Kemenpora: Update Status Koordinasi terbaru dengan pihak WSL pada 19 November 2025, dan (iii) Rakornis Evaluasi Dampak Penetapan Bandara Internasional terhadap Pariwisata dan Perekonomian pada 24 November 2025
7.	Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan (i) Seminar Asuransi Pariwisata pada 6 Oktober 2025, (ii) Rakor Pengembangan Industri Olahraga: Sport Tourism pada 20 Oktober 2025, dan (iii) Focus Group Discussion Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo pada 17 Desember 2025

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa pemetaan potensi implementasi asuransi pariwisata di destinasi untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, potensi pengembangan *sport tourism* sebagai daya tarik wisatawan, dan potensi kerja sama pengembangan sektor pariwisata dengan lembaga internasional.

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator IKU 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) pada tahun 2025 sebesar USD 1.267. Indikator ini mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN periode 2025-2029, dengan target angka menengah pada tahun 2026 di angka USD 1.300-1.381,3 serta USD 1.600-1.672 di tahun 2029. Penetapan target dalam bentuk rentang menunjukkan adanya variabilitas capaian yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan wisata global, struktur pasar wisatawan, dan pola perjalanan, serta ketersediaan produk dan layanan pariwisata bernilai tambah pada destinasi.

Tahun 2025, realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara telah mencapai 97,46% dari target 2025, yang menunjukkan bahwa kinerja tahun 2025 sudah mendekati target pada tahun pertama RPJMN (2025-2029). Dengan demikian, capaian indikator pada tahun 2025 dapat menjadi dasar penguatan kebijakan peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun-tahun berikutnya, terutama dalam melalui perbaikan struktur pasar dan peningkatan nilai tambah produk pariwisata.

D) Perbandingan Capaian Kinerja di level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian indikator rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dilakukan melalui *benchmarking* terhadap beberapa negara ASEAN yang memiliki karakteristik pasar pariwisata relatif sebanding. Data yang digunakan merepresentasikan estimasi pengeluaran rata-rata per kunjungan pada tahun 2025. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bersifat indikatif karena terdapat perbedaan sumber data, cakupan periode pelaporan (*full year vs year-to-date*), serta metodologi perhitungan antarnegara. Oleh

karena itu, hasil benchmarking digunakan sebagai acuan posisi relatif (*relative positioning*) dan bahan penajaman strategi peningkatan *value per visit*, bukan sebagai ukuran kinerja yang sepenuhnya ekuivalen antarnegara.

Tabel 3.22 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan berdasarkan asal Negara
Tahun 2025

Negara	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2025
Indonesia	USD 1.267
Malaysia	USD 1.185
Thailand	USD 1.525,95
Vietnam	USD 1.900
Singapura	USD 1.100-1.110 (per September 2025)

Berdasarkan hasil *benchmarking*, capaian Indonesia pada tahun 2025 sebesar USD 1.267 menunjukkan posisi kinerja yang kompetitif dibandingkan dengan sebagian negara pembanding di ASEAN, khususnya terhadap negara yang memiliki karakteristik pasar wisata yang serupa. Namun, capaian tersebut masih dibawah negara dengan profil pariwisata bernilai tinggi yang memiliki ekosistem produk premium lebih matang dan tingkat belanja wisatawan yang lebih besar per kunjungan.

Perbedaan capaian antarnegara perlu dipahami secara proporsional karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti variasi struktur pasar wisatawan, pola perjalanan, serta perbedaan metodologi pencatatan pada masing-masing negara. Oleh karena itu, hasil benchmarking ini tidak dimaksudkan sebagai pemeringkatan kinerja yang bersifat absolut, melainkan sebagai acuan posisi relatif (*relative positioning*) untuk mengidentifikasi ruang perbaikan dan penajaman intervensi kebijakan.

Dalam konteks target jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 yang meningkat secara bertahap hingga kisaran USD 1.600-1.672 pada tahun 2029, capaian tahun 2025 mengindikasikan perlunya akselerasi strategi peningkatan *value per visit* agar pertumbuhan kunjungan dapat terkonversi menjadi peningkatan pengeluaran per kunjungan wisatawan mancanegara secara berkelanjutan.

Penguatan kinerja pada tahun-tahun kedepan diarahkan melalui penajaman segmentasi pasar dan fokus pada segmen wisatawan berdaya beli tinggi, pengembangan produk pariwisata bernilai tambah, serta penguatan penyelenggaraan event berkualitas dan MICE sebagai pendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan.

Pada tingkat destinasi, strategi tersebut perlu didukung melalui peningkatan kualitas layanan dan amenitas serta penguatan ekosistem pariwisata termasuk didalamnya penguatan konektivitas dan kemudahan layanan yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.

E) Program Crosscutting dengan Kedeputian Lainnya atau Kementerian Lembaga Lainnya

Pencapaian indikator rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara bersifat lintas sektor dan memerlukan sinergi kebijakan serta pelaksanaan program yang melibatkan beberapa unit internal dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Program tersebut mencakup aspek pengembangan destinasi serta penguatan aksesibilitas dan konektivitas. Dalam konteks ini, crosscutting dilakukan melalui koordinasi perencanaan, harmonisasi kegiatan, dan penyelarasan program kerja agar peningkatan jumlah kunjungan dapat terkonversi menjadi peningkatan belanja per kunjungan.

Secara internal, kolaborasi dilakukan dengan Asisten Deputi BUMN Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Badan Usaha Milik Negara untuk memperkuat peran BUMN dalam peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi ekosistem destinasi yang mendorong peningkatan belanja wisatawan mancanegara. Sinergi tersebut diarahkan pada penyelarasan program dan kegiatan BUMN pariwisata dalam aspek penguatan amenities dan atraksi, peningkatan standar layanan, serta pengembangan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan layanan transportasi, akomodasi, dan aktivitas wisata dalam satu rantai nilai (*tourism value chain*). Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mendorong kontribusi BUMN dalam penguatan penyelenggaraan event berskala nasional/internasional, pengembangan produk MICE, serta perluasan kanal promosi dan distribusi layanan yang lebih mudah diakses wisatawan.

Secara eksternal, kolaborasi dilakukan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait antara lain; (i) Kementerian Pariwisata, selaku instansi teknis yang memiliki mandat utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata, khususnya dalam penguatan destinasi, produk wisata bernilai tambah, serta pemasaran pariwisata yang tersegmentasi. Sinergi dilakukan melalui penyelarasan program pada destinasi prioritas, penguatan kualitas pengalaman wisata, serta pengembangan *high value tourism* yang mendorong peningkatan pengeluaran per kunjungan. (ii) Kementerian Perhubungan, dalam rangka penguatan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan transportasi udara, laut, dan darat, termasuk optimalisasi rute dan jadwal yang mendukung peningkatan lama tinggal dan penyebaran

pergerakan wisatawan. (iii) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, untuk penguatan kemudahan layanan keimigrasian dan peningkatan pengalaman kedatangan wisatawan, termasuk penyederhanaan proses layanan yang berdampak pada persepsi kemudahan berwisata. (iv) Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah untuk penguatan tata kelola destinasi, standar layanan, serta integrasi ekosistem ekonomi kreatif dan ritel lokal sebagai pendorong belanja wisatawan. Sinergi ini diarahkan untuk memastikan intervensi tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi pada prioritas yang sama: peningkatan pengalaman wisata, lama tinggal, dan belanja per kunjungan.

F) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator IKU 4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) mencapai 97,46% terhadap batas bawah target tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang mendekati target, didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, penguatan promosi dan aktivasi pasar, serta perbaikan kualitas layanan dan atraksi pada sebagian destinasi. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada meningkatnya aktivitas ekonomi pariwisata dan peluang belanja wisatawan selama kunjungan, meskipun peningkatan belanja per kunjungan belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh faktor penghambat yang berkaitan dengan kualitas pengalaman wisata (*tourist experience*), khususnya pada aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berwisata. Dalam beberapa periode terakhir, perhatian publik terhadap isu keselamatan di destinasi wisata cenderung meningkat, sehingga dapat mempengaruhi persepsi

wisatawan terhadap tingkat risiko perjalanan dan kenyamanan berkunjung. Kondisi ini berpotensi berdampak pada keputusan perjalanan, pilihan destinasi, serta perilaku belanja wisatawan (misalnya preferensi aktivitas yang lebih terbatas atau durasi tinggal yang lebih singkat). Selain itu, faktor struktural seperti variasi kualitas layanan antar destinasi, keterbatasan produk wisata bernilai tambah di beberapa lokasi, serta perbedaan pola perjalanan dan lama tinggal turut memengaruhi besaran pengeluaran per kunjungan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan asuransi pariwisata diposisikan sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen risiko dan perlindungan wisatawan, bukan semata-mata isu biaya tambahan. Tantangan yang masih muncul adalah bagaimana memastikan skema perlindungan tersebut dipahami sebagai nilai tambah yang meningkatkan rasa aman dan kepastian layanan, dengan desain produk yang sederhana, terjangkau, dan mekanisme klaim yang jelas. Oleh karena itu, tindak lanjut perbaikan difokuskan pada penguatan intervensi yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan di destinasi, sekaligus memperkuat konversi pertumbuhan kunjungan menjadi peningkatan belanja per kunjungan.

Berdasarkan kendala tersebut, disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan, antara lain: (i) penguatan standar keselamatan dan kenyamanan destinasi melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk peningkatan kesiapsiagaan, informasi risiko, dan tata kelola pengunjung; (ii) implementasi pilot project asuransi pariwisata pada destinasi prioritas dengan integrasi pada *customer journey* wisatawan serta penyederhanaan layanan dan klaim; (iii) penguatan produk wisata bernilai tambah dan event

berkualitas yang mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan; serta (iv) pemetaan dan pengembangan potensi *sport tourism* sebagai salah satu pengungkit peningkatan *value per visit* melalui aktivitas wisata yang memiliki profil belanja lebih tinggi.

G) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2025 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pemetaan isu, serta pengumpulan data dan informasi sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

H) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2025, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

- Koordinasi lintas K/L dan *stakeholder* terkait untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas dari dan menuju destinasi pariwisata,

- Diskusi dengan PROSPERA terkait dengan kebijakan harga tiket pesawat,
- Koordinasi dengan K/L dan *stakeholder* terkait dalam upaya peningkatan konektivitas melalui pembukaan rute dari dan menuju Bangka Belitung
- Diskusi dengan Asian Development Bank terkait dengan pengembangan pariwisata serta potensi dukungan ADB dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia
- Koordinasi dengan K/L dan *stakeholder* terkait dengan pengembangan *sport tourism* sebagai bentuk upaya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara
- Koordinasi dengan K/L dan *stakeholder* terkait dengan pengembangan asuransi pariwisata sebagai bentuk penguatan perlindungan dan manajemen risiko perjalanan untuk meningkatkan rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan wisatawan selama berwisata.

Rekomendasi perbaikan dalam mencapai target juga dituangkan kedalam rencana aksi peningkatan kinerja sebagaimana berikut:

Triwulan I

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara
- Pengumpulan data dan informasi terkait pengeluaran wisatawan mancanegara

Triwulan II

- Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara
- Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara

Triwulan III

- Penyusunan rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara

Triwulan IV

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi kebijakan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara
- Penyusunan kebijakan hasil rekomendasi penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait pengeluaran wisatawan mancanegara

IKU 5 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) proses tahapan, yakni (i) Identifikasi Permasalahan, (ii) Penyusunan Alternatif Rekomendasi, (iii) Formulasi Kebijakan, serta (iv) Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi di antaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata adalah:

- 1) Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka

- 2) Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
- 3) Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
- 4) Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
- 5) Pengembangan Pariwisata.

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi) dengan penjelasan sebagai berikut:.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*).

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau *piloting*, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektivitas SKP

$$= \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada tren-tren pada tahun sebelumnya. Adapun target triwulan IV ditetapkan dengan nilai yang sama.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 112,44 yang dikonversi ke skala indeks menjadi 4 (sangat efektif) atau mencapai 133% dari target Triwulan IV sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 5.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	4 (Sangat efektif)	133%

Perhitungan realisasi tersebut didasarkan atas pencapaian efektivitas pelaksanaan KSP di masing-masing Asisten Deputi dibawah lingkup Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun isu strategis terkait pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka serta Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis menjadi isu yang dikoordinasikan paling efektif dibandingkan dengan isu lainnya dengan nilai 125,00. Ringkasan realisasi nilai efektivitas KSP untuk masing-masing Asisten Deputi dan perhitungan nilai Indeks Efektivitas KSP Kedeputusan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Realisasi Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Realisasi TW IV
1.	Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka	125,00
2.	Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil	102,89
3.	Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	111,80
4.	Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	125,00
5.	Pengembangan Pariwisata	100,00

$$\text{Indeks KSP Deputy} = \sqrt[5]{125,00 \times 102,89 \times 111,80 \times 125,00 \times 100,00} = 112,44$$

Hasil akhir nilai Indeks KSP Deputy adalah 112,44 yang berada pada rentang sangat efektif (nilai Indeks 4).

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.25 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 5.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain: • Rapat Koordinasi Teknis terkait Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 2025; • Terlibat dalam Diseminasi Survei Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau tanggal 1 Oktober 2025; • Terlibat dalam Konsultasi Publik Revisi Permenperin 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) tanggal 3 Oktober 2025; • Panelis pada FGD Harmonisasi Regulasi Menuju Keseimbangan Kebijakan Kretek di Indonesia tanggal 20 Oktober 2025; • Audiensi dengan Unilever (24 Oktober 2025), GAPRINDO (28 Oktober 2025), IJBNet (17 November 2025), CLGS

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Fakultas Hukum UI (10 Desember 2025), dan PT Lembata Hira Sejahtera (24 Desember 2025). Telah dilakukan kegiatan koordinasi dan penyelesaian kendala/ permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri , antara lain: • Terlibat dalam Kick Off Penajaman Peta Jalan Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara dalam rangka Akselerasi Pengembangan Industri Kimia Nasional tanggal 7 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan tanggal 27 Oktober 2025; • Terlibat dalam Penyamaan Persepsi terkait Usulan Tata Niaga Impor Bahan Baku Obat tanggal 5 November 2025; • Terlibat dalam FGD Profil Produksi dan Industri Pengolahan Garam Nasional untuk Mewujudkan Swasembada Garam Nasional tanggal 4 Desember 2025; • Audiensi dengan PT Satoria Aneka Industri (23 Desember 2025). Telah dilakukan rangkaian kegiatan dalam mendorong Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki , antara lain: Rakor Policy Pathway Ekosistem TPT bersama K/L dan Asosiasi tanggal 8-9 Oktober 2025;

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			• Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan pada Industri Tekstil TA 2025 tanggal 15, 17, dan 22 Oktober 2025; • Melaksanakan Diskusi Terbatas: Tata Niaga Impor tanggal 30 Oktober 2025; • Diskusi Pendalaman hasil kajian Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) di Indonesia tanggal 21 November 2025; • Melaksanakan Forum Kebijakan Strategis: Bedah Hasil Kajian: Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (TPT) yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global tanggal 9 Desember 2025. Telah dilaksanakan lanjutan koordinasi dan evaluasi isu Cesium-13: • Keterbatasan bahan baku untuk industri dalam negeri: salah satunya dipengaruhi kebijakan larangan impor scrap besi baja untuk bahan baku industri nasional dikarenakan temuan zat Cesium-137. Telah dilaksanakan rangkaian koordinasi lanjutan penyusunan peta jalan ekosistem industri semikonduktor dan teknologi baru: • Telah dilaksanakan rangkaian Rapat Koordinasi Penyempurnaan Zero Draft Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 3, 7, dan 10 Oktober 2025

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Batang Tubuh dan Rencana Aksi Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 24 Oktober dan 14 November 2025 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 Pembahasan Draft Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru pada tanggal 1 Desember 2025 Telah dilaksanakan monitoring implementasi kebijakan industri otomotif dan KBLBB: - Telah dilakukan peresmian fasilitas produksi PT VinFast Automobile Indonesia pada tanggal 15 Desember 2025 di Subang Jawa Barat, keberadaan fasilitas ini mendorong peningkatan output industri manufaktur, konsumsi rumah tangga, dan investasi tetap bruto.
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Terlaksana	- Terkait pelaksanaan transisi Program Kartu Prakerja, telah diusulkan proses likuidasi satker BUN MPPKP (Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan tanggal 7 November 2025). - Berpartisipasi dalam acara Indonesia Productivity Summit 2025 tanggal 12 Desember 2025 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. - Telah ditetapkan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP 36

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Tahun 2021 tentang Pengupahan. • Program stimulus ekonomi berupa Bantuan Subsidi Upah per 4 Agustus 2025 menunjukkan data realisasi anggaran Rp 9,59 triliun yang disalurkan kepada 15 juta pekerja dengan tingkat keberhasilan 94,5% dari target penyaluran 15,9 juta pekerja. • Telah dilaksanakan Serap Aspirasi Penyusunan Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 terkait Pelindungan Awak Kapal Perikanan tanggal 30 Oktober 2025. • Telah dilaksanakan Rapat PAK dan Konsultasi Publik Penyusunan RPerpres Pelindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital tanggal 5 dan 12 November 2025. • Implementasi paket stimulus kebijakan ekonomi untuk meringankan beban operasional perusahaan guna memitigasi risiko PHK massal, melalui perpanjangan diskon luran JKK dan perluasan cakupan insentif PPh 21 DTP ke sektor pariwisata.
3	Monitoring dan evaluasi Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang berdaya saing	Terlaksana	Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi terkait kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi, antara lain: • Rapat Persiapan Joint-Investment Forum 2025 pada tanggal 3 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Lintas K/L terhadap Penyelesaian Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi pada Kawasan Hutan yang Dikelola

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			oleh Perum Perhutani untuk Pembangunan SUTT 150 kV KIT Batang-Incomer (Batang New-Weleri) pada tanggal 22 Oktober 2025; • Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa dan Narasumber Diseminasi Hasil Kajian Investasi Sektor Manufaktur di Wilayah Jawa pada tanggal 4 November 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Investasi KEK Mandalika, Likupang, dan Morotai pada tanggal 18 Desember 2025; • Rapat Lintas Sektor pada tanggal 27 Oktober 2025, 26 November 2025, 11 Desember 2025.
4	Monitoring dan evaluasi kebijakan Penyelesaian PSN	Terlaksana	Telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi terkait kebijakan di bidang pengembangan PSN antara lain: • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Energi pada tanggal 3 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Sektor Transportasi pada tanggal 13 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi TW III pelaksanaan PSN PLTS Terapung Waduk Tembesi pada tanggal 17 Oktober 2025; • Rapat Monitoring dan Evaluasi PSN Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			rangka Pengembangan EV Battery Nasional pada tanggal 21 November 2025; Rapat Fasilitasi Percepatan Realisasi PSN Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) pada tanggal 19 November 2025.
5	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait ekosistem pariwisata, antara lain: - Monitoring dan evaluasi atas stimulus berupa diskon transportasi libur natal dan tahun baru berupa diskon tiket kereta, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan tiket pesawat. - FGD terkait implementasi asuransi pariwisata. Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait pembiayaan pengembangan pariwisata, antara lain: - Pembahasan dan pendalaman substansi RPerpres Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang meliputi pembentukan kelembagaan bagi pelaksana pengelola program IQTF, dan unit pengelola Dana Program IQTF. - Pembahasan substansi pokok penyusunan peraturan pelaksana RPerpres DPB sepanjang bulan Oktober-Desember 2025. - Rapat Harmonisasi RPerpres DPB pada 27 Oktober 2025 dan 19 November 2026. Dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Potensi dan

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
			Alternatif Skema Pembiayaan untuk Percepatan dan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata pada tanggal 3 Desember 2025.
6	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat dan kegiatan terkait kebijakan tata kelola destinasi wisata, antara lain: • Rapat pembahasan mengenai tata kelola kompleks Candi Borobudur; • Monitoring dan evaluasi progres capaian pengembangan kawasan otorita Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores; Selain itu, juga telah disampaikan arahan Tim Koordinasi Tata Kelola Borobudur terkait tindak lanjut usulan PT TWC selaku pengelola Kompleks Candi Borobudur untuk menerapkan penyesuaian tarif tiket di Kompleks Candi Borobudur. Pada tanggal 27 November 2025 juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembaharuan MoU Pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Pawon untuk kegiatan keagamaan umat Buddha dan Hindu. Dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Es. I terkait evaluasi pasca pembukaan bandara internasional terhadap sektor pariwisata dan industri pada tanggal 24 November 2025.

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

Sasaran program Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas dan indikator kinerja utama Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan sasaran dan indikator yang baru disusun dan diampu pada tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan struktur dan organisasi baru melalui Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Atas dasar hal tersebut, sasaran dan indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan target tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah.

D) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan pencapaian nilai Indeks SKP di atas 100% menunjukkan bahwa proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan berjalan optimal, terstruktur, dan konsisten pada seluruh tahapan manajemen kebijakan. Berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

- Proses perencanaan kebijakan dilakukan secara jelas, terstruktur dan sesuai dengan arah kebijakan nasional.
- Koordinasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga dilakukan secara efektif dan efisien disertai dengan dukungan penuh dari Kementerian/Lembaga
- Implementasi dari rekomendasi kebijakan dilaksanakan dengan baik.
- Proses evaluasi kebijakan dilakukan secara berkelanjutan dan menghasilkan perbaikan yang membangun dan komprehensif.

E) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi pada tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan aplikasi srikandi dan penggunaan fasilitas internal Deputy V Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengadaan kegiatan rapat dan konsinyering untuk biaya paket meeting dalam/luar kota.

- 1) Beberapa kegiatan koordinasi rapat masih tetap dilaksanakan secara daring (Zoom) walaupun status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut. Apabila berbagai rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara luring dan berlokasi di Kantor Kementerian/Lembaga, maka diperlukan biaya transportasi dalam kota menuju ke tempat pelaksanaan rapat sebesar Rp 850.000 (170.000 x 5 orang, asumsi peserta rapat sebanyak 5 orang) untuk 1x rapat. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat melalui daring mendorong terjadinya efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dalam kota.
- 2) Penggunaan srikandi dalam hal persuratan memudahkan proses disposisi menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan pekerjaan keseharian. Selain itu, penyimpanan dokumen dengan menggunakan Cloud seperti *Dropbox* maupun *Google Drive* membuat penyimpanan arsip dokumen menjadi lebih efisien dan efektif. Baik penggunaan e-office maupun penggunaan Cloud mendorong penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa. Dengan adanya penggunaan e-Office dan Cloud, akan mengurangi dokumen persuratan/dinas yang perlu dicetak karena dokumen

tersebut sudah berada di sistem. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputan V merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

- 3) Selain itu, penyebaran survei tidak menggunakan kertas namun *google form* sehingga dapat menghemat kertas dan mencapai efisiensi sumber daya. Sebagaimana diketahui, pencetakan dokumen memerlukan pengadaan barang ATK berupa kertas. Berdasarkan Daftar Standar Harga, kertas *fotocopy* berada pada kisaran harga 63.200 sampai dengan 70.500 rupiah per rim nya. Oleh karena itu, penggunaan e-Office dan Cloud Drive di kedeputan V merupakan salah satu upaya efisiensi karena mendorong penghematan dalam pengadaan barang/jasa.

F) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pencapaian diatas 100% menunjukkan bahwa beberapa program kebijakan telah dikoordinasikan secara efektif. Dalam perhitungan nilai indikator, kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka (ILMATEA) dan kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis mendapatkan nilai tertinggi yaitu 125. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pencapaian ditunjang oleh 2 program kebijakan tersebut.

Namun, disamping hal tersebut, terdapat beberapa program kebijakan yang diidentifikasi sebagai *key factor* dalam pencapaian ini yaitu:

- Program/kebijakan revitalisasi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
- Program/kebijakan penguatan industri hasil tembakau (IHT)
- Program/kebijakan pengembangan industri semikonduktor
- Program/kebijakan pengupahan dan bantuan subsidi upah
- Program/kebijakan magang nasional
- Program/kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Program/kebijakan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (termasuk didalamnya program IQTF)

IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dengan melakukan survei

pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian =

(Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2 + Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3 + Indeks Kepuasan Layanan Asdep 4 + Indeks Kepuasan Layanan Asdep 5

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun 2025 adalah nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 3,76 atau mencapai 125% dari target tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 6.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3,76 dari 4	120%

Pengukuran IKU 6.1 tersebut menggunakan hasil survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.27 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 6.1

No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan dan pelaporan Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Semester II	Terlaksana	Pelaksanaan survei telah dilakukan yaitu menyebarkan survei kepada stakeholder dan menyusun laporan dari hasil survei tersebut.

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 IKU yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM. Sedangkan di Tahun 2023 IKU yang digunakan adalah Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pada Tahun 2025, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa faktor yang mendorong keberhasilan dalam mencapai target tersebut:

- Komunikasi yang baik antara unit satu dengan unit lainnya di Kedeputan V maupun dukungan data dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring maupun evaluasi kebijakan bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sehingga rekomendasi kebijakan dapat ditindaklanjuti dengan baik.
- Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Kementerian Lembaga secara partisipatif melakukan pengisian survei yang telah disebar tersebut.

E) Analisis Penggunaan SDM/Efisiensi penggunaan anggaran

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan juga anggaran. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran diantaranya kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian masing-masing unit kerja juga memanfaatkan aplikasi video conference seperti zoom meeting sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.400.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang). Selain itu, survei dibuat dalam bentuk google form sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan

untuk anggaran kegiatan yang lebih membutuhkan seperti melakukan monitoring langsung ke lapangan.

F) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dapat dilakukan optimalisasi persiapan dan pelaksanaan survey. Pembagian tautan Google Form survey dapat ditingkatkan frekuensinya, misalnya tautan survey dibagikan pada saat ada kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Deputy V yang melibatkan K/L dan stakeholder terkait.

IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy V dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

A) Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy V pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target triwulan IV sebesar 85%.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri,

Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Triwulan IV sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.28 Hasil Pengukuran Kinerja IKU 7.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase	85%	85%	100%

B) Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.29 Pelaksanaan Rencana Aksi IKU 7.1

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja	Terlaksana	• Telah dilakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI beserta pengumpulan bukti dukung terkait. • Telah dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum dan Organisasi perihal Rancangan Keputusan Deputy tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025-2026 pada tanggal 9 Desember 2025. • Telah dilakukan Diskusi Tindak Lanjut Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 bersama Inspektur Kemenko Perekonomian pada tanggal 22 Desember 2025.
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan III telah disusun dan diunggah pada laman https://kinerja.ekon.go.id/ . Proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV dan pengumpulan bukti dukung juga mulai dilaksanakan.
3.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	• Pembahasan secara umum terkait persiapan pelaksanaan program tahun 2026 telah dilaksanakan bersama keasdepan teknis di lingkungan Deputy V dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
			tanggal 22 Desember 2025. Penyusunan draf Perjanjian Kinerja secara paralel juga mulai dilakukan mempertimbangkan masukan dari keasdepan teknis.
4.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Proses persuratan dan tata usaha, seperti penerimaan surat masuk, verifikasi dan penandatanganan dokumen secara elektronik, serta pengiriman surat keluar telah dilakukan melalui SRIKANDI.

C) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata* merupakan indikator yang baru ditetapkan dan mulai diampu pada Tahun 2025. Penetapan indikator ini merupakan bagian dari penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan implementasi Reformasi Birokrasi yang lebih terstruktur di lingkungan Deputi.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena pada periode sebelum Tahun 2025 indikator ini belum ditetapkan sebagai IKU Deputi dan belum dilakukan pengukuran secara mandiri dan terdokumentasi pada level unit kerja. Dengan demikian, Tahun 2025 merupakan tahun dasar (baseline) yang menjadi titik awal dalam membangun sistem pengukuran, pemantauan, dan

evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Deputi.

Capaian pada tahun dasar ini menjadi referensi untuk:

- A. Penyempurnaan metodologi pengukuran dan validasi data kinerja;
- B. Penetapan target yang lebih progresif pada periode berikutnya; serta
- C. Penyusunan strategi peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Analisis tren dan perbandingan kinerja secara kuantitatif baru dapat dilakukan mulai Tahun 2026 setelah tersedia data pembandingan yang konsisten.

D) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pada Tahun 2025, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan IKU ini pada Tahun 2025 antara lain:

1. **Komitmen Pimpinan dan Penguatan Tata Kelola**
Adanya komitmen pimpinan Deputi dalam mendorong implementasi Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari agenda prioritas penguatan akuntabilitas kinerja.
2. **Integrasi dengan Sistem Perencanaan dan Kinerja**
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah mulai diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, sehingga memudahkan proses monitoring dan pelaporan capaian.
3. **Koordinasi Internal yang Lebih Terstruktur**
Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Deputi dalam mendukung pemenuhan komponen dan eviden Reformasi Birokrasi.

4. **Pemanfaatan Mekanisme Monitoring Berkala**

Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara rencana aksi dan realisasi pelaksanaan.

E) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seperti pelaksanaan rencana aksi pada indikator lainnya, pelaksanaan rencana aksi pada IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata di sepanjang tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dan juga anggaran. Sebagai contoh, seluruh proses persuratan dan tata usaha dilakukan secara elektronik melalui SRIKANDI sehingga dapat mengurangi beban anggaran untuk alat tulis kantor. Selain itu, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas juga dilakukan secara daring melalui *spreadsheet* untuk mengurangi penggunaan kertas. Kegiatan rapat pembahasan terkait Rancangan Keputusan Deputy tentang Kelompok Kerja Dukungan Teknis dan Administrasi Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025-2026 pada tanggal 9 Desember 2025 juga dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting Conference* sehingga dapat menghemat biaya konsumsi rapat hingga Rp 480.000,- (Rp 24.000 x 20 orang). Kegiatan lain yang telah dioptimalkan adalah penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di dalam kantor pada tanggal 22 Desember 2025 sehingga dapat menghemat biaya *paket meeting halfday* hingga Rp 542.000.000 (Rp 542.000 x 100 orang) dan biaya transportasi lokal hingga Rp 170.000.000 (Rp 170.000 x 100 orang). Oleh karena itu, pelaksanaan rapat di dalam kantor mendorong terjadinya

efisiensi biaya karena pada pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya *paket meeting*, uang harian, maupun biaya transportasi dalam kota.

F) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU pada periode mendatang, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan pedoman teknis dan standar operasional pengukuran pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
2. Penguatan sistem monitoring berbasis bukti (*evidence-based reporting*);
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendampingan dan koordinasi berkala; serta
4. Penetapan target yang lebih terukur dan progresif untuk Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025.

Dengan langkah tersebut, diharapkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Pada tahun 2025 turut melakukan *Auto Adjustment* anggaran. Pagu anggaran tahun 2025 sebelum *Auto Adjustment* adalah sebesar Rp. 30.300.000.000,00, kemudian pagu tersebut mengalami *Automatic Adjustment* sehingga menjadi sebesar Rp. 22.305.481.000,00. Pada bulan Februari, pagu anggaran kembali mengalami *Automatic Adjustment* dalam rangka menjalankan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pada triwulan II, pagu anggaran mengalami relaksasi atau pembukaan blokir sehingga pagu anggaran menjadi Rp 14.760.863.000. Lalu pada triwulan III, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata melakukan permohonan Anggaran Belanja Tambahan sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 15.260.863.000.

Realisasi Belanja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berdasarkan data SP2D OM SPAN sampai dengan 31 Desember 2025 berjumlah Rp.15.163.316.672,00 atau mencapai 99,36% dari Pagu DIPA sebesar Rp.15.260.863.000,00.

2. Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan

Dukungan Anggaran yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selama tahun 2025 sebesar Rp 15.260.863.000,- (Lima belas miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang didistribusikan kepada 6 (enam) kegiatan. Pagu dan realisasi anggaran setiap kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.30 Rincian Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	1.811.813.000	1.801.168.317	99,41
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	1.230.639.000	1.230.214.082	99,97
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	1.777.902.000	1.768.272.183	99,46
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan	1.221.958.000	1.188.249.500	97,24

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan			
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	7.999.145.000	7.959.322.705	99,50
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	1.219.406.000	1.216.089.885	99,73
TOTAL		15.260.863.000	15.163.316.672	99,36

3. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja anggaran adalah atas evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi. Evaluasi aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun pengukuran capaian output program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^I \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOPI_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^T$$

Keterangan:

COP : Capaian Output Program tingkat unit eselon I

RIOPj : Realisasi Indikator Output Program j

TIOPj : Target Indikator Output Program j

I : Jumlah Program pada suatu unit eselon I

m : Jumlah Output Program suatu Program

n : Jumlah Indikator suatu Output Program

Pengukuran capaian output program Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.31 Capaian Output Program

Kode	Kegiatan	TIOPj	RIOPj	COP
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	2	2	100%
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	4	4	100%
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	8	8	100%
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	4	4	100%
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	9	9	100%
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	4	4	100%
TOTAL		31	31	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator output program sejumlah 31 (tiga puluh satu) telah terealisasi semua sehingga capaian output program pada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu kegiatan dikatakan efisien, apabila dengan input yang sama dihasilkan output yang lebih besar, atau output yang dihasilkan adalah sama (sesuai target) dengan input yang lebih sedikit. Pelaksanaan analisis efisiensi keuangan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{OP} : Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
 $AA \text{ Program}_i$: Alokasi anggaran program i
 $RA \text{ Program}_i$: Target Volume Keluaran (*output*) Kegiatan
 COP_i : Capaian Output Program i
 n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Dari hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada Tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.32 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Kode	Kegiatan	COP per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%	1.811.813.000	1.801.168.317	1.811.813.000	10.644.683
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	100%	1.230.639.000	1.230.214.082	1.230.639.000	424.918
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka	100%	1.777.902.000	1.768.272.183	1.777.902.000	9.629.817
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	100%	1.221.958.000	1.188.249.500	1.221.958.000	33.708.500
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	100%	7.999.145.000	7.959.322.705	7.999.145.000	39.822.295
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata	100%	1.219.406.000	1.216.089.885	1.219.406.000	3.316.115
TOTAL		100%	15.260.863.000	100%	15.260.863.000	97.546.328
Efisiensi						0,64%

Berdasarkan perhitungan, capaian efisiensi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 diestimasikan adalah sebesar 0,64%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah berhasil melaksanakan



rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (*output*) yang diperjanjikan dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah menerapkan langkah-langkah efisiensi keuangan dilakukan dalam bentuk realokasi anggaran seperti *refocusing*, revisi petunjuk operasional kegiatan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan agar menggunakan anggaran secara efisien. Pelaksanaan rapat koordinasi jika memungkinkan diupayakan secara *online* melalui *video conference*. Berbagai langkah tersebut dilakukan agar tujuan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dengan anggaran yang efisien.



BAB IV EVALUASI KINERJA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Kolaborasi dan kerja Sama Pengembangan Semikonduktor dan Kecerdasan Artifisial (AI) di Indonesia

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memperkuat ekosistem semikonduktor dan AI di Indonesia melalui langkah proaktif dan kolaborasi internasional, khususnya dengan Singapura, guna mendorong investasi serta pengembangan dan diversifikasi rantai pasok di masa mendatang. (Jakarta, 30 April 2025)



BAB IV

EVALUASI KINERJA

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2025-2029, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merumuskan 4 (empat) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Salah satu bentuk perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata periode tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang berkualitas serta penata kelolaan deputy bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang baik. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Secara umum, matriks evaluasi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit Kerja di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Matriks Evaluasi Unit Kerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
1	PERENCANAAN KINERJA	30	30						
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	6						
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	9						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	15						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	PENGUKURAN KINERJA	30	30						
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	6						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	9						

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15							
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian <i>Reward and Punishment</i>			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	PELAPORAN KINERJA	15	15						
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	3						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.5	4.5						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5	7.5						
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	25						
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	12.5	12.5						
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	12.5							
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan pada seluruh level eselon II (asdep/kabiro)			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Berikut ini merupakan tabel perbandingan perencanaan dan realisasi/capaian dari Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Tahun 2025:

Tabel 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis / IndikatorKinerja Utama		Nama	Target	Realisasi	Capaian IKU	Status
Sasaran Program 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas						
IKU.1.1	Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	Renstra 2025	5,5%	-		
		PK 2025	5,5%	5,3%	96,36%	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKU.2.1	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Renstra 2025	3,3%	-		
		PK 2025	3,3%	3,75%	113,64%	Memenuhi Ekspektasi
IKU.3.1	Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	Renstra 2025	-	-		
		PK 2025	4 KSEP dari 4 KSEP	5 KSEP dari 4 KSEP	120%	Memenuhi Ekspektasi
IKU.3.2	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	Renstra 2025	-	-		
		PK 2025	83%	65%	78,31%	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKU.4.1	Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	Renstra 2025	9,53%	-		
		PK 2025	9,53%	7,41%	77,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKU.4.2	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	Renstra 2025	USD 1.300 - 1.381,3	-		
		PK 2025	USD 1.300 - 1.381,3	USD 1.297,31	93,92 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan Industri Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU.5.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Renstra 2025	3 dari 4	-		
		PK 2025	3 dari 4	4	120%	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Nama	Target	Realisasi	Capaian IKU	Status
Sasaran Program 3: Terwujudnya Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU.6.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Renstra 2025	3 dari 4	-		
		PK 2025	3 dari 4	3,76	120%	Memenuhi Ekspektasi
Sasaran Program 4: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas						
IKU.7.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Renstra 2025	85%	-		
		PK 2025	85%	85%	100%	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan data perbandingan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target-target yang telah ditetapkan pada perencanaan tahun 2025 dapat terealisasi dengan catatan memenuhi ekspektasi bahkan terdapat realisasi yang melebihi ekspektasi, adapun capaian iku dan perencanaan yang belum memenuhi ekspektasi adalah pada: (1) Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan; (2) Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN); (3) Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman; dan (4) Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan).

IKU Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan belum memenuhi ekspektasi dikarenakan (i) Penurunan produktivitas dan kapasitas operasional industri (Utilisasi pengolahan non-migas turun 8,45% yoy); kontraksi sektoral pada sub industri kayu, karet dan plastik, dan tembakau serta sektor alat angkutan); (ii) Hambatan Ekspor dan Proteksi Global diantaranya isu standar ESG, Regulasi Luar Negeri (EUDR, GMP,

tarif resiprokal AS, dll), lainnya; (iii) Tantangan Struktural dan Kepastian Hukum (Implementasi Perka Badan Karantina No. 5/2025 terkait Hewan Ikan Dan Tumbuhan; pengaturan zat adiktif dan kemasan dalam PP 28 Tahun 2024; (iv) Masih tingginya ekspor bahan baku industri dalam bentuk *raw material* sehingga utilisasi industri dalam negeri rendah (terutama kelapa, kakao, tepung tapioka); dan (v) Isu ketidakpastian pasokan gas bumi sebagai bahan baku maupun energi yang akan mempengaruhi inefisiensi produksi seperti pada industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

IKU Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) belum memenuhi ekspektasi dikarenakan oleh adanya perbedaan formula dalam penghitungan pembangunan PSN, di mana tingkat capaian pembangunan PSN kali ini dihitung berdasarkan proses bisnis dari 12 PSN, sedangkan formula pada tahun lalu didasarkan pada persentase penyelesaian pembangunan PSN yang diperoleh dari total penyelesaian pembangunan PSN. Selain itu, percepatan pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan usaha masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat perubahan struktur organisasi di beberapa Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Kehutanan yang berpengaruh pada proses pelepasan kawasan hutan dan belum tuntasnya sejumlah regulasi yang memerlukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian dalam Kabinet Merah Putih turut memperlambat proses pengembangan kawasan. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya dukungan pendanaan, sehingga mengurangi kapasitas pemerintah dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan ekonomi secara optimal.

Selain itu, IKU Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman belum memenuhi ekspektasi dikarenakan adanya i) efisiensi anggaran pemerintah pada belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan yang biasanya menggunakan hotel bintang 3–5 dipangkas

cukup besar, sehingga banyak hotel kehilangan sumber okupansi utama dari segmen instansi dan BUMN. Juga ii) Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan daya beli yang melemah mendorong perusahaan dan rumah tangga lebih berhati-hati membelanjakan uang, sehingga anggaran untuk meeting, gathering, dan makan di luar rumah ikut dipotong, sementara penjualan minuman dan produk F&B premium tidak tumbuh optimal.

Selanjutnya indikator Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan) belum memenuhi ekspektasi dikarenakan Indikator tersebut belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh faktor penghambat yang berkaitan dengan kualitas pengalaman wisata (*tourist experience*), khususnya pada aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berwisata. Dalam beberapa periode terakhir, perhatian publik terhadap isu keselamatan di destinasi wisata cenderung meningkat, sehingga dapat mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap tingkat risiko perjalanan dan kenyamanan berkunjung. Kondisi ini berpotensi berdampak pada keputusan perjalanan, pilihan destinasi, serta perilaku belanja wisatawan (misalnya preferensi aktivitas yang lebih terbatas atau durasi tinggal yang lebih singkat). Selain itu, faktor struktural seperti variasi kualitas layanan antar destinasi, keterbatasan produk wisata bernilai tambah di beberapa lokasi, serta perbedaan pola perjalanan dan lama tinggal turut memengaruhi besaran pengeluaran per kunjungan.

Pada tahun 2025 merupakan masa tugas pertama dari Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun 2025. Tabel berikut merangkum isu-isu yang masih perlu untuk ditindak lanjuti beserta penanggung jawab isu tersebut:

Tabel 4. 3 Pending Issue terkait Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
1	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan Dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan	1. Penyusunan RPermenko didasarkan sebagai tindak lanjut atas Pasal 941 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perkembangan terakhir telah disepakati bahwa pembentukan payung hukum berupa regulasi Peraturan Menteri Koordinator (Permenko)	Kemenko Perekonomian
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, dan Aneka			
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru.	Perkembangan terakhir dari penyusunan RPerpres adalah finalisasi <i>first draft</i> . Selain itu, RPerpres juga tidak masuk ke dalam Program Penyusunan (Progsun) Kemenko Perekonomian Tahun 2026 yang ditetapkan Desember 2025. Selanjutnya RPerpres direncanakan akan diajukan izin Prakarsa pada awal tahun 2026.	Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri.
Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan			
1	Dasar kebijakan Pengakhiran Program Kartu Prakerja	Masih diperlukan pembahasan mengenai kebutuhan dasar kebijakan untuk pengakhiran Program Kartu Prakerja dimana penetapan dasar kebijakan pada Triwulan I-2026	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis			
1.	Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait Proyek Strategis Nasional	Terdapat beberapa terkait PSN yang memerlukan harmonisasi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		2021, Perpres Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029 dan Perpres Nomor 95 Tahun 2024 dan Keppres Nomor 19 Tahun 2025	
2.	Revisi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022	Dalam rangka percepatan investasi dan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dibutuhkan perubahan batang tubuh dan rencana aksi lampiran Perpres 106/2022.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3.	Penetapan Usulan Proyek Strategis baru	Saat ini terdapat 31 usulan proyek strategis nasional yang sedang berproses di KPPIP untuk selanjutnya dimohonkan arahan Menko Perekonomian dan persetujuan Presiden terkait penetapan PSN.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4.	Daftar Pilot Project Skema Pembiayaan Alternatif pada HPT dan P3NK	Belum tersusunnya daftar pilot project skema pembiayaan alternatif untuk HPT dan P3NK menyebabkan belum adanya implementasi skema yang dapat diuji coba secara praktis. Hal ini mengakibatkan belum teridentifikasinya model pembiayaan yang efektif serta kurangnya pedoman operasional dalam pelaksanaan kedua skema tersebut di lapangan.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Pengembangan Pariwisata			
1.	Penyusunan RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)	RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas pada tahun 2025 telah mencapai proses harmonisasi. Penyelesaian harmonisasi dan penetapan Perpres belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan masih adanya pembahasan dan penyepakatan muatan substansi mengenai komponen	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, KemenPan-RB, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup,

No	Pending Issue	Penjelasan	Penanggung Jawab selanjutnya (K/L)
		biaya yang dapat difasilitasi oleh IQTF.	Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, BPKP, BPDH

B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Inspektorat

Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Inspektorat Kemenko Perekonomian Nomor PW.04.01/41/INS.M.EKON/11/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada tanggal 28 November 2025, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dengan tujuan antara lain: a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi SAKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh unit kerja (Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014).

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dalam hal ini, pencapaian kinerja evaluasi atas hal-hal tersebut dilakukan terhadap implementasi SAKIP yang dilaksanakan di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Adapun hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 maka diperoleh nilai total sebesar 80,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,24
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,71
3	Pelaporan Kinerja	20%	15,09
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	14,99
Total Nilai			80,03

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Tahun 2025 menunjukkan kategori A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 80,03. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2025, maka nilai tersebut

merupakan nilai tahun pertama dan belum terdapat nilai untuk menjadi perbandingan.

Tabel 4.5 Tabel hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

NO	2025	
	KOMPONEN	NILAI
1	PERENCANAAN KINERJA (40%)	27,24
	a. Keberadaan (6%)	5,00
	b. Kualitas (9%)	8,02
	c. Pemanfaatan (15%)	14,22
2	PENGUKURAN KINERJA (30%)	22,71
	a. Keberadaan (6%)	5,55
	b. Kualitas (9%)	6,75
	c. Pemanfaatan (15%)	10,41
3	PELAPORAN KINERJA (20%)	15,09
	a. Keberadaan (4%)	3,20
	b. Kualitas (6%)	5,72
	c. Pemanfaatan (10%)	6,17
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (20%)	14,99
	a. Keberadaan (4%)	3,33
	b. Kualitas (6%)	3,33
	c. Pemanfaatan (10%)	8,33
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		80,03

Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Dengan demikian melalui tabel perbandingan hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata di atas dapat diketahui poin Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja . dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai yang cukup baik. Walaupun demikian, masih terdapat catatan dari inspektorat untuk beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki performa implementasi SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi

Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut pada Perencanaan Kinerja

Berdasarkan penilaian Komponen Perencanaan Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata meraih skor 27,24 dengan rincian: a) Keberadaan sebesar 5,00; b) Kualitas sebesar 8,02; dan c) Pemanfaatan sebesar 14,22. Angka tersebut terbilang sudah cukup baik namun Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk memperbaiki performa dalam hal penyusunan Perencanaan Kinerja baik dan berkesinambungan antara perencanaan strategis dengan Perencanaan Kinerja Tahunan. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk terus menindaklanjuti dan mengikuti setiap arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh Kemenpan RB, Inspektorat maupun Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian tentang bagaimana menyusun perencanaan kinerja yang baik sesuai harapan bersama.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam perencanaan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
1	Perlu menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Renstra Tingkat Eselon I sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.	Melakukan penyusunan, penetapan, serta publikasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) khusus untuk level Eselon I sebagai panduan kinerja jangka menengah.
2	Pengguna Anggaran (PA) perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) per kegiatan.	Pengguna Anggaran melakukan pengesahan dan penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk setiap unit kegiatan yang dikelola.
3	Dokumen KAK dan RAB per kegiatan perlu menjelaskan	Merevisi dan menyempurnakan dokumen KAK serta RAB agar

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
	keterkaitan antara anggaran dan kegiatan terhadap rencana IKU yang ditargetkan pada tahun anggaran tersebut.	memuat penjelasan eksplisit mengenai korelasi antara alokasi anggaran dengan pencapaian IKU.
4	Perlu mengevaluasi kembali dokumen Manual IKU sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK agar: a. Nomenklatur Sasaran Program digunakan untuk level Eselon I dan Sasaran Kegiatan untuk level Eselon II. b. Deskripsi sasaran dalam dokumen manual IKU harus detail dan lengkap agar dapat menggambarkan output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan dipastikan narasinya sama dengan yang tercantum di dokumen PK. c. Deskripsi IKU dalam dokumen manual IKU terdiri dari: 1) Definisi IKU harus diuraikan dengan detail (tidak bersifat general) dan menjelaskan kriteria yang digunakan untuk standar ketercapaian IKU sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu Specific; 2) Formula harus menggunakan rumus perhitungan IKU yang lengkap dan benar serta menjelaskan sumber datanya sehingga memenuhi kriteria SMART, yaitu Measurable. Periode pelaporan harus dipilih salah satu, apakah bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan yang selaras dengan Jenis Konsolidasi Periode agar memenuhi kriteria SMART, yaitu <i>Time Bound</i>.	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Manual IKU dengan menyesuaikan nomenklatur sasaran sesuai level jabatan, merinci deskripsi sasaran dan definisi IKU agar memenuhi kriteria SMART, memperbaiki formula perhitungan, serta menetapkan periode pelaporan yang selaras.
5	Perlu menyusun dokumen penetapan target untuk masing-masing IKU sampai dengan level Eselon II yang berisi argumen dan/atau pertimbangan yang logis	Melakukan Koordinasi dengan Unit pengampu IKU untuk menentukan dasar penetapan target IKU yang memuat deskripsi IKU,

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
	disertai kertas kerja perhitungan dan basis data yang memadai.	target berdasarkan RPJMN, metode perhitungan penetapan target (disertai dengan kertas kerja dan data pendukung), dan kesimpulan.
6	Perlu mengevaluasi kembali kembali dokumen Rencana Aksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari PK, agar: a. Ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. b. Aktivitas dalam Rencana Aksi harus spesifik sesuai dengan ruang lingkup Deskripsi IKU di dokumen Manual IKUnya (mendukung pencapaian IKU). Aktivitas dalam Rencana Aksi harus dipantau kemajuan dan statusnya dalam Laporan Kinerja Triwulanan.	Melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen Rencana Aksi agar disahkan oleh pimpinan, memastikan aktivitas di dalamnya selaras dengan Manual IKU, dan mengintegrasikan pemantauan progresnya ke dalam laporan triwulanan.

2. Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja

Berdasarkan penilaian Komponen Pengukuran Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata meraih skor 22,71 dengan rincian: a) Keberadaan sebesar 5,55; b) Kualitas sebesar 6,75; dan c) Pemanfaatan sebesar 10,41. Angka tersebut terbilang sudah cukup baik namun Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk dapat memperbaiki performa dalam hal pengukuran kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja internal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan baik kepada stakeholder terkait pengukuran kinerja baik di kalangan internal maupun eksternal kantor Kemenko Perekonomian.

Beberapa hal sebagai tindak lanjut dalam pengukuran kinerja antara lain:

Tabel 4.7 Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
1	Perlu menyusun kebijakan/peraturan sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur, penanggung jawab, beserta alur pengumpulan data kinerja di masing-masing unit kerja tingkat Eselon I.	Menyusun draf mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja
2	Laporan Kinerja Triwulanan harus menjelaskan informasi capaian kinerja yang relevan untuk masing-masing IKU disertai data dukung/bukti yang lengkap dan dapat diandalkan serta upaya efisiensi dan kuantifikasinya atas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Melakukan rekonsiliasi data capaian kinerja setiap triwulan, memverifikasi kelengkapan bukti pendukung, dan menyusun analisis kuantitatif mengenai efisiensi anggaran terhadap output yang dihasilkan.
3	Pengukuran kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh masing-masing unit kerja sampai dengan level Eselon II sebagai dasar penyesuaian anggaran tahun berjalan	Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja berkala (Dialog Kinerja) yang hasilnya digunakan sebagai rekomendasi resmi untuk revisi atau optimalisasi anggaran tahun berjalan.
4	Perlu menyusun dan menetapkan kebijakan/ pedoman terkait reward and punishment yang berdasarkan pada pengukuran (capaian) kinerja untuk kemudian diimplementasikan.	Membuat kriteria penilaian kinerja yang objektif untuk pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment), menetapkan dalam regulasi internal, dan menerapkannya secara konsisten.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui website kinerja kinerja.ekon.go.id. Selain itu, hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai

target kinerja yang ditetapkan, dan untuk menyesuaikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.

3. Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja

Berdasarkan penilaian Komponen Pelaporan Kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata meraih skor 15,09 dengan rincian: a) Keberadaan sebesar 3,20; b) Kualitas sebesar 5,72; dan c) Pemanfaatan sebesar 6,17. Angka tersebut terbilang sudah cukup baik namun Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk dapat memperbaiki performa dalam hal pelaporan kinerja yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki nilai SAKIP, tetapi juga untuk meningkatkan pemenuhan, kualitas dan implementasi pelaporan kinerja internal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan baik kepada stakeholder terkait pengukuran kinerja baik di kalangan internal maupun eksternal kantor Kemenko Perekonomian.

Tabel 4.8 Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Pelaporan Kinerja

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
1	Perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Triwulanan di level unit kerja Eselon I.	Melaksanakan mekanisme reviu internal secara berkala terhadap Laporan Kinerja Triwulanan untuk memastikan akurasi data sebelum dipublikasikan di laman kinerja.
2	Informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya perlu dijelaskan untuk masing-masing IKU di Laporan Kinerja Tahunan:	Menyusun analisis mendalam untuk setiap IKU dalam Laporan Kinerja Tahunan yang mencakup faktor pendukung keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret perbaikan.

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
3	Informasi dalam Laporan Kinerja harus dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, melalui pencantuman draft PK, draf rencana aksi, proyeksi kebutuhan anggaran periode berikutnya dalam Laporan Kinerja Tahunan.	Mengintegrasikan draft Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi tahun mendatang serta proyeksi kebutuhan anggaran ke dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk umpan balik perencanaan.
4	Unit kerja perlu melakukan upaya untuk memastikan Laporan Kinerja Tahunan menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Menyelenggarakan sosialisasi atau forum pemaparan hasil capaian kinerja tahunan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan rasa kepemilikan terhadap target organisasi.

4. Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan penilaian Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata meraih skor 14,99 dengan rincian: a) Keberadaan sebesar 3,33; b) Kualitas sebesar 3,33; dan c) Pemanfaatan sebesar 8,33. Dalam hal evaluasi akuntabilitas kinerja internal, beberapa hal sebagai tindak lanjut antara lain:

Tabel 4.9 Tindak Lanjut Evaluasi Komponen Perencanaan Kinerja

No.	Area yang Perlu Dikembangkan	Kegiatan Tindak Lanjut
1	Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP telah memberikan wewenang kepada masing-masing unit kerja sehingga perlu disusun/ditetapkan kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal di unit kerja.	Menyusun draf dan menetapkan Surat Keputusan atau Instruksi Deputi yang mengatur tata cara, jadwal, serta pembagian peran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal di lingkungan unit kerja.
2	Hasil Evaluasi Internal harus terdokumentasi dan menggambarkan hasil evaluasi seperti informasi apa yang telah diimplementasikan dengan baik, hal-hal yang masih perlu diperbaiki serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja	Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal yang memuat skor evaluasi, capaian positif, catatan kekurangan, serta daftar rekomendasi perbaikan yang konkret.

C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Tahun pelaporan 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 sekaligus fase konsolidasi penguatan tata kelola kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada periode ini dilakukan penataan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan arah kebijakan dan Sasaran Strategis baru. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun berjalan belum sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator yang digunakan merupakan indikator pada periode Renstra yang baru.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Sasaran Strategis dan IKU, Deputi menetapkan rencana aksi peningkatan kinerja yang berorientasi pada penguatan tata kelola, kualitas koordinasi kebijakan, dan akuntabilitas hasil.

Penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dilakukan melalui peningkatan intensitas dan kualitas forum koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan mekanisme tindak lanjut hasil rapat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terukur.

Dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, dilakukan reviu dan penyelarasan IKU pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan agar konsisten dengan Sasaran Strategis dan IKU dalam Renstra 2025–2029, serta responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Penyelarasan ini diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Penguatan kapasitas organisasi didukung melalui peningkatan kompetensi SDM berbasis kebutuhan melalui diklat, workshop, dan forum diskusi tematik yang relevan dengan penguatan fungsi koordinasi dan akuntabilitas kinerja.

Pengendalian kinerja dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi capaian secara bulanan dan triwulanan yang dilaporkan kepada pimpinan disertai analisis deviasi dan langkah korektif. Dialog kinerja internal dioptimalkan sebagai instrumen evaluasi dan percepatan pencapaian target. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas implementasi SAKIP, dilakukan benchmarking kepada unit atau instansi dengan nilai SAKIP tinggi guna mengadopsi praktik baik dalam pengelolaan kinerja. Peran Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan turut diperkuat dalam mendorong budaya kerja berorientasi hasil.

Di samping itu, evaluasi dan pemutakhiran dokumen manajemen risiko hingga level Unit Eselon II dilakukan untuk memastikan potensi risiko dalam pencapaian target dapat dimitigasi secara sistematis. Capaian dan permasalahan yang teridentifikasi dalam Laporan Kinerja ini menjadi dasar penyempurnaan strategi dan perencanaan tahun berikutnya sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kick-off Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru

Rapat dilaksanakan untuk menghimpun seluruh anggota SATGAS seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 374 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. (Jakarta, 21 Juli 2025)

BAB V PENUTUP



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun pelaporan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Tahun pelaporan merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, yang ditandai dengan penataan ulang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Pada fase ini, fokus utama tidak hanya pada pencapaian target tahunan, tetapi juga pada penguatan sistem manajemen kinerja sebagai fondasi jangka menengah. Dengan demikian, tahun ini sekaligus menjadi fase konsolidasi dan pembentukan baseline kinerja untuk periode Renstra yang baru.

Meskipun berada dalam tahap penyesuaian indikator dan penguatan sistem, capaian Indikator Kinerja Program menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata, serta menunjukkan bahwa strategi dan rencana aksi yang telah ditetapkan berjalan secara optimal.

Capaian ini juga menggambarkan semakin meningkatnya kualitas proses perencanaan, pengukuran, dan pengendalian kinerja yang didukung oleh monitoring dan evaluasi berkala, dialog kinerja internal, serta penguatan manajemen risiko. Sinergi yang konstruktif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku

kepentingan lainnya turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target program.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan ruang perbaikan yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, antara lain dalam aspek konsistensi implementasi tindak lanjut hasil koordinasi, penguatan kualitas data dukung kinerja, serta penyempurnaan integrasi manajemen risiko dengan perencanaan program. Temuan dan pembelajaran yang diperoleh selama tahun berjalan menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan rencana aksi tahun berikutnya.

Ke depan, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kinerja, memperkuat budaya kerja berorientasi hasil, serta memastikan setiap kebijakan yang dikoordinasikan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Laporan Kinerja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja.

B. Harapan dan Tindak Lanjut

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan transparan mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta strategi organisasi dalam merespons dinamika dan tantangan pembangunan di sektor industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Penyusunan laporan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi strategis yang menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan kinerja di masa mendatang.



Melalui evaluasi yang sistematis terhadap capaian dan kendala yang dihadapi, diharapkan organisasi dapat terus meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan dan kontribusinya terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dokumentasi capaian kinerja dan pembelajaran kelembagaan selama periode pelaksanaan mandat. Kami berharap capaian kinerja, sistem manajemen kinerja, serta praktik baik yang telah dibangun dapat menjadi fondasi yang kuat dan dilanjutkan secara berkesinambungan oleh unit kerja penanggung jawab yang baru, baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun pada kementerian/lembaga terkait lainnya, sehingga kesinambungan kebijakan dan kualitas koordinasi tetap terjaga.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, dedikasi, dan kerja sama yang konstruktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi. Komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh pihak menjadi faktor kunci dalam pencapaian kinerja yang sangat baik pada tahun pelaporan ini. Semoga semangat profesionalisme dan orientasi pada hasil yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional ke depan.



**Perpisahan Deputy V
(Periode Januari s/d Oktober 2025)**

Acara perpisahan Deputy V Bapak Rudy Salahuddin, dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi beliau selama mengemban amanah jabatan. Sehubungan dengan pelantikan beliau sebagai Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (Jakarta, 05 November 2025)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	1.1 Peningkatan Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan	5,5%
2.	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	2.1 Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	3,3%
3.	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	3.1 Jumlah Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	4 KSEP dari 4 KSEP
		3.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)	83%
4.	Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	4.1 Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman	9,53%
		4.2 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/Kunjungan)	USD 1,300 - 1.381,3
5.	Terwujudnya Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	5.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	3 dari 4
6.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4
7.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Berkualitas	7.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	85%

Kegiatan

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kena, Farmasi, dan Tekstil
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis
5. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Total

Anggaran

1. Rp. 3.000.000.000,-
2. Rp. 2.700.000.000,-
3. Rp. 3.600.000.000,-
4. Rp. 15.000.000.000,-
5. Rp. 4.000.000.000,-
6. Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 30.300.000.000,-*

(Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN
PARIWISATA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuryani Yunus

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Nuryani Yunus

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik	1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%
		1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%
		1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%
		1.4 Tingkat Ketepatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%
		1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	100%
		1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	100%
		1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	3 dari 4

Kegiatan

1. Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Total

Anggaran

Rp. 3.000.000.000,-

Rp. 3.000.000.000,-
(Tiga Milyar Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Nuryani Yunus

PERJANJIAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eripson M. H. Sinaga

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri
Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Eripson M. H. Sinaga

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	3,58%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Hilirisasi Industri Agro	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	80%
		2.3 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Aas Kaki di Pasar Domestik dan Global	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tela Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Agro dan Tekstil
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri di Sektor Kimia dan Farmasi
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor

Total

Anggaran

- Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 700.000.000,-

Rp. 2.700.000.000,-*

(Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Ribu Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri
Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Eripson M. H. Sinaga

PERJANJIAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, DAN ANEKA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
ELEKTRONIKA, DAN ANEKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atong Soekirman
Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, dan Aneka

Atong Soekirman

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, DAN ANEKA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka terhadap PDB	1,37%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka serta Peningkatan Utilitas ILMATEA	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyelesaian Regulasi Terkait untuk Mendukung Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencans Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Mesin dan Alat Transportasi
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Industri Elektronika dan ANEKA
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
5. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi

Total

Anggaran

- Rp 600.000.000,-
Rp 600.000.000,-
Rp 600.000.000,-
Rp 800.000.000,-
Rp 800.000.000,-

Rp3.600.000.000,-

(Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika, dan Aneka

Atong Soekirman

PERJANJIAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM
KETENAGAKERJAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairul Saleh

Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan
Produktivitas dan Pengembangan
Ekosistem Ketenagakerjaan

Chairul Saleh

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	1.1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Kehilangan Menengah Tinggi	62,97%
		1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30-58,80%
		1.3 Cakupan Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	32,15%
2	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80 %
		2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	80 %
3	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	3 dari 4
4	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	85%

Kegiatan

- Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
- Koordinasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Koordinasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja

TOTAL

Anggaran

Rp 500.000.000
Rp 1.500.000.000
Rp 1.000.000.000
Rp 1.000.000.000
Rp 4.000.000.000*

(Empat Miliar Rupiah)

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Peningkatan
Produktivitas dan Pengembangan
Ekosistem Ketenagakerjaan

Chairul Saleh

PERJANJIAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN PROYEK STRATEGIS



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN PROYEK STRATEGIS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suroto

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan
Ekonomi dan Proyek Strategis

Suroto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN PROYEK STRATEGIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	1.1 Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	100%
		1.2 Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional	80%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	85%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPGB, KSPN)
2. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sesuai Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021
3. Layanan Sarana Sistem Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
4. Koordinasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Total

Anggaran

- Rp. 2.057.355.000,-
Rp. 2.000.000.000,-
Rp. 120.000.000,-
Rp. 10.622.945.000,-

Rp. 15.000.000.000,-*

(Lima Belas Miliar Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan
Ekonomi dan Proyek Strategis

Suroto

PERJANJIAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PARIWISATA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI, KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PARIWISATA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herfan Brilianto Mursabdo

Jabatan : Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mohammad Rudy Salahuddin

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan
Pariwisata

Herfan Brilianto Mursabdo

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN PROYEK STRATEGIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas, Inklusif, dan Berdaya Saing	1.1 Persentase Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Prioritas yang Berdaya Saing	100%
		1.2 Tingkat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional	80%
2.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	2.1 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi	80%
		2.2 Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Proyek Strategis Nasional	80%
3.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis yang Berkualitas	4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis	65%

Kegiatan

- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (Kawasan Industri, KPBPS, KSPN)
- Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sesuai Perpres 78/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021
- Layanan Sarana Sistem Informasi Kewilayahan Penyelenggaraan Infrastruktur Prioritas
- Koordinasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Total

Anggaran

- Rp. 2.057.355.000,-
Rp. 2.006.000.000,-
Rp. 120.000.000,-
Rp. 10.822.645.000,-

Rp. 15.000.000.000,-*

(Lima Belas Miliar Rupiah)

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata

Mohammad Rudy Salahuddin

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan
Ekonomi dan Proyek Strategis

Suroto